



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
PEMERINTAH KABUPATEN
POLEWALI MANDAR



LAKIP 2024
LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN 2024



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dikerjakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja diperlukan sebagai evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Melalui laporan ini publik, instansi dan di internal organisasi dapat melakukan evaluasi dan penilaian terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran-sasaran strategis organisasi, sehingga pada masa mendatang dapat dilakukan upaya-upaya perbaikan kebijakan, strategi dan aksi untuk hasil yang lebih optimal.



Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar memiliki target capaian sebagai berikut :

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target 2024	Capaian	Persentase
1.	Meningkatnya kualitas keberhasilan lingkungan perkotaan	Persentase timbulan sampah yang terkelola	56 %	13,71%	13,71%
2.	Terkendalinya pencemaran lingkungan	Tingkat pencemaran	Ringan	Sedang	68.36
3.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A	A	
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100%	100 %	
		Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Perangkat Daerah	Sangat Baik	Baik	

Untuk pencapaian sasaran tersebut telah dialokasikan anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 15.974.807.149, dan terealisasi Rp. 14.615.157.869,- atau persentase realisasi 91,49 %. Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Kabupaten Polewali Mandar 2024, secara keseluruhan dapat dinyatakan telah mengerjakan sesuai yang ada dalam perjanjian kerja.

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar ini disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024.

Laporan ini pula sebagai bentuk komitmen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar mengimplementasikan paradigma Pemerintahan Berorientasi Hasil. Dalam penyusunannya, diungkapkan aspek perencanaan kinerja berupa sasaran strategis, indikator outcome dan target kinerja yang diperjanjikan. Dalam pengukurannya, diungkapkan perbandingan realisasi dengan target, perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya, perbandingan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra 2022-2024, analisis efisiensi, keberhasilan atau kegagalan dilengkapi faktor penunjang, kendala serta solusi yang diupayakan serta aspek akuntabilitas keuangan.

Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan penilaian keberhasilan dan kegagalan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar dalam pencapaian sasaran-sasaran strategis organisasi, sehingga pada masa mendatang dapat dilakukan upaya-upaya perbaikan kebijakan, strategi dan aksi untuk hasil yang lebih optimal.

Semoga dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, seluruh jajaran aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar semakin berkomitmen dan perannya untuk berkolaborasi meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas kinerja pada tahun berikutnya.

Polewali, 14 Februari 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar,



MOHAMMAD JUMADIL, S.T., M.AP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750606 200502 1 007

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN DEPAN	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	I-1
B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	I-2
C. Isu Strategis Organisasi	I-16
BAB I PERENCANAAN KINERJA	
A. Visi MISI	II-1
B. Rencana Strategis	II-2
C. Penetapan Kinerja 2024	II-5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	
A. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024	III-9
B. Akuntabilitas Keuangan	III-41
BAB IV PENUTUP	

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ..	I-3
Gambar 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2020-2024	II-3
Gambar 3.1 Dokumentasi Sampling Air Sungai	III-10
Gambar 3.2 Dokumentasi Sampling Air Laut	III-11
Gambar 3.3 Dokumentasi Sampling Udara Passive Sampler	III-14
Gambar 3.4 Penerimaan Apresiasi Tropy Utama Desa Pallis	III-28

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai DLHK berdasarkan golongan	I-4
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai DLHK berdasarkan tingkat Pendidikan	I-4
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai DLHK berdasarkan Gender	I-4
Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) Tahun 2024	I-4
Tabel 1.5 Sarana dan Prasarana Penunjang DLHK Tahun 2024	I-5
Tabel 1.6 Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024	I-12
Tabel 2.1 Visi, Pokok pokok visi dan Penjelasan Visi	II-1
Tabel 2.2 Misi dan Pokok Visi	II-1
Tabel 2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019-2024	II-4
Tabel 2.4 Program dan Alokasi Anggaran Tahun 2024	II-6
Tabel 3.1 Jumlah Kecamatan dengan Layanan Persampahan	III-3
Tabe 3.2. Timbulan Sampah Yang Terkelola Tahun 2023-2024	III-4
Tabel 3.3 Penanganan Persampahan Tahun 2023-2024	III-4
Tabel 3.4 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024	III-6
Tabel 3.5 Status Mutu Air Sungai Kab. Polewali Mandar Tahun 2023-2024	III-8
Tabel 3.6 Pemantauan Kualitas Air Sungai Di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021-2024	III-9
Tabel 3.7 Status Mutu Air Laut Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023-2024	III-11
Tabel 3.8 Status Mutu Air Limbah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023-2024	III-12
Tabel 3.9 Status Mutu Air Bersih Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023-2024	III-13
Tabel 3.10 Status Mutu Kualitas Udara Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023-2024	III-14
Tabel 3.11 Jumlah Usaha/Kegiatan Penghasil Limbah B3, Limbah Cair dan Emisi yang Terantau dan Terawasi di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024	III-17
Tabel 3.12 Timbulan Limbah B3 Padat dari Usaha dan/atau Kegiatan Kabupaten Polewali Mandar (Dalam Kg) Tahun 2024	III-18
Tabel 3.13 Timbulan Limbah B3 Cair dari Usaha dan/atau Kegiatan Kabupaten Polewali Mandar (Dalam Liter) Tahun 2024	III-20
Tabel 3.14 Jumlah Usaha/kegiatan yang Melakukan Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Cair, Emisi Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024	III-21
Tabel 3.15 Usaha/kegiatan Penghasil Limbah B3 yang Melakukan Pengolahan Eksternal (Pengangkutan Limbah B3) Tahun 2024	III-22
Tabel 3.16 Usaha/Kegiatan yang Mendapatkan Persetujuan Teknis (PERTEK) Tahun 2024	III-25
Tabel 3.17 Usaha/Kegiatan yang Mendapatkan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Tahun 2024	III-26
Tabel 3.18 Rekapitulasi Pengaduan dan Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Tahun 2024	III-26
Tabel 3.19 Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca	III-27
Tabel 3.20 Kategori Apreasiasi ProKlim Kab. Polewali Mandar	III-28
Tabel 3.21 Lokasi ProKlim Kab. Polewali Mandar 2018-2024	III-28
Tabel 3.22 Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2024	III-33

Tabel 3.23 Realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	III-36
Tabel 3.24 Hasil Survei Kepuasan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2023	III-38
Tabel 3.25 Realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	III-39
Tabel 3.26 Nilai Efisiensi pada Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024	III-41

DAFTAR GRAFIK

Hal.

Grafik 3.1 Indeks Pencemaran Air Sungai Tahun 2022-2024	III-9
Grafik 3.2 Persentase Pemantauan Kualitas Air Sungai Tahun 2022-2024 .	III-10
Grafik 3.3 Jumlah Usaha/Kegiatan Yang Melakukan Pengelolaan Limbah B3, Limbah Cair dan Emisi	III-22
Grafik 3.4 Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2024	III-41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa sebagai salah satu upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara.

Atas dasar hal tersebut di atas, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Setiap instansi pemerintah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan negara, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, wajib memberikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. dokumen berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Adapun informasi yang diharapkan dari laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2023 dan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar sebagai entitas SAKIP wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Dalam penyusunan laporan ini, diungkapkan capaian kinerja organisasi yang membandingkan antara target dengan realisasi, realisasi kinerja tahun berkenaan dengan tahun-tahun sebelumnya, keberhasilan dan kegagalan serta efisiensi sumber daya yang berhasil dilakukan dan akuntabilitas keuangan.

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan

Penyusunan LAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 dimaksudkan untuk menyediakan dan memberikan informasi terkait pencapaian kinerja secara terukur dengan memberikan perbandingan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya, perbandingan dengan kinerja tahun-tahun

sebelumnya, keberhasilan dan kegagalan, serta efisiensi sumber daya dan akuntabilitas keuangan.

Tujuan yang diharapkan melalui penyusunan LAKIP ini adalah tersedianya bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja organisasi selanjutnya dengan mencermati berbagai kendala dan permasalahan yang masih dihadapi dalam pencapaian kinerja organisasi yang telah ditetapkan.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan LAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 ini, sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- f. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
- g. Keputusan Bupati Nomor 1158 Tahun 2021 tentang Penetapan Tugas dan Fungsi Kelompok Sub Substansi dan Tugas Koordinasi dan Sub Koordinator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

B. Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi

1. Kondisi Organisasi/Kelembagaan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten.

Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12) dan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar merupakan unsur pelaksana urusan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

a. Kondisi Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan fungsi organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di dukung dengan sumber daya manusia sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai DLHK berdasarkan golongan

No.	Golongan	Jumlah (orang)
1	IV/b	2
2	IV/a	2
3	III/d	9
4	III/c	8
5	III/b	7
6	III/a	1
7	II/d	4
8	II/c	5
9	II/b	2
10	II/a	3
11	I/a	2
Total PNS		46

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2024

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai DLHK berdasarkan tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	S2	7
2	S1	22
3	SMA	5
4	PAKET B	2
5	PAKET C	10
Total PNS		46

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2024

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai DLHK berdasarkan Gender

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki-Laki	32
2	Perempuan	14
Total PNS		46

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2024

Selain Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga memiliki Pegawai Tidak tetap yang terdiri dari Tenaga Honorer berdasarkan Perjanjian Kontrak Kerja yang mendapatkan upah kerja. Pegawai Tidak Tetap (PTT) tersebut dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas keseharian.

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) Tahun 2024

No.	Tugas	Jumlah (orang)
1	Tenaga Administrasi	12
2	Operator Komputer	10
3.	Tenaga Pembersih Kantor	4
4.	Tenaga Analis Laboratorium Lingkungan	2

No.	Tugas	Jumlah (orang)
5.	Penyapu Jalan	82
6.	Satgas Kebersihan Drainase	37
7.	Sopir	14
8.	Buruh Angkut Sampah	38
9.	Operator Motor Sampah	18
10.	Workshop	4
11.	Pembersih Taman Kota	19
12.	Maintenance Air Mancur / Operator Air Mancur	2
13.	Operator Chain Saw RTH/Jalur Hijau	8
14.	Petugas Pembibitan Tanaman	2
15.	Petugas Lapangan RTH/Jalur hijau	7
16.	Petugas Lapangan RTH/Jalur hijau	5
17.	Pengelola Bank Sampah	10
18.	Tenaga Teknis Pemilah Bank Sampah	24
19.	Tenaga Teknis Pemilah Bank Sampah TPS3R LKW MAT	5
20.	Tenaga Teknis Pemilah Bank Sampah TPS3R ALLI-ALLI	4
Total Non ASN		307

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2024

b. Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Organisasi

Keadaan Sarana dan Prasarana Penunjang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar, keadaan Tahun 2024 yang bersumber dari Daftar Inventaris Barang pada aplikasi SIMAK sesuai tabel berikut ini:

Tabel 1.5 Sarana dan Prasarana Penunjang DLHK Tahun 2024

No.	Peralatan/ Perlengkapan	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
1	Crawler Excavator + Attachment	1			√	UPTD TPA/ Terbakar
2	Sepeda Motor	1	√			dipergunakan oleh Rahmatia.I,ST.MSP
3	Sepeda Motor	1	√			digunakan oleh Hasrianti Azis, ST,M.Si
4	Sepeda Motor	1		√		Edy Wibowo, MM
5	Mesin Pemotong Rumput	4		√		Pertamanan
6	Digital Camera	1	√			digunakan oleh Irsyad Ariansa, S.IP. M.Si
7	P.C Unit	1	√			UPTD TPA
8	Hard Disk	1	√			Pertamanan
9	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	1	√			Kendaraan Dinas Tiga Roda Pengangkut Sampah digunakan diPasar Balanipa
10	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	1		√		Kendaraan Dinas Tiga Roda Pengangkut Sampah digunakan oleh Kelurahan Polewali.
11	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	1	√			Kendaraan Dinas Tiga Roda Pengangkut Sampah digunakan oleh Operator Sampah Amir Syam
12	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	1		√		Kendaraan Dinas Tiga Roda Pengangkut Sampah digunakan Kec. Tinambung
13	Sepeda Motor	1	√			Pengguna Irsyad Ariansa S.IP, M.Si
14	Sepeda Motor	1	√			Pengguna Muh. Ali.R, S.Ip
15	Mobil Tangki Air	1	√			Pengguna Mainar
16	Pick Up	1	√			Pengguna Mansyur,S, S.Sos
17	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	1	√			Pengguna Karim
18	Alat Rumah Tangga Lain-lain	6	√			Kontainer Sampah
19	Hard Disk	1	√			digunakan oleh an. Irsyad Ariansa, S.IP M,Si
20	Sepeda Motor	1	√			Pengguna Pranata Taman an. Syahril
21	kendaraan bermotor khusus	1	√			Mobil Penyapu Jalan/HAKO

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024

No.	Peralatan/ Perlengkapan	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
	lainnya (dst)					
22	Lampu	1	√			Lampu Sorot Taman Alun Alun
23	Note Book	1	√			Pengguna Irsyad Ariansa S.IP, M.Si
24	Pompa Air	1	√			digunakan menyiram Taman
25	Mesin Pemotong Biasa	1		√		digunakan RTH
26	Station Wagon	1	√			digunakan Kabid. Kebersihan dan Pertamanan an. M. HAJIR. SH
27	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	√			Kepala Dinas DLHK
28	Sepeda Motor	1	√			Motor Suzuki digunakan oleh A.S.RIYADI
29	Sepeda Motor	1	√			Kendaraan digunakan oleh Cimo
30	Sepeda Motor	1	√			Pengguna Kabid P2KLH an. MUHAMMAD ILYAS, S.AP
31	Sepeda Motor	1			√	Pengguna Pak Jaya, SE
32	Sepeda Motor	1	√			Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan
33	Lemari Penyimpan	1	√			DLHK
34	Filing Cabinet Besi	2	√			DLHK
35	Lemari Kaca	2		√		DLHK
36	Alat Kantor Lainnya	1	√			DLHK
37	Meja Panjang	1	√			DLHK
38	Kursi Putar	5	√			DLHK
39	Kursi Lipat	5	√			DLHK
40	Meja 1/2 Biro	9	√			DLHK
41	Mesin Pemotong Rumput	2		√		Pertamanan
42	Lemari Es	1	√			DLHK
43	A.C. Split	1	√			DLHK
44	Kipas Angin	1	√			DLHK
45	Kompas Gas (Alat Dapur)	1	√			DLHK
46	Lap Top	1	√			digunakan oleh M. Ilham
47	Lap Top	1	√			digunakan oleh Nasmawati
48	Lap Top	1	√			digunakan oleh Miriani Abdullah K.SP
49	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	√			DLHK
50	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	√			DLHK
51	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	√			DLHK
52	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	√			DLHK
53	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	√			DLHK
54	Layar Film/Projector	1		√		LCD Proyektor
55	Layar Film/Projector	1		√		Layar LCD
56	Sound System	1	√			
57	Alat Penguji Penerapan Udara Air	1	√			Labaratorium Bidang PLPP
58	Oven (Alat Laboratorium Umum)	1	√			Labaratorium Bidang PLPP
59	Peralatan Pencampur Kompos & Bio Stabilizer	1		√		Mesin Pencacah Sampah Organik digunakan UPTD TPA Binuang
60	Peralatan Pencampur Kompos & Bio Stabilizer	1		√		Mixer Kompos di UPTD TPA Amola
61	TV Monitor	1	√			TV digunakan di ruang kepala dinas
62	Lemari Asam	1	√			Labaratorium Bidang PLPP
63	Pompa Airasil	1	√			Labaratorium Bidang PLPP
64	Alat Uji Kuat Lentur	1	√			Labaratorium Bidang PLPP
65	Alat Uji Kuat Lentur	1	√			Labaratorium Bidang PLPP
66	Alat Uji Kuat Lentur	1	√			Labaratorium Bidang PLPP
67	Thermometer Digital (Alat Laboratorium Lainnya)	1	√			Thermometer Digital
68	Rak Tabung Reaksi	1	√			Labaratorium Bidang PLPP
69	Pemadat Sampah	1	√			Mesin Pencacah Sampah/ UPTD TPA BINUANG
70	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	√			Bak Sampah Tembok Semen terpasang di jl. Dr.Ratulangi Darma Depan Kantor Kesbangpol
71	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	√			Bak Sampah Tembok Semen terpasang di jl. Dr.Ratulangi Darma
72	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	√			Bak Sampah Tembok Semen terpasang di jl. Ahmad Yani, Polewali
73	Treng Air/Tandon Air	1	√			Gedung Lab

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024

No.	Peralatan/ Perlengkapan	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
74	Lemari Besi/Metal	4	√			DLHK
75	Meja Kerja Kayu	4	√			DLHK
76	Kursi Putar	2	√			DLHK
77	Sofa	1	√			Ruang Kepala Dinas
78	Lap Top	1	√			digunakan oleh Muhammad Ichsan, S.IP
79	Lap Top	1	√			digunakan oleh PTT Administrasi (Operator) Novia Yolanda S.IP
80	Lap Top	1	√			Liantira Welem
81	Lap Top	1			√	Umum dan Kepeg
82	Lap Top	1	√			di gunakan oleh Rasmawati
83	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	√			Ruangan Bid. P2KLH
84	A.C. Split	1	√			DLHK
85	A.C. Split	1	√			DLHK
86	A.C. Split	1	√			DLHK
87	A.C. Split	1	√			DLHK
88	A.C. Split	1	√			DLHK
89	Mesin Pemotong Rumput	2		√		Pertamanan
90	Digital Camera	2			√	
91	Sepeda Motor	1	√			di gunakan oleh Bendahara Rutin An. NURNAYANTI, S.IP
92	Sepeda Motor	1	√			digunakan oleh Pengawas Kebersihan an. MUHAMMAD ICHSAN, S.IP
93	Sepeda Motor	1	√			di gunakan oleh Kasi Pertamanan Staf An.SUARNI,AJ
94	Sepeda Motor	1	√			di gunakan oleh JULIANA, SSI
95	Sepeda Motor	1	√			di gunakan oleh P2KLH An.Rahmat,SP
96	Kursi Rapat	13	√			
97	Scanner (Universal Tester)	1			√	Umum dan Kepeg
98	Lap Top	1	√			Bid.P2KLH
99	Sound System	1	√			digunaSekretariat
100	Mesin Pemotong Plat	1	√			Pertamanan/RTH
101	Global Positioning System	1			√	Umum dan Kepeg
102	PH Meter (Alat Ukur Universal)	1	√			Laboratorium Bidang PLPP
103	DO Meter (Alat Laboratorium Kualitas Air Dan Tanah)	1	√			Laboratorium Bidang PLPP
104	alat laboratorium kualitas air dan tanah lainnya (dst)	1	√			Laboratorium Bidang PLPP
105	Alat Laboratorium lainnya	1	√			Laboratorium Bidang PLPP
106	Alat Laboratorium lainnya	1	√			Laboratorium Bidang PLPP
107	COD Meter	1	√			Laboratorium Bidang PLPP
108	Alat Laboratorium lainnya	1	√			Laboratorium Bidang PLPP
109	Alat Laboratorium lainnya	1	√			Laboratorium Bidang PLPP
110	Alat Laboratorium lainnya	1	√			Laboratorium Bidang PLPP
111	Tiang Bendera	1	√			Halaman Kantor DLHK
112	Mesin Las Listrik	1	√			Bid. Kebersihan dan Pertamanan
113	Mesin Kompresor	1	√			Bid. Kebersihan dan Pertamanan
114	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	1			√	Kendaraan Dinas Tiga Roda Pengangkut Sampah/ Rusak Berat Dihalaman Kantor DLHK
115	Container	7	√			Kontainer Sampah
116	Dump Truck	1	√			digunakan oleh Sopir Petugas Kebersihan an. Sulaiman
117	Dump Truck	1	√			digunakan oleh Sopir Petugas Kebersihan an. Habibie
118	P.C Unit	1	√			
119	Note Book	1	√			digunakan oleh Kabid. PLPP an. RAHMATIA,I.SP.MSP
120	Note Book	1	√			PTT UPTD TPA An.SASA
121	Dump Truck	1	√			digunakan Oleh Sopir PTT Kebersihan Burhanuddin
122	Pick Up	1	√			PICK UP digunakan Oleh Sopir PTT Bank Sampah Induk Sandi Alam
123	Mesin Pemotong Serat	1	√			RTH
124	Lampu	1	√			Lampu Taman Solar Cell Pertamanan
125	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	√			Bin Sampah ditempatkan di Jalan Poros Trans Sulawesi dipolewali
126	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	√			Bin Sampah ditempatkan di Jalan Poros Trans Sulawesi dipolewali

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024

No.	Peralatan/ Perlengkapan	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
127	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	√			Bin Sampah ditempatkan di Jalan Poros Trans Sulawesi dipolewali
128	Lap Top	1		√		di pergunakan oleh bendahara barang An. A.S.RIYADI
129	Dump Truck	1	√			digunakan oleh Sopir Petugas Kebersihan Budi Rahim
130	Dump Truck	1	√			digunakan oleh Sopir Petugas Kebersihan an. NAHARUDDIN
131	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	1		√		Kendaraan Dinas Tiga Roda Pengangkut Sampah digunakan Bank Sampah Desa Sabang Subik Balanipa
132	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	1	√			Kendaraan Dinas Tiga Roda Pengangkut Sampah digunakan oleh Pranata Taman Hernis Masrah
133	Mesin Pemotong Biasa	1	√			RTH
134	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	1		√		Kendaraan Dinas Tiga Roda Pengangkut Sampah digunakan Bank Sampah Desa Sabang Subik Balanipa
135	Mesin Pemotong Biasa	1	√			Mesin Pencacah digunakan Bank Sampah Desa Sabang Subik Balanipa
136	Dump Truck	1	√			digunakan oleh Sopir Petugas Kebersihan an. Khalil Gibran
137	Dump Truck	1	√			digunakan oleh Sopir Petugas Kebersihan an. Alwi
138	Exkavator	1	√			digunakan UPTD TPA
139	Mesin Pemotong Biasa	1	√			RTH
140	Mesin Pemotong Biasa	1	√			RTH
141	Mesin Pemotong Biasa	1	√			RTH
142	Pick Up	1	√			digunakan oleh Sopir Tenaga Kebersihan an. M. Ridwan
143	Dump Truck	1	√			digunakan oleh Pranata Taman an. Cimo
144	Mesin Absensi	1			√	Umum dan Kepegawaian
145	Mesin Pemotong Rumput	1	√			Pertamanan
146	Gergaji Chain Saw	1	√			RTH
147	Lap Top	1	√			digunakan oleh Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda an. RAHMAT, SP, MM
148	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	√			Ruangan Bidang Penataan dan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup (Bid. P2KLH)
149	PH Meter (Alat Laboratorium Umum)	1	√			Laboratorium Bidang PLPP
150	Meja Rapat	1	√			Meja Rapat digunakan di DLHK
151	Kursi Kerja Pejabat lainnya	1	√			Umum dan Kepegawaian
152	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	√			
153	Kursi Rapat	7	√			
154	Meja Kerja Kayu	1	√			Pengelolaan Limbah Pencemaran dan Pengendalian
155	Meja Kerja Pejabat lain-lain	3	√			
156	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	1	√			Pengguna Sekretaris Dinas
157	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	√			Perencana
158	Kursi Rapat	10	√			DLHK
159	Lemari Arsip Pejabat lainnya	1	√			DLHK
160	Lemari Arsip Pejabat lainnya	1	√			DLHK
161	Personal Computer	1	√			Umum dan Kepegawaian
162	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	√			Ruangan Bidang P2KLH
163	Note Book	1	√			Pengelola Keuangan
164	Lap Top	1	√			Note book digunakan oleh Kadis DLHK Bendahara Gaji An. Ratnawati
165	Lap Top	1	√			digunakan Oleh Kepala Dinas DLHK
166	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	√			digunakan oleh Bagian Keuangan Pembantu Bendahara Rutin An. Zainuddin
167	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	√			Ruangan Bidang P2KLH
168	Vacum Pump	1	√			digunakan diruangan Laboratorium Bidang pengelolaan limbah pencemaran dan pengendalian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024

No.	Peralatan/ Perlengkapan	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
169	GPS	1	√			digunakan diruangan Laboratorium Bidang Pengelolaan Limbah Pencemaran dan Pengendalian
170	Mesin Cakah	1	√			dipinjam Pakaian Ke Kecamatan Wonomulyo
171	mesin proses lainnya (dst)	1	√			Mesin Press Hidrolik digunakan di Bank Sampah Induk DLHK
172	Dump Truck	1	√			digunakan oleh Sopir Petugas Kebersihan an. Imam Wahyudi
173	Kontainer	1	√			Kontainer Sampah
174	Dump Truck	1	√			digunakan oleh Sopir Petugas Kebersihan an. Suherpi
175	Dump Truck	1	√			digunakan oleh Sopir Petugas Kebersihan an. Rahman
176	Dump Truck	1	√			digunakan oleh Sopir Petugas Kebersihan an. Fadli
177	Meja Kerja Pejabat lain-lain	1	√			Pengelola Keuangan
178	Kursi Rapat	9	√			Masing-Masing Bidang dan Sekretariat
179	Hopper	1	√			Gedung Pusat Daur Ulang UPTD TPA Amola Binuang
180	Crusher/Mixer	1	√			Gedung Pusat Daur Ulang UPTD TPA Amola Binuang
181	Belt Conveyor (Feeder)	1	√			LKW MATAPPA Sidodadi Kec. Wonomulyo
182	Belt Conveyor (Feeder)	1	√			LKW MATAPPA Sidodadi Kec. Wonomulyo
183	Screw Conveyor (Feeder)	1	√			LKW MATAPPA Sidodadi Kec. Wonomulyo
184	Lori Dorong	10	√			LKW MATAPPA Sidodadi Kec. Wonomulyo. TPS3R Gernas dan Gedung UPTD TPA
185	Mesin Press Hidrolik & Punch	1	√			LKW MATAPPA Sidodadi Kec. Wonomulyo
186	Papan Pengumuman	3	√			Gedung Pusat Daur Ulang UPTD TPA Amola Binuang
187	Timbangan Bbi Kapasitas 10 Kg	1	√			Gedung Pusat Daur Ulang UPTD TPA Amola Binuang
188	Crusher/Mixer	1	√			Bangunan Rumah Kompos
189	Mesin Pengayak	1	√			Bangunan Rumah Kompos
190	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	1	√			Bangunan Rumah Kompos
191	Gerobak Dorong	3		√		Bangunan Rumah Kompos
192	Papan Pengumuman	3	√			Bangunan Rumah Kompos
193	Timbangan Bbi Kapasitas 10 Kg	1			√	Bangunan Rumah Kompos
194	alat timbangan/biara lainnya (dst)	1	√			Bank Sampah Induk DLHK
195	Alat Prosesing lainnya	1	√			Bank Sampah Induk DLHK
196	Papan Nama Instansi	1	√			Bank Sampah Induk DLHK
197	Kamera Udara	1	√			Drone digunakan Kadis DLHK
198	Lap Top	1	√			digunakan oleh An. M. ILYAS GANI, S.AP
199	Lap Top	1	√			Digunakan Oleh An. NURNAYANTI, S.IP
200	Lap Top	1	√			digunakan oleh Pembantu Pengelola Keuangan (PTT) An. Hikmah Hassani
201	LCD Projector/Infocus	1	√			di Laci Pak PUTRA
202	Kursi Besi/Metal	1	√			Sekretaris Dinas
203	Meja Tamu Biasa	1	√			MEJA TAMU diruangan Loket/ Piket DLHK
204	Meja Kerja Kayu	1	√			Umum dan Kepegawaian
205	Meja Kerja Kayu	1	√			Meja Kerja Kayu diruangan Umum dan Kepegawaian
206	Kursi Rapat	20	√			diruangan Masing Masing Bidang dan Sekretariat
207	Mesin Pompa air PMK	1	√			MESIN ALCON digunakan di UPTD TPA
208	Kursi Kerja Pejabat lainnya	1	√			Sekretaris Dinas
209	Bracket Standing Peralatan	1	√			di ruangan rapat Sekretariat
210	TV Monitor	1	√			di ruangan rapat Sekretariat
211	Air Conditioning (AC)	1	√			digunakan diruangan Bidang Pengelolaan Limbah Pencemaran dan Pengendalian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024

No.	Peralatan/ Perlengkapan	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
212	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	1	√			Bank Sampah Induk DLHK
213	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	√			Printer digunakan diruangan Perencanaan.
214	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	√			Printer digunakan diruangan Perencanaan
215	Mesin Cetak	1	√			Mesin Cetak Paving Hidrolik (Mesin Pengolahan Sampah) di Gedung UPTD TPA
216	Mesin Cetak	1	√			Mesin Cetak Paving Manual (Mesin Pengolahan Sampah) di Gedung UPTD TPA
217	Mesin Cetak	1	√			Mesin Gibrak (Mesin Pengolahan Sampah) di Gedung UPTD TPA
218	Mesin Cetak	1	√			Hot Extruder (Mesin Pengolahan Sampah) di Gedung UPTD TPA
219	Mesin Cetak	1	√			Mesin Sentris (Mesin Pengolahan Sampah) di Gedung UPTD TPA
220	Alat Laboratorium lainnya	1	√			Data Logger/Monitor Display (Sistem Kontrol untuk merekam data sensor, Memory 32 GB) ditambah Pajak PPN 11%, Pengadaan Sistem Pemantauan Kualitas Air Secara Online dan Otomatis Lokasi di Bendungan Air Pulele Kel. Darma Kec. Polewali Kab.Polewali Mandar.
221	Alat Laboratorium lainnya	1	√			Multiparameter Transmitter (12" Color LCD Touch Screen,Memory 32 GB) ditambah Pajak PPN 11 % Pengadaan Sistem Pemantauan Kualitas Air Secara Online dan Otomatis Lokasi di Bendungan air Pulele Kel. Darma Kec. Polewali Kab.Polewali Mandar.
222	Alat Laboratorium lainnya	1	√			Multiparameter Sensor (BOD/COD/Nitrat/Nitrit) ditambah Pajak PPN 11 % Pengadaan Sistem Pemantauan Kualitas Air Secara Onlino dan Otomatis, Lokasi Bendungan Air Pulele Kel.Darma Kec.Polewali Kab.Polewali Mandar.
223	Alat Laboratorium lainnya	1	√			Sensor Ph/ORP/Temperatur ditambah Pajak PPN 11% Pengadaan Sistem Pemantauan Kualitas Air Secara Online dan Otomatis, Lokasi di Bendungan Air Pulele Kel.Darma Kec.Polewali Kab.Polewali Mandar.
224	Alat Laboratorium lainnya	1	√			Sensor DO/RDO ditambah Pajak PPN 11% Pengadaan Sistem Pemantauan Kualitas Air Secara Online dan Otomatis, Lokasi Bendungan Air Pulele Kel. Darma Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar.
225	Alat Laboratorium lainnya	1	√			Sensor TSS dan TURBIDITY ditambah Pajak PPN 11% Pengadaan Sistim Pemantauan Kualitas Air Secara Online dan Otomatis, Lokasi Bendungan Air Pulele Kel. Darma Kec. Polewali Kab.Polewali Mandar.
226	Alat Laboratorium lainnya	1	√			Sensor Conductivity/TDS ditambah Pajak PPN 11% Pengadaan Sistem Pemantauan Kulitas Air Secata Online dan Otomatis, Lokasi Bendungan Air Pulele Kel.Darma Kec.Polewali kab.Polewali Mandar.
227	Alat Laboratorium lainnya	1	√			Sensor Amonium (NH3N) ditambah Pajak PPN 11% Pengadaan Sistem Pemantauan Kulitas Air Secara Online dan Otomatis, Lokasi Bendungan Air Pulele Kel. Darma Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar.
228	Alat Laboratorium lainnya	1	√			DEPTH (Pressure/Kedalaman/Tinggi Muka Air) ditambah Pajak PPN 11%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024

No.	Peralatan/ Perlengkapan	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
						Pengadaan Sistem Pemantauan Kualitas Air Secara Online dan Otomatis, Lokasi Bendungan Air Pulele Kel.Darma Kec.Polewali Kab.Polewali Mandar.
229	Alat Laboratorium lainnya	1	√			System Pengambilan Sampling dengan Pompa Otomatis, ditambah Pajak PPN 11% Pengadaan Sistem Pemantauan Kualitas Air Secara Online dan Otomatis, Lokasi Bendungan Air Pulele Kel. Darma Kec.Polewali Kab.Polewali Mandar.
230	Alat Laboratorium lainnya	1	√			Sistem Panel Surya (Solar Inverter, Baterai/Aki Kering: 12V 100Ah, Solar Cell Panel: Minimal 50 WP) ditambah Pajak PPN 11% Pengadaan Sistem Pemantauan Kualitas Air Secara Online dan Otomatis, Lokasi Bendungan Air Pulele Kel.Darma Kec.Polewali Kab.Polewali
231	TV Monitor	1	√			Smart TV LED 50 Inch (Work Station) ditambah Pajak PPN 11% Pengadaan Sistem Pemantauan Kualitas Air Secara Online dan Otomatis, digunakan Untuk memantau Kualitas Air di Bidang Pengelolaan Limbah Pencemaran dan Pengendalian.
232	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	√			PRINTER (Work Station) ditambah Pajak PPN 11% Pengadaan Sistem Pemantauan Kualitas air Secara Online dan Otomatis, digunakan Print data hasil pemantauan Kualitas Air diruangan Bidang Pengelolaan Limbah Pencemaran dan Pengendalian.
233	Personal Computer	1	√			Personal Computer PC (Work Station) ditambah Pajak PPN 11% Pengadaan Sistem Pemantauan Kualitas air Secara Online dan Otomatis, digunakan diruangan Bidang Pengelolaan Limbah Pencemaran dan Pengendalian.
234	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	√			digunakan oleh An. BOHARI
235	AC (Air Conditioning)	1	√			Sekretaris Dinas
236	Kendaraan Beroda Tiga Pengangkut Sampah	1	√			digunakan oleh operator Sampah An. RAJAUDDIN SAMAD
237	Kursi Rapat	10	√			Aula DLHK
238	Meja Kerja	5	√			Masing-Masing Bidang dan Sekretariat
239	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	√			Masing-Masing Bidang dan Sekretariat
240	Leptop	1	√			digunakan oleh sekretaris Dinas
241	Tablet iPad	1	√			digunakan Oleh Kepala Dinas DLHK
242	Rak Peralatan Maggot	8	√			digunakan oleh Ketua Kelompok Cerdas Tani Mandiri, Ketua Maggot BSE Batulayya dan Sopir Satgas.
243	Alat Pengelolaan Lainnya	1	√			LKW MATAPPA/ Mesin Pemilah Sampah Organik dan Non Organik
244	Kontainer	2	√			Kebersihan
245	Incenerator	1	√			LKW MATAPPA
246	Incenerator	2	√			DLHK
247	Timbangan Barang	2	√			DLHK
248	Mesin Pemotong Rumput Dorong	1	√			Pertamanan
249	Mesin Pemotong Rumput Gendong	2	√			Pertamanan dan Kebersihan
250	Alat Pengelolaan Lainnya	1	√			LKW MATAPPA/Mesin Centris Pengering Cacahan Plastik
251	Alat Pengelolaan Lainnya	1	√			LKW MATAPPA/ Mesin Pemilah Sampah
252	Belt Conveyor (Feeder)	1	√			TPS3R Gernas/ Conveyour Belt Feeder

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2024

c. Kondisi Keuangan

Dalam menjalankan fungsi organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di alokasikan anggaran sebesar Rp. 15.974.807.149 dan terealisasi sebesar Rp. 14.615.157.869 yang di rincikan pada tabel berikut:

Tabel 1.6 Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024

URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET		REALISASI		% Rp.
		K	Rp.	K	Rp.	
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	100 Persen 100 Persen 85 Persen	3.810.068.467	100 Persen 100 Persen 85 Persen	3.687.775.783	96,79
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100%	43.078.310	1	38.932.075	90,38
1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	12.116.136	2	12.116.136	100,00
1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	9.556.545	1	8.407.310	87,97
1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	5.595.510	1	3.797.310	67,86
1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.927.735	1	3.927.735	100,00
1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.225.494	1	3.225.494	100,00
1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1.875.900	1	677.100	36,09
1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	6.780.990	4	6.780.990	100,00
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	1	3.043.213.971	99,85%	3.035.408.850	99,74
2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan	630	3.021.240.966	630	3.015.533.745	99,81
2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	12	13.894.980	12	13.395.480	96,41
2.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan	1	1.577.310	1	1.577.310	100,00
2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	2.921.520	1	1.323.120	45,29
2.5 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Laporan	1	1.099.455	1	1.099.455	100,00
2.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	2	2.479.740	2	2.479.740	100,00
2.7 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	1	0	0	0	0,00
3. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persen	100%	1.275.000	100%	0	1,00
3.1 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	12	1.275.000	12	0	1,00
4. Administrasi Kepegawaian	1 Laporan	100%	0	0	0	0,00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024

URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET		REALISASI		% Rp.
		K	Rp.	K	Rp.	
Perangkat Daerah						
4.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	5	0	0	0	0,00
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100%	206.298.226	100%	190.331.476	92,26
5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	4	3.445.440	4	3.445.440	100,00
5.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	2	3.870.792	2	2.622.042	67,74
5.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	12	25.110.000	12	10.992.000	43,78
5.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	2	4.783.601	2	4.783.601	100,00
5.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	2	4.680.000	2	4.080.000	87,18
5.6 Penyediaan Bahan/Material	Paket	2	12.738.915	2	12.738.915	100,00
5.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Paket	39	151.669.478	39	151.669.478	100,00
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%	37.674.510	100%	37.674.510	100,00
6.1 Pengadaan Mebel	Unit	15	14.785.200	15	14.785.200	100,00
6.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	4	22.889.310	4	22.889.310	100,00
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%	429.440.950	96%	354.859.422	82,63
7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	4.721.500	1	4.721.500	100,00
7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	291.519.450	12	228.887.922	78,52
7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	133.200.000	11	121.250.000	91,03
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%	49.087.500	31,15%	30.569.450	62,28
8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	47	40.707.000	6	26.194.250	64,35
8.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	13	8.380.500	13	4.375.200	52,21
8.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1	0	0	0	
II. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSEN (%)	100	286.313.955	100	220.789.170	77,11
1. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	DOKUMEN	2	286.313.955	2	220.789.170	77,11
1.1 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	DOKUMEN	2	286.313.955	2	220.789.170	77,11
III. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Tingkat Cemar	Ringan	330.023.463	Ringan	218.717.443	66,27
1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dokumen	4	330.023.463	4	218.717.443	66,27
1.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	Dokumen	1	150.003.070	1	87.818.958	58,54

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024

URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET		REALISASI		% Rp.
		K	Rp.	K	Rp.	
Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						
1.2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dokumen	3	180.020.393	3	130.898.485	72,71
IV. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persen	1	50.020.480	1	43.212.840	86,39
1. Penyimpanan sementara Limbah B3	Persen	1	50.020.480	1	43.212.840	86,39
1.1 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Laporan	1	50.020.480	1	43.212.840	86,39
V PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persen	1	11.498.380.784	1	10.444.662.633	90,84
1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	1	11.498.380.784	1	10.444.662.633	90,84
1. 1 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Dokumen	2	11.381.917.856	2	10.334.219.894	90,80
1.2 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga	50	116.462.928	50	110.442.739	94,83
Jumlah			15.974.807.149		14.615.157.869	91,49

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2024

2. Sistematika LAKIP

Dalam penyusunan LAKIP mengacu pada Peraturan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja

C. Isu Strategis Organisasi

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya seperti melihat dari Isu Strategis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di bawah ini hasil identifikasi beberapa permasalahan-permasalahan pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Polewali Mandar, antara lain adalah :

- a. Belum optimalnya pengelolaan sampah secara 3R oleh masyarakat.
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah sehingga banyak yang membuang sampah ke sungai dan disembarang tempat sehingga berdampak pada pencemaran air di sungai dan lingkungan secara keseluruhan.
- c. Pengangkutan sampah belum menjangkau seluruh wilayah perkotaan.
- d. Belum optimalnya pelayanan pengumpulan sampah dari sumbernya.
- e. Belum optimalnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. VISI MISI

Dalam perencanaan kinerja organisasi selalu berpedoman pada Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024.

1. Visi

Visi adalah merupakan cara pandang jauh kedepan tentang keamanan Dinas ini akan diarahkan dan apa yang dicapai, sejalan visi dan arah pembangunan Kabupaten Polewali Mandar jangka panjang, pendek serta memperhatikan peran dan potensi yang ada maka ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019– 2024 berdasarkan Naskah Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Polewali Mandar yakni : " POLEWALI MANDAR MAJU , RAKYAT SEJAHTERA " Selanjutnya Visi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Visi, Pokok pokok visi dan Penjelasan Visi

VISI	POKOK- POKOK VISI	PENJELASAN VISI
Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahtera	Polewali Mandar MAJU	Kondisi daerah yang menggambarkan tentang keadaan yang lebih baik dari masa sebelumnya maupun jika dibandingkan dengan daerah lain
		terutama pada aspek kemandirian ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan
	Rakyat SEJAHTERA	Kondisi Masyarakat yang memiliki taraf hidup yang lebih baik dan sumberdaya manusia yang berkualitas

2. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Polewali Mandar di atas, maka ditetapkan empat misi pembangunan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, sebagai berikut:

- Mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas dan religius.
- Memperkuat kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan wilayah.
- Mengembangkan infrastruktur berkualitas yang terintegrasi serta berwawasan lingkungan.
- Memantapkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan modern.

Tabel 2.2 Misi dan Pokok Visi

No.	Misi	Poko Visi
1.	Mewujudkan taraf hidup masyarakat Yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas dan religious	Rakyat Sejahtera
2.	Memperkuat kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan wilayah	Polewali Mandar Maju
3.	Mengembangkan infrastruktur berkualitas yang terintegrasi serta	Polewali Mandar Maju

No.	Misi	Poko Visi
	berwawasan lingkungan	
4.	Memantapkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan modern	Polewali Mandar Maju

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar , maka misi yang terkait adalah Misi Ketiga yaitu :“ Mengembangkan Infrastruktur berkualitas yang terintegrasi serta berwawasan Lingkungan” Tujuan dari misi ketiga adalah :

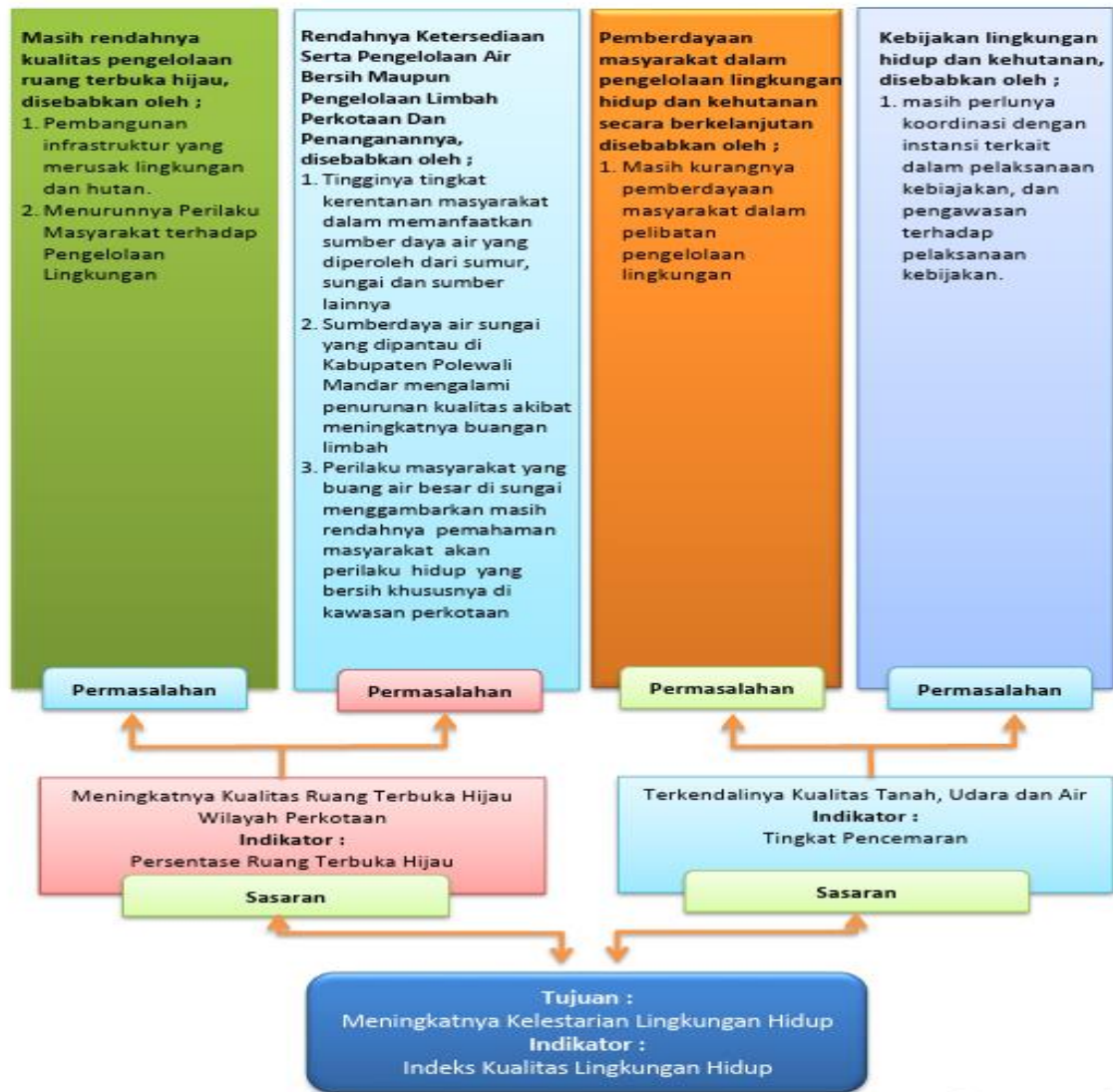
- Mengembangkan / Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan Lingkungan. Adapun sasaran dari misi kedua adalah :
 - Mengembangkan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas;
 - Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup yang berkelanjutan.

Dari penjelasan di atas unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam suatu perencanaan strategis adalah pernyataan visi dan misi, penjabaran tujuan dan sasaran strategis serta perumusan strategi pencapaian tujuan/ sasaran berupa program dan kegiatan.

B. RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024. Renstra dimaksud berkedudukan sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari RPJMD di tingkat Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan serta pendanaan indikatif dan dilengkapi dengan tolok ukur pencapaiannya yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Gambar 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Tahun 2020-2024



Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan, sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Berpedoman pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 serta memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta faktor penghambat dan pendorong, maka Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019-2024, dirumuskan seperti pada gambar 2.1.

Untuk mengetahui dan mengukur capaian Tujuan dan Sasaran Strategis dimaksud, maka perlu menentukan indikator kinerja Tujuan dan Sasaran. Penentuan indikator kinerja tersebut menggunakan kriteria **SMART-C** yaitu : *specific* (jelas), *measureable* (dapat diukur), *agreeable* (dapat disetujui), *realistic* (dapat dicapai), *time bounded* (memiliki batas waktu pencapaian) dan *continuously improved* (perbaikan berkelanjutan). Indikator kinerja tujuan dan sasaran merupakan indikator di level *outcome* (hasil). Indikator Sasaran Strategis

dimaksud selanjutnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Di samping IKU dimaksud, disusun pula indikator sasaran strategis penunjang pencapaian IKU.

Dengan mengamati kondisi saat ini dan mempertimbangkan potensi sumber daya yang dimiliki serta peluang dan kekuatan yang ada, maka ditetapkan pencapaian target pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Organisasi melalui Forum Rapat Bersama, dengan penentuan target sebagai berikut :

Tabel. 2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019-2024

No	Tujuan	Sasaran	zIndikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke-					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,55%	69,22 %	70,63%	71,67%	72,71%	73,75 %
			Persentase timbulan sampah yang terkelola	91,09%	94%	97,03%	98,14%	99,04%	100%
			Persentase pengurangan sampah	18%	20%	22%	24%	26%	29%
			Persentase Penanganan persampahan	73,09%	74%	75,03%	74,14%	73,04%	73,04 %
		Terkendalinya kualitas tanah, udara dan air	Tingkat Pencemaran	Ringan	Ringan	Ringan	Ringan	Ringan	Ringan
		Meningkatnya Kualitas RTH Wilayah Perkotaan	Persentase Ruang Terbuka Hijau	7,50%	10,50 %	13,50%	16,70%	20%	25%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
			Predikat SAKIP Perangkat Daerah	B	BB	BB	A	A	A
			Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (Reward) dan Sanksi (Punishment).

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2024 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada, dan merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023, sebagai berikut :

<p>Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Kebersihan Lingkungan Perkotaan Indikator : Persentase timbulansampah yang terkelola Target : 56,00</p>
<p>Sasaran Strategis 2 : Terkendalinya pencemaran lingkungan Indikator : Tingkat Pencemaran Target : Ringan</p>
<p>Sasaran Strategis 3 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah: Indikator : Predikat SAKIP Perangkat Daerah Target : A Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah Target: 100 % Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah Target: Sangat Baik</p>

Untuk mencapai sasaran tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 mengagendakan sejumlah Program dengan alokasi anggaran masing-masing sebagai berikut :

Tabel 2.4 Program dan Alokasi Anggaran Tahun 2024

Program	Anggaran (Rp)
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	286.313.955
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	330.023.463
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	50.020.480
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	11.498.380.784
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.810.068.467
Total	15.974.807.149

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

A. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024

Pengukuran pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan rencana target kinerja dengan realisasi, kemudian membandingkan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, dan membandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022-2024. Pada bagian ini diungkapkan pula analisis keberhasilan atau kegagalan pencapaian target, kendala yang dihadapi, analisis efisiensi sumber daya yang dilakukan serta program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.

Sasaran Strategis 1 :

Meningkatnya kualitas keberhasilan lingkungan perkotaan

Indikator : Persentase timbulan sampah yang terkelola

Target : 56 %

Masalah persampahan di Kabupaten Polewali Mandar adalah masalah yang kompleks khususnya di tempat-tempat yang memiliki aktivitas perekonomian yang tinggi seperti pasar, sarana-prasarana ibadah, tempat wisata, perkantoran, pertokoan, dan perumahan karena timbulan sampah tidak berbanding lurus dengan penanganan sampah.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali terus berupaya melakukan pengurangan jumlah timbulan sampah dengan kegiatan Zero Waste. Kegiatannya berupa apel sadar sampah, surat edaran terkait pengurangan sampah, program “mengubah sampah menjadi emas” bekerjasama dengan pegadaian, aksi jumat bersih, aksi bersih pantai dan sungai, sedekah sampah bekerja sama dengan BAZNAS Polman, industri pengolahan sampah LKW Matappa, Pengoperasian kembali BANK sampah dan TPS3R, edukasi dan kerja sama dengan perguruan Tinggi, Sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah tingkat pasar, perumahan, kantor, lingkungan.

Volume timbulan sampah setiap harinya \pm 198,15 ton, pada tahun 2024 jumlah pengurangan sampah dan jumlah penanganan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar sebesar 9.915,77 ton/tahun atau 13,71% dan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 8.882.724.852.

Kepercayaan publik terhadap pengelolaan persampahan yang pada akhirnya akan menumbuhkan partisipasi publik dan berdampak pula pada perilaku hidup sehat di daerah.

Proporsi sampah yang tertangani

Penanganan sampah di wilayah Kabupaten Polewali Mandar sudah menunjukkan kemajuan dari tahun sebelumnya sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2023 target proporsi sampah yang tertangani sebesar 99,04% sedangkan realisasinya sebesar 12,68% tapi pada tahun 2025 mencapai 13,71%.

Tertutupnya Tempat Pemrosesan Akhir sampah yang mengakibatkan tidak terkelolanya dengan baik sampah dan mengakibatkan jumlah sampah yang tertangani masih belum memiliki kenaikan yang signifikan. Penanganan sampah juga tidak lepas dari peran aktif dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan yang semakin meningkat dan juga sarana/ prasarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar setiap tahunnya mengalami peningkatan.

♻ Persentase layanan sampah yang terangkut ke TPS

Kabupaten Polewali Mandar memiliki Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang berlokasi di Kecamatan Balianipa. ditahun 2024 target presentase layanan sampah yang terangkut ke TPS adalah sebesar 40.501,53 ton dengan tingkat capaian Realisasi sebesar 9.915,64 ton atau 13,71 %. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan target pengelolaan sampah tidak tercapai, di antaranya:

1. Keterbatasan anggaran pengelolaan sampah yang baik membutuhkan biaya yang cukup besar. Namun, seringkali anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan sampah tidak mencukupi. Akibatnya, fasilitas pengelolaan sampah tidak dapat dioperasikan secara optimal, atau bahkan tidak dapat dibangun sama sekali.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya menjadi faktor penting dalam pengelolaan sampah. Namun, seringkali masih banyak masyarakat yang tidak membuang sampah pada tempatnya atau membuang sampah sembarangan. Hal ini membuat pengelolaan sampah menjadi semakin sulit dan target pengelolaan sampah sulit untuk tercapai.
3. Kurangnya infrastruktur dan teknologi infrastruktur dan teknologi yang memadai sangat penting untuk mencapai target pengelolaan sampah. Namun, masih banyak daerah yang belum memiliki infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai. Selain itu, teknologi pengelolaan sampah yang lebih modern dan efektif juga masih kurang diterapkan.
4. Kurangnya koordinasi antara pemerintah dan pihak swasta pengelolaan sampah yang baik membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta. Namun, seringkali kurangnya koordinasi antara kedua belah pihak membuat pengelolaan sampah menjadi kurang efektif. Hal ini menyebabkan target pengelolaan sampah sulit untuk tercapai.
5. Tingginya volume sampah volume sampah yang semakin meningkat juga menjadi tantangan dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang sudah ada tidak mampu menampung volume sampah yang semakin meningkat. Akibatnya, sampah akhirnya dibuang sembarangan dan target pengelolaan sampah sulit untuk tercapai.

Mengatasi faktor-faktor di atas membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mengalokasikan anggaran yang memadai, meningkatkan infrastruktur dan teknologi, serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah dan pihak swasta.

Cakupan Kecamatan yang mendapatkan Layanan Persampahan

Kabupaten Polewali Mandar adalah sebuah kabupaten yang memiliki wilayah kecamatan sejumlah 16 (enam belas) yang wilayahnya terletak pada wilayah pesisir dan wilayah pegunungan. Layanan persampahan hanya terkonsentrasi pada wilayah kecamatan yang jumlah penduduknya di atas rata-rata jumlah penduduk kecamatan lainnya. pada tahun 2024 Jumlah kecamatan yang mendapat layanan persampahan sebanyak 3 (tiga) wilayah kecamatan dari jumlah 16 (enam belas) Wilayah kecamatan atau jika dipresentasikan hanya sebesar 30,07 %.

Tabel 3.1 Jumlah Kecamatan dengan Layanan Persampahan

No.	Nama Kecamatan	Terlayani	Tidak Terlayani
1	Binuang		✓
2	Polewali	✓	-
3	Anreapi	-	✓
4	Matakali	✓	-
5	Wonomulyo	✓	
6	Tapango	-	✓
7	Mapilli	-	✓
8	Balanipa	-	✓
9	Limboro	-	✓
10	Campalagian	-	✓
11	Tinambung	-	✓
12	Alu	-	✓
13	Bulo	-	✓
14	Matangnga	-	✓
15	Luyo	-	✓
16	Tutar	-	✓

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2024

Proporsi Pelanggan Sampah yang terlayani

Sesuai dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dimana pada intinya mengatur tentang pelayanan persampahan dan besaran retribusi layanan persampahan. Pada tahun 2024 jumlah pelanggan sampah yang terlayani masih sama dengan pelanggan tahun 2023 sebesar 2.808 yang artinya proporsi jumlah pelanggan sampah tidak mengalami perubahan jumlah kuantitas hal ini disebabkan oleh makin banyak kelompok masyarakat yang mengolah sampah yang dihasilkan baik sampah yang bersifat organik dan anorganik yang dihasilkan dan juga makin banyaknya keberadaan Bank Sampah yang ada dikelompok masyarakat.

Tabe 3.2. Timbulan Sampah Yang Terkelola Tahun 2023-2024

No.	Uraian	20224 (Ton/Tahun)	2023 (Ton/Tahun)
1.	Timbulan Sampah	16.191,42	9.915,77 ton

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2024

Tabel 3.3 Penanganan Persampahan Tahun 2023-2024

No.	Uraian	2023 (Ton/Tahun)	2024 (Ton/Tahun)
1.	Penanganan Sampah	591,30	591,30

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2024

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor Penunjang :

Ada banyak faktor yang dapat menjadi penunjang pengelolaan persampahan yang efektif dan berkelanjutan. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengelolaan persampahan:

1. Kebijakan dan regulasi : Kebijakan dan regulasi yang baik akan membantu menciptakan kondisi yang mendukung pengelolaan persampahan yang efektif. Hal ini dapat termasuk dalam hal perencanaan dan penataan tata ruang, perizinan kegiatan usaha, peraturan tentang pengelolaan limbah, dan hukuman bagi pelanggar.
2. Kesadaran masyarakat : Masyarakat yang sadar tentang pentingnya pengelolaan persampahan yang baik dapat membantu mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, memisahkan sampah di rumah, dan membuang sampah pada tempatnya. Hal ini juga dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah yang ada.
3. Infrastruktur : Infrastruktur yang memadai seperti tempat pembuangan akhir (TPA), tempat pengolahan sampah (TPS), fasilitas pengolahan limbah, dan kendaraan pengangkut sampah yang memadai dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sampah.
4. Teknologi : Penggunaan teknologi yang tepat dalam pengelolaan sampah, seperti teknologi pengolahan limbah, sensor untuk pemantauan kualitas udara, dan aplikasi digital untuk pelaporan dan pelacakan sampah, dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sampah.
5. Keuangan : Dukungan keuangan yang memadai dari pemerintah, perusahaan swasta, dan masyarakat umum dapat membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Hal ini dapat termasuk dalam hal pemberian subsidi untuk pengolahan sampah yang ramah lingkungan, pengadaan alat dan infrastruktur, dan program pelatihan.
6. Ketersediaan sumber daya manusia : Pengelolaan sampah yang efektif membutuhkan ketersediaan sumber daya manusia yang cukup dan terlatih. Ini meliputi petugas pengangkut sampah, petugas di fasilitas pengolahan sampah, dan staf yang terlibat dalam program pengelolaan sampah.

Semua faktor di atas saling terkait dan dapat berkontribusi pada keberhasilan pengelolaan persampahan yang efektif dan berkelanjutan.

Faktor Penghambat :

Terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat pengelolaan persampahan yang efektif dan berkelanjutan, antara lain:

1. Kebijakan yang lemah : Kebijakan yang lemah atau tidak memadai dapat menghambat pengelolaan persampahan yang efektif. Hal ini dapat termasuk dalam hal tidak adanya kebijakan tentang tata kelola sampah, perizinan kegiatan usaha yang tidak diatur, atau peraturan tentang pengolahan limbah yang kurang jelas.
2. Kesadaran masyarakat yang rendah : Masyarakat yang tidak sadar akan pentingnya pengelolaan persampahan yang baik dapat menghasilkan jumlah sampah yang tinggi dan membuang sampah pada tempat yang salah. Hal ini dapat menghambat program pengelolaan sampah yang ada.
3. Infrastruktur yang kurang memadai : Infrastruktur yang kurang memadai seperti tempat pembuangan akhir (TPA), tempat pengolahan sampah (TPS), fasilitas pengolahan limbah, dan kendaraan pengangkut sampah yang tidak memadai dapat menghambat pengelolaan sampah. Hal ini dapat mengakibatkan penumpukan sampah dan masalah kesehatan lingkungan.
4. Teknologi yang kurang memadai : Penggunaan teknologi yang kurang memadai dalam pengelolaan sampah dapat menghambat pengelolaan sampah. Hal ini dapat termasuk dalam hal penggunaan teknologi pengolahan limbah yang tidak ramah lingkungan, kurangnya alat dan infrastruktur, dan kurangnya aplikasi digital untuk pelaporan dan pelacakan sampah.
5. Keterbatasan keuangan : Keterbatasan keuangan dari pemerintah, perusahaanswasta, dan masyarakat umum dapat menghambat pengelolaan sampah. Hal ini dapat mengakibatkan terbatasnya dukungan keuangan untuk pengolahan sampah yang ramah lingkungan, pengadaan alat dan infrastruktur, dan program pelatihan.
6. Kurangnya sumber daya manusia : Pengelolaan sampah yang efektif membutuhkan ketersediaan sumber daya manusia yang cukup dan terlatih. Kurangnya sumber daya manusia dapat menghambat pengelolaan sampah yang efektif, seperti kurangnya petugas pengangkut sampah, petugas di fasilitas pengolahan sampah, dan staf yang terlibat dalam program pengelolaan sampah.

Semua faktor di atas dapat menjadi penghambat pengelolaan persampahan yang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan yang tepat untuk mengatasi setiap faktor penghambat tersebut agar pengelolaan persampahan dapat berjalan dengan baik.

Alternatif Solusi yang telah diupayakan :

Beberapa solusi dalam pengelolaan persampahan yang dapat dilakukan antara lain:

1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat : Menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan melalui sosialisasi, edukasi, dan kampanye untuk membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi sampah plastik.
2. Pengelolaan Sampah Berbasis 3R Menerapkan prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle dalam pengelolaan sampah sehingga dapat mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA.

3. Pengolahan Sampah Terpadu : Mengintegrasikan seluruh tahapan pengelolaan sampah dari pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, hingga pengolahan dengan teknologi yang ramah lingkungan untuk menghasilkan produk yang bernilai ekonomi.
4. Peningkatan Infrastruktur : Meningkatkan infrastruktur seperti pembangunan TPA dan TPS, fasilitas pengolahan limbah, dan kendaraan pengangkut sampah yang memadai.
5. Peningkatan Kelembagaan : Memperkuat kelembagaan dan peran pemerintah dalam pengelolaan sampah melalui pengembangan kebijakan, penegakan hukum, dan koordinasi antara instansi terkait.
6. Inovasi Teknologi: Menerapkan teknologi yang terbaru dan ramah lingkungan dalam pengolahan sampah seperti teknologi daur ulang, pengomposan, pengolahan air limbah, dan pemanfaatan energi dari sampah.
7. Pengembangan Ekonomi Berbasis Sampah : Membangun sistem ekonomi yang berbasis sampah dengan memanfaatkan produk sampingan dari pengolahan sampah seperti kompos dan energi dari sampah.
8. Kemitraan antara Pemerintah dan Swasta : Mengembangkan kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam pengelolaan sampah untuk mempercepat peningkatan infrastruktur, teknologi, dan pelayanan pengelolaan sampah.

Semua solusi tersebut dapat diimplementasikan secara bersama-sama untuk mencapai pengelolaan persampahan yang efektif dan berkelanjutan

Adapun sejumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran persentase timbulan sampah yang terkelola, persentase pengurangan sampah dan persentase penanganan persampahan, sebagai berikut :

Tabel 3.4 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	11.381.917.856	10.334.219.89	90,80
1	Pengelolaan Sampah	11.381.917.856	10.334.219.89	90,80

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2024

Sasaran Strategis 2 :**Terkendalinya Kualitas Tanah, Udara dan Air****Indikator : Tingkat Pencemaran****Target : Ringan****Cakupan Wilayah yang diukur Kualitas Tanah, Udara dan Air**

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur Baku Mutu Air dan Baku Mutu Udara. Perhitungan indeks pencemaran air didasarkan pada titik pengambilan, sampel dan parameter yang telah ditentukan yaitu parameter fisika, parameter kimia dan parameter biologi. Indeks Kualitas Udara dihitung mengacu pada metode Common Air Quality Index (CAQI), penghitungan indeks kualitas udara menggunakan dua parameter yaitu NO₂ dan SO₂. Parameter NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO₂ mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. Dalam menjalankan Indikator ini Program yang dijalankan adalah Program Pengendalian Limbah dan Pencemaran Kegiatan Pengendalian Pencemaran.

Pada Kegiatan Pengendalian Pencemaran ini melaksanakan pengujian kualitas lingkungan yaitu pengujian kualitas air, kualitas udara dan kualitas tanah dengan menyusun Laporan Kualitas Lingkungan Sehingga diperoleh hasil laporan Kualitas Lingkungan yang dijadikan sebagai bahan Laporan DIKPLHD dan laporan non fisik adipura.

Hasil Analisa Kegiatan Pengujian Kualitas Air sebagai berikut :

 Kualitas Air Sungai

Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 4 sungai yaitu Sungai Alapahan/Riso, Sungai Kunyi, Sungai Lantora, dan Sungai Binuang. Keenam sungai ini merupakan sungai yang sekitarnya terdapat banyak aktifitas masyarakat Kabupaten Polewali Mandar. Kegiatan pemantauan meliputi pengambilan sampel, analisis di Laboratorium dan penentuan status mutu air. Untuk penentuan baku mutu air merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lampiran VI Baku Mutu Air Sungai Kelas II). Sedangkan penentuan status mutu air menggunakan metode indeks pencemaran berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Penetapan Status Mutu Air.

Dalam perhitungan indeks pencemaran didasarkan pada titik pengambilan sampel dan parameter yang telah ditentukan yaitu parameter fisika, parameter kimia, dan parameter biologi. Perhitungan status mutu air yang digunakan adalah berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Penetapan Status Mutu Air. Hasil perhitungan indeks pencemaran pada masing titik pengambilan sampel tersaji pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5 Status Mutu Air Sungai Kab. Polewali Mandar Tahun 2023-2024

No.	Titik Sampling/ Lokasi	2023		2024	
		Indeks Pencemaran	Status Mutu Air	Indeks Pencemaran	Status Mutu Air
1	Sungai Mandar Hulu	0.92	Memenuhi Baku Mutu	-	-
2	Sungai Mandar Tengah	1.02	Cemar Ringan	-	-
3	Sungai Mapilli Hulu	0.57	Memenuhi Baku Mutu	-	-
4	Sungai Mapilli Hilir	1.75	Cemar Ringan	-	-
5	Sungai Alapahan Hulu	0.43	Memenuhi Baku Mutu	1.5	Cemar Ringan
6	Sungai Alapahan Tengah	0.43	Memenuhi Baku Mutu	1.25	Cemar Ringan
7	Sungai Alapahan Hilir	0.57	Memenuhi Baku Mutu	1.13	Cemar Ringan
8	Sungai Kunyi Hulu	0.43	Memenuhi Baku Mutu	1.09	Cemar Ringan
9	Sungai Kunyi Tengah	0.67	Memenuhi Baku Mutu	2.4	Cemar Ringan
10	Sungai Kunyi Hilir	0.62	Memenuhi Baku Mutu	2.96	Cemar Ringan
11	Sungai Lantora Hulu	0.43	Memenuhi Baku Mutu	1.01	Cemar Ringan
12	Sungai Lantora Hilir	0.72	Memenuhi Baku Mutu	0.76	Memenuhi Baku Mutu
13	Sungai Binuang Tengah	-	-	1.82	Cemar Ringan
14	Sungai Binuang Hilir	0.53	Memenuhi Baku Mutu	1.93	Cemar Ringan

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2023

Keterangan :

- 0 – 1 = Memenuhi Baku Mutu
- 1 - 5 = Cemar Ringan
- 5 – 10 = Cemar Sedang
- >10 = Cemar Berat

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan di beberapa titik lokasi pemantauan tampak bahwa sungai yang dipantau telah memenuhi baku mutu sebagai air badan air kelas II dengan status terdapat hanya 1 (satu) titik pantau yang Memenuhi Baku Mutu dan 9 (sembilan) titik yang Cemar Ringan pada tahun 2024 dengan Parameter yang diukur mengacu pada parameter kunci yang telah disepakati yaitu **pH, TSS, BOD, COD, DO, NO3-N, Total Phosfat dan Fecal coliform**.

Sungai di Kabupaten Polewali Mandar secara umum dimanfaatkan oleh penduduk sebagai irigasi pertanian, peternakan, dan air baku. Di lain pihak sumber daya air juga dimanfaatkan sebagai badan air penerima limbah dari kegiatan industri, pertambangan ataupun kegiatan domestik yang berpotensi untuk menurunkan kualitas dari badan air tersebut. Pencemaran badan air dapat terjadi akibat

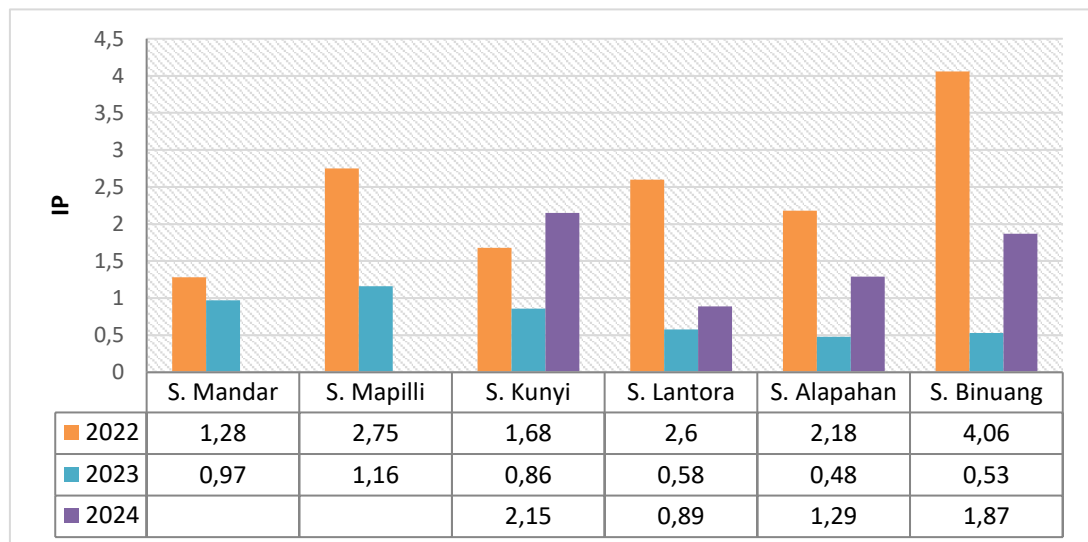
limbah industri, limbah rumah tangga/domestik maupun limbah pertanian. Berdasarkan sumbernya, pencemaran dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu pencemaran yang bersumber dari rumah tangga (domestik), limbah industri dari perusahaan, dan limbah pertanian/perkebunan. Berbagai macam sumber pencemar menunjukkan bahwa konsentrasi senyawa pencemar sangat bervariasi, hal ini disebabkan karena sumber air limbah juga bervariasi sehingga faktor waktu dan metode pengambilan sampling sangat mempengaruhi besarnya konsentrasi.

Tabel 3.6 Pemantauan Kualitas Air Sungai Di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021-2024

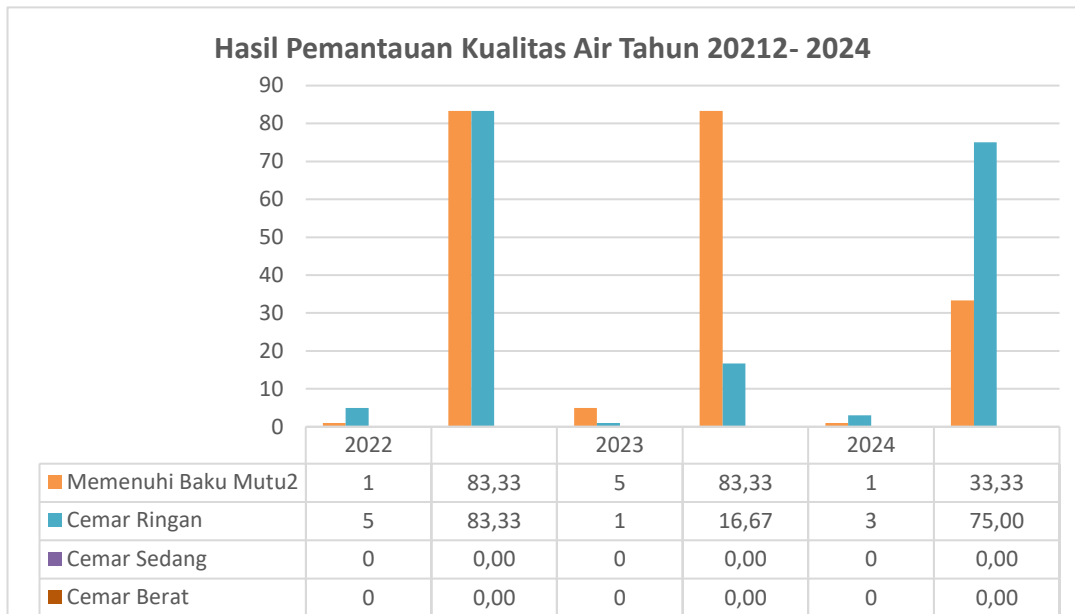
No.	Nama Sungai	Indeks Pencemaran		
		2022	2023	2024
1	Sungai Mandar	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	-
2	Sungai Kunyi	Cemar Ringan	Memenuhi Baku Mutu	Cemar Ringan
3	Sungai Mapilli	Cemar Ringan	Cemar Ringan	-
4	Sungai Alapahan	Cemar Ringan	Memenuhi Baku Mutu	Cemar Ringan
5	Sungai Lantora	Cemar Ringan	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu
6	Sungai Binuang	Cemar Ringan	Memenuhi Baku Mutu	Cemar Ringan

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2024

Grafik 3.1 Indeks Pencemaran Air Sungai Tahun 2022-2024



Grafik 3.2 Persentase Pemantauan Kualitas Air Sungai Tahun 2022-2024



Berdasarkan perbandingan hasil pemantauan terhadap kualitas air sungai di Kabupaten Polewali Mandar pada 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2022–2024, diperoleh bahwa kualitas air sungai mengalami peningkatan status mutu air sungai. Pada tahun 2022 hanya terdapat 1 (satu) sungai dengan status **Memenuhi Baku Mutu** dan pada tahun 2023 terdapat 5 (lima) sungai dengan status **Memenuhi Baku Mutu**. Pada tahun 2024 tidak dilakukan pemantau pada sungai mandar dan sungai mapilli, hasil pantau yang diperoleh hanya terdapat 1 (satu) sungai dengan status **Memenuhi Baku Mutu**.

Gambar 3.1 Dokumentasi Sampling Air Sungai



Pemantauan Air Laut

Pemantauan air laut dilakukan di 3 (tiga) titik yaitu air laut pantai Mampie, air laut pantai Bahari, dan air laut TPI (Tempat Pelelangan Ikan). Kegiatan pemantauan meliputi pengambilan sampel, pengukuran parameter fisik di lapangan dan analisis di Laboratorium. Untuk penentuan status mutu air menggunakan metode indeks pencemaran Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Penetapan Status Mutu Air. Hasil perhitungan indeks pencemaran pada masing titik pengambilan sampel tersaji pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7 Status Mutu Air Laut Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023-2024

Titik Sampling/Lokasi	2023	2024
	Mutu Air	Mutu Air
Pantai Mampie	Memenuhi Baku Mutu	-
Pantai Bahari	Memenuhi Baku Mutu	-
TPI Polewali	Memenuhi Baku Mutu	-

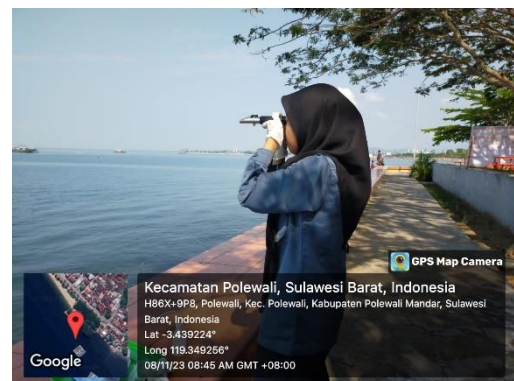
Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2024

Ket :

- = parameter tidak lengkap sehingga tidak dapat dilakukan perhitungan

Parameter untuk penentuan indeks kualitas air laut (IKAL) berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Penetapan Status Mutu Air Laut yaitu pH, DO, Nitrat (NO₃), Orto-fosfat, Sulfida dan Salinitas. Berdasarkan pengujian sampel di 3 titik lokasi pada tahun 2024 (Pantai Bahari, Pantai Mampie, Pantai TPI) di wilayah kabupaten Polewali mandar belum dapat dilakukan perhitungan indeks dikarenakan parameter yang diuji belum sesuai dengan parameter perhitungan. Namun, untuk beberapa parameter yang diujikan terdapat hasil yang melebihi baku mutu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VIII Baku Mutu Air Laut. Selain itu, perhitungan nilai Indeks Kualitas Air Laut dilaksanakan oleh instansi Provinsi.

Gambar 3.2 Dokumentasi Sampling Air Laut



Kualitas Air Limbah

Pemantauan kualitas air limbah pada tahun 2022 dilakukan di 17 titik, air limbah ini sangat berpotensi besar mencemari lingkungan. Kegiatan pemantauan ini meliputi pengambilan sampel, analisis laboratorium dan penentuan status mutu air. Pencemaran lingkungan dapat diukur dengan parameter kualitas limbah yaitu pH, TSS, Amoniak, BOD, COD dan Minyak Lemak. Hasil pengukuran air limbah pada masing titik pengambilan sampel tersaji pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.8 Status Mutu Air Limbah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023-2024

Titik Sampling/Lokasi	2023	2024
	Mutu Air	Mutu Air
<i>Inlet</i> TPA Amola-	Melampaui Baku Mutu	Melampaui Baku Mutu
<i>Outlet</i> TPA Amola-	Melampaui Baku Mutu	Melampaui Baku Mutu
Drainase Wono 1	Melampaui Baku Mutu	-
Drainase Wono 2	Melampaui Baku Mutu	-
Drainase Wono 3	Melampaui Baku Mutu	-
Air Limbah pasar matakali	Melampaui Baku Mutu	-

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2024

Pada tahun 2024 pengujian sampel air limbah hanya dilakukan pada 2 titik yakni *inlet* dan *outlet* TPA Amola didapatkan hasil pengujian yaitu **Melampaui Baku Mutu** yang diperbolehkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.

Kualitas Air Bersih

Kegiatan pemantauan kualitas air bersih meliputi pengambilan sampel, analisis laboratorium dan penentuan status mutu air. Status Mutu Air bersih dapat diukur dengan parameter kualitas air bersih yaitu parameter fisik meliputi pH, TDS sedangkan parameter kimia BOD, COD, DO, Fosfat dan logam – logam terlarut serta parameter mikrobiologi meliputi Fecal Coli dan total coli berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 02 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua dan Permandian Umum. Hasil pengukuran status air masing - masing titik pengambilan sampel tersaji pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.9 Status Mutu Air Bersih Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2023-2024**

No.	Titik Sampling/Lokasi	2023	2024
		Status Mutu Air	Status Mutu Air
1	Wai Sau Desa Palece	Tidak Melampaui Baku Mutu	-
2	Air Hujan Perkantoran, Pekkabata	Tidak Melampaui Baku Mutu	Tidak Melampaui Baku Mutu
3	Perumahan Dara (PDAM)	Tidak Melampaui Baku Mutu	Melampaui Baku Mutu
4	Perumahan Kompleks Pekkabata	Tidak Melampaui Baku Mutu	Melampaui Baku Mutu
5	Sumur Perkantoran Pekkabata	-	Melampaui Baku Mutu
6	Sumur Desa Paku	Tidak Melampaui Baku Mutu	Melampaui Baku Mutu
7	Sumur Bor Desa Laliko	-	Melampaui Baku Mutu
8	Sumur Bor RM. Bebek CS Om Sidik	-	Melampaui Baku Mutu
9	Sumur Bor Rumah Bpk. Andi Ali Baal Masdar (Matakali)	Tidak Memenuhi Syarat Bakteriologi	-
10	Sumur Bor Rumah Bpk. Amran Usman (Matakali)	Tidak Memenuhi Syarat Bakteriologi	-
11	Sumur Bor Rumah Ibu. Titi Umiati (Matakali)	Tidak Memenuhi Syarat Bakteriologi	-
12	Sumur Bor Rumah Ibu. Wahidah (Matakali)	Tidak Memenuhi Syarat Bakteriologi	-
13	Sumur Gali Pasar Matakali	Tidak Memenuhi Syarat Bakteriologi	-
14	Sumur Gali Rumah bp. Eli Matakali	Tidak Memenuhi Syarat Bakteriologi	-
15	Embung Telaga Hijau, Desa Tapango, Kec. Tapango	Tidak Melampaui Baku Mutu	Melampaui Baku Mutu
16	Embung Desa Kuajang, Kec. Binuang	Tidak Melampaui Baku Mutu	Melampaui Baku Mutu

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2024

Berdasarkan pengujian sampel air bersih pada tahun 2022 yang dilaksanakan pada 16 titik didapatkan hasil pengujian yaitu **Melampaui Baku Mutu** dan pada tahun 2023 dilaksanakan pengujian kualitas air bersih pada 9 titik di dapatkan hasil pengujian yaitu sebanyak 1 (satu) titik **Tidak Melampaui Baku Mutu** dan 8 (delapan) titik **Melampaui Baku Mutu**.

Kualitas Udara

Pemantauan kualitas udara ambient sesaat tahun 2024 dilakukan pada 4 (empat). Kegiatan pemantauan untuk tahun 2024 hanya menggunakan alat *Passive Sampler* dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dipasang pada 4 (empat) wilayah yaitu wilayah transportasi, industri, permukiman dan perkantoran. Parameter kualitas udara meliputi parameter Nitrogen Dioksida dan Sulfur Dioksida. Pemantauan dilaksanakan selama 14 hari dalam 2 (dua) periode setiap tahunnya. Hasil pengukuran status kualitas

udara pada masing-masing titik pengambilan sampel tersaji pada tabel sebagai berikut :

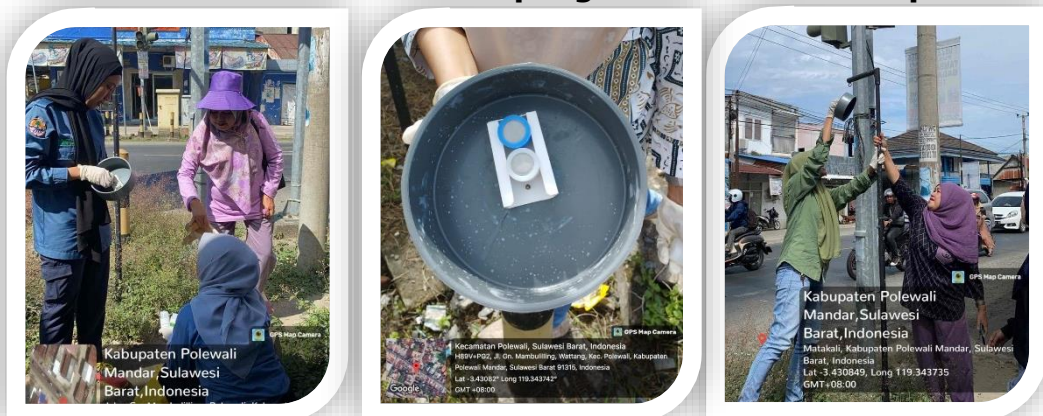
Tabel 3.10 Status Mutu Kualitas Udara Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023-2024

No.	Titik Sampling/Lokasi	2023	2024
		Mutu Udara Ambien	Mutu Udara Ambien
1	Udara Ambient <i>Car Free Day</i> Pantai Bahari	Tidak melebihi baku mutu	Tidak melebihi baku mutu
2	Udara Ambient <i>Kawasan Transportasi Perkoataan Polewali</i>	Tidak melebihi baku mutu	Tidak melebihi baku mutu
3	Udara Ambient <i>Kawasan Perkantoran Pekkabata</i>	Tidak melebihi baku mutu	Tidak melebihi baku mutu
4	Udara Ambien Kawasan Permukiman	Tidak melebihi baku mutu	Tidak melebihi baku mutu

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2024

Berdasarkan pengujian sampel udara ambient pada tahun 2023 dan 2024 yang dilaksanakan pada 4 (empat) titik didapatkan hasil pengujian yaitu **Tidak Melebihi Baku Mutu** yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Gambar 3.3 Dokumentasi Sampling Udara Passive Sampler



Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Limbah B3

Pengelolaan Limbah dan Emisi

Pengelolaan limbah B3, limbah cair dan emisi di Kabupaten Polewali Mandar yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan dua tahun terakhir semakin ada perbaikan, baik dari pemenuhan persyaratan administrasi maupun pemenuhan secara teknis.

Dalam perencanaan program kegiatan LDHK Kabupaten Polewali Mandar melalui bidang pengelolaan limbah dan pengendalian pencemaran (PLPP) mengerjakan sub-kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3, namun implementasi dilapangan bidang PLPP melakukan verifikasi juga terhadap pengelolaan limbah B3, limbah cair dan emisi.

1. Dasar Aturan Pelaksanaan

- a. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
- d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
- g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
- h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/Atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
- i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
- j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- k. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap;
- l. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.15/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019 Tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal;
- m. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Mesin Dengan Pembakaran Dalam;

2. Pemantuan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah dan Emisi

- a. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Dalam Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 tetang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, salah satu persyaratan dan kewajiban terkait dengan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3).

Pengelolaan limbah B3 di Kab. Polewali Mandar mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya karena setiap pelaku usaha/kegiatan sudah melakukan pengelolaan limbah B3 mulai dari pemilahan, penyimpanan, pemusnahan dan bekerja sama dengan perusahaan pengangkut limbah B3 yang memiliki rekomendasi pengangkutan LB3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pemantauan, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) kepada pelaku usaha/kegiatan penghasil limbah B3 dengan cara mengunjungi lokasi usaha/kegiatan, melakukan bimbingan teknis (BIMTEK) pengelolaan limbah B3, berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang berhubungan langsung dengan pelaku usaha/kegiatan, berkoordinasi dengan jasa pengangkut limbah B3, dan berkoordinasi dengan DLH Provinsi Sulbar dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Jenis Limbah B3 yang dihasilkan dari setiap usaha/kegiatan berbeda-beda sesuai dengan jenis usaha/kegiatannya. Adapun sumber limbah yang dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis usahanya yaitu: yang berasal dari proses pengolahan limbah cair (IPAL) yaitu *sludge*.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan peraturan turunannya, pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 sudah tidak memiliki izin penyimpanan limbah B3 yang dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota tetapi memiliki syarat atau rincian teknis penyimpanan limbah B3 yang termuat dalam dokumen lingkungan sebagai alat kendali.

b. Limbah Cair

Dalam pengendalian pencemaran terhadap air dan tanah yang berasal dari air limbah, DLHK melakukan pemantauan pengelolaan air limbah yang dihasilkan dari aktivitas Domestik, Industri, dan UMKM melalui pemeriksaan dokumen pengelolaan air limbah yang dimiliki oleh pelaku usaha/kegiatan, Peninjauan lokasi usaha/kegiatan, pengambilan uji sampel air limbah, pemberian rekomendasi perbaikan dan teguran.

Air limbah yang berkontribusi besar terhadap pencemaran air dan tanah berasal dari aktivitas domestik seperti perumahan warga, fasilitas pelayanan kesehatan, UMKM, Rumah makan dan usaha/kegiatan kecil-menengah yang menghasilkan air limbah. Dalam menganalisis masalah ini, DLHK menerapkan peraturan yang berlaku, berkoordinasi dengan berbagai *stakeholder* yang terkait, melakukan sosialisasi.

c. Emisi

Emisi adalah Pencemar Udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara, mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi Pencemaran Udara.

Sumber emisi kabupaten polewali mandar berasal dari Transportasi, Pembakaran dari UMKM, dan industri yang dapat mempengaruhi kualitas Udara Ambien ketika masuk ke dalam lingkungan.

Tabel 3.11 Jumlah Usaha/Kegiatan Penghasil Limbah B3, Limbah Cair dan Emisi yang Terpantau dan Terawasi di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024

No.	Nama Usaha/Kegiatan	Kecamatan	Buangan yang dihasilkan			Titik Koordinat	
			LB3	L.Cair	Emisi	Latitude	Longitude
A	Fasilitas Pelayanan Kesehatan						
1	RSUD Hajjah Andi Depu	Polewali	LB3	L.Cair	Emisi	-3.407242	119.321578
2	Rumah Sakit Bhakti Kasih	Polewali	LB3	L.Cair		-3.413467	119.322955
3	Klinik Mifta Medical Centre	Polewali	LB3	L.Cair		-3.433915	119.348238
4	Puskesmas Pekkabata	Polewali	LB3	L.Cair		-3.412368	119.317615
5	Klinik Bhayangkara Polres Polman	Polewali	LB3	L.Cair		-3.411768	119.31996
6	Puskesmas Polewali	Polewali	LB3	L.Cair		-3.446152	119.366605
7	Puskesmas Massenga	Polewali	LB3	L.Cair		-3.435705	119.349007
8	Klinik Pratama Rawat Inap TNI-AD	Polewali	LB3	L.Cair		-3.435147	119.349187
9	Klinik Manding	Polewali	LB3	L.Cair		-3.407862	119.305
10	RSUD Pratama Wonomulyo	Wonomulyo	LB3	L. Cair		-3,39572	119,215717
11	UPTD Perawatan Puskesmas Alu	Alu	LB3	L. Cair		-3.432915	118.989292
12	UPTD Perawatan Puskesmas Binuang	Binuang	LB3	L. Cair		-3.46188	119.41306
13	Klinik Engsar	Binuang	LB3	L. Cair		03°26'34,80"	119°24'15,26"
14	UPTD Perawatan Puskesmas Wonomulyo	Wonomulyo	LB3	L. Cair		-3.398748	-119.21208
15	UPTD Perawatan Puskesmas Matakali	Matakali	LB3	L. Cair		-3.378425	119.296992
16	UPTD Perawatan Puskesmas Katumbangan	Campalagian	LB3	L. Cair		-3.460408	119.179415
17	UPTD Perawatan Puskesmas Pambusuang	Balanipa	LB3	L. Cair		-3.500457	119.051855
18	UPTD Perawatan Puskesmas Tinambung	Tinambung	LB3	L. Cair		-3.50377	-119.02475
19	UPTD Perawatan Puskesmas Limboro	Limboro	LB3	L. Cair		-3.48181	119.00793
20	UPTD Perawatan Puskesmas Matangnga	Matangnga	LB3	L. Cair		-3.50055	119.05163
21	UPTD Perawatan Puskesmas Batupanga	Batupanga	LB3	L. Cair		3.362208	119.137853
22	UPTD Perawatan Puskesmas Campalagian	Campalagian	LB3	L. Cair		-3.403568	119.15634
23	UPTD Perawatan Puskesmas Mapilli	Mapilli	LB3	L. Cair		-3.403338	119.18063
24	UPTD Puskesmas Mapilli	Mapilli	LB3	L. Cair			
25	UPTD Perawatan Puskesmas Pelitakan	Pelitakan	LB3	L. Cair		-3.350623	119.238868
26	UDD Palang Merah Indonesia Kab. Polman	Polewali	LB3	L. Cair		-3.405759	119.322304
27	Klinik Batari Wonomulyo	Wonomulyo	LB3	L. Cair			
28	Klinik Batari Polewali	Polewali	LB3	L. Cair			
B	Industri/UMKM						

No.	Nama Usaha/Kegiatan	Kecamatan	Buangan yang dihasilkan			Titik Koordinat	
			LB3	L.Cair	Emisi	Latitude	Longitude
1	PT. Yabes Sarana Mandiri	Wonomulyo	LB3		Emisi	-3.4719	119.435453
2	PT. Kencana Hijau Bina Lestari	Binuang	LB3	L. Cair	Emisi	-3.457688	119.413171
3	PT. Karya Duta Energy	Polewali	LB3		Emisi	03°27'28,68"	119°24'46,58"
4	PT. Hasilindo	Binuang	LB3			-3.4684	119.447834
5.	PT. Wings Binuang	Binuang	LB3	L. Cair			
C	Bengkel dan Pencucian Kendaraan Bermotor						
1	PT. Megahputera Matakali	Matakali	LB3			-3,389757	119,272333
2	PT. Suracojaya Abadi Motor	Wonomulyo	LB3			-3.397695	119.214803
3	Fajar Tani Motor	Wonomulyo	LB3			-3.396279	119.218418
4	Toko Berlian	Wonomulyo	LB3			-3.397697	119.213725
5	Jakarta Motor	Wonomulyo	LB3			-3.398282	119.211948
6	Marannu Motor	Wonomulyo	LB3			-3.39722	119.215522
7	Toko Sinar Makmur	Polewali	LB3			-3.41122152	119.31279521
8	PT. Hadji Kalla	Binuang	LB3			-3.44137157	119.35619089
9	CV. Central Megah Berlian Motor	Polewali	LB3			-3.4317503	119.3444536
10	CV. Sumber II	Binuang	LB3			-3.441434	119.356535
11	PT. Armada Tunas Jaya	Polewali	LB3			-3.410659	119.312535
12	PT. Astra Internasional, Tbk - Honda So Polman,	Wonomulyo	LB3			-3.397944	119.213390
D	Perumahan						
1	PT. Hadiwijaya Bangunindo Property	Polewali		L.Cair		-3.422796	119.344469

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2023/4

Tabel 3.12 Timbulan Limbah B3 Padat dari Usaha dan/atau Kegiatan Kabupaten Polewali Mandar (Dalam Kg) Tahun 2024

No.	Usaha dan/atau Kegiatan	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			Total
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	RSUD H. Andi Depu	1.889	1.902	1.930	1.867	1.886	1.932	2.269	2.188	2.708				18.571
2	Rumah Sakit Bhakti Kasih													0
3	RS. Pratama Wonomulyo	286	236	220	245,5	294,9	405,9	444	379	304				2.815
4	UDD Palang Merah Indonesia Kab. Polman													0
5	PT. Karya Duta Energi													0
6	PT. Kencana Hijau Bina Lestari	511	511	511	15	15	15							1.578
7	PT. Bangun Sarana Nusantara													0
8	PT. Yabes Sarana Mandiri													0

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024

No.	Usaha dan/atau Kegiatan	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			Total
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
9	PT. Megahputra Sejahtera													0
10	PT. Toyota Hadji Kalla	20	20	20	20	20								100
11	CV. Central Megah Berlian Motor													0
12	PT. Armada Tunas Jaya													0
13	PT. Suracaojaya Abadi Motor	37	37	37	37	37	37	37	37	37		111	96	540
14	Fajar Tani Motor	94,66	94,66	94,66	94,66	94,66	94,66	94,66	94,66	94,66				852
15	Toko Berlian Wonomulyo													0
16	Jakarta Motor													0
17	Marannu Motor													0
18	PT. Astra Internasional, Tbk - Honda So Polman,	127	27	234,14	27	27	27	27						496
19	Rajawali Motor Wonomulyo	100	100	100	100	100	100							600
20	Enngsar Medical	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27							2
21	Klinik Bhayangkara Polres Polman	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5							3
22	Klinik Manding													0
23	Klinik Pratama Rawat Inap TNI-AD													0
24	Mifta Medical Clinic	14	14	14	14	14								70
25	Klinik Batari Polewali													0
26	UPTD Puskesmas Allu	3,5	5,6	5,7	4,2	8,4	8,4	8,4						44
27	UPTD Puskesmas Perawatan Anreapi	3,04	4,55	2,24	3,53	6,67	3,97	2,8	6,9	5,04	4,04	4,62		47
28	UPTD Puskesmas Pambusuang	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35				55	53	306
29	UPTD Puskesmas Batupanga	46,4	40,7	38,9	27,5	27,5	28,1	21,6	24,7	26,5	41,3	34,4	29,5	387
30	UPTD Puskesmas Binuang	25,17	25,17	25,17	18,5	19,25	20,09	16,4	24	16,9	17,6	14,2	38,5	222
31	UPTD Puskesmas Bulu													0
32	UPTD Puskesmas Campalagian	28	25	32	31	29	37	32	28	39	26	33	35	375
33	UPTD Puskesmas Katumbangan	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1								81
34	UPTD Puskesmas Perawatan Kec. Limboro	34,9	34,9	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8						144
35	UPTD Puskesmas Matangnga													0
36	UPTD Puskesmas Mapilli													0

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024

No.	Usaha dan/atau Kegiatan	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			Total
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
37	UPTD Puskesmas Mapilli													0
38	UPTD Puskesmas Perawatan Matakali	64,5										65		
39	UPTD Puskesmas Pelitakan													
40	UPTD Puskesmas Polewali	82,15			94,45			87,35			101,5			365
41	UPTD Puskesmas Massenga	14,841	6,349	8,713				30						
42	UPTD Puskesmas Pekkabata	58			10			10			12,1	10,3	11,5	
43	UPTD Puskesmas Tinambung	28,35	28,35	28,35	21,43	50,36	69,09	72,94	80,63	83,9	66,67	64,51		595
44	UPTD Puskesmas Tubbi Taramanu	2,5	1,5	0,5	1,2	144,3	1,4	0,4	0,9	1,4	0,8	1	1,3	157
45	UPTD Puskesmas Perawatan Wonomulyo	32	32	21	32	32								149
46	UPTD Puskesmas Kebun Sari	1,5	2,2	2,5	6,1	8,5	8,4	2,1	1,5	1,5				34
Jumlah														30.190

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2024

Tabel 3.13 Timbulan Limbah B3 Cair dari Usaha dan/atau Kegiatan Kabupaten Polewali Mandar (Dalam Liter) Tahun 2024

No.	Usaha dan/atau Kegiatan	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			Total
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	PT. Kencana Hijau Bina Lestari	12	12	12	12	12	12							72
2	PT. Megahputra Sejahtera	150	150	150	150	150	150	150	150					1200
3	PT. Hadji Kalla	3000	3000	3000	3000	3000								15000
4	Toko Sinar Makmur	150	200	100	150	200	100	150	200	200				1450
5	CV. Sumber II	200	200	200	200	200								1000
6	PT. Suracaojaya Abadi Motor	200	200	400	500	200	200	500		400		600	400	3600
7	Fajar Tani Motor	233,3	233,3	233,3	233,3	233,3	233,3	233,3						1633,1
8	Jakarta Motor	100	100	100	100	100	100	100						700
9	PT. Astra Internasional, Tbk - Honda So Polman,	800		130	200	200	200	200						1730
10	Rajawali Motor Wonomulyo	100	100	100	100	100	100							600
Jumlah														26.985

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2024

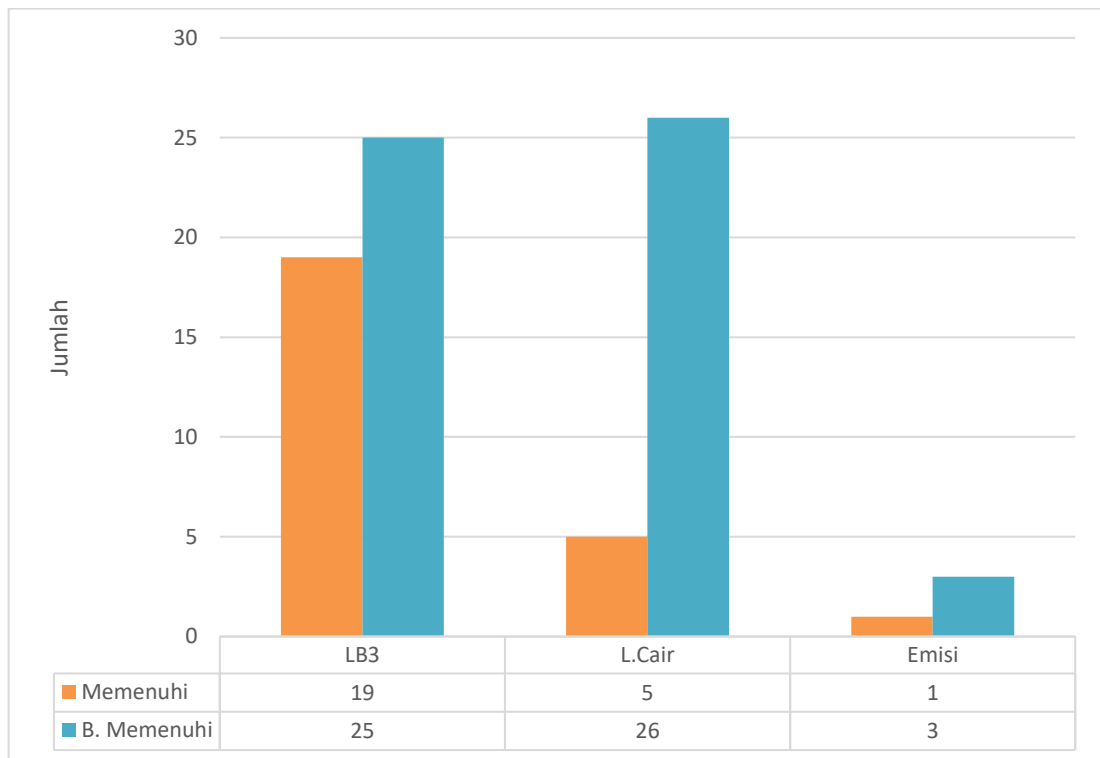
Tabel 3.14 Jumlah Usaha/kegiatan yang Melakukan Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Cair, Emisi Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024

No.	Nama Usaha/Kegiatan	Kecamatan	Buangan yang dihasilkan			Titik Koordinat	
			LB3	L.Cair	Emisi	Latitude	Longitude
A	Fasilitas Pelayanan Kesehatan						
1	RSUD Hajjah Andi Depu	Polewali	Memenuhi	Memenuhi	B. Memenuhi	-3.407.242	119.321.578
2	Rumah Sakit Bhakti Kasih	Polewali	B. Memenuhi	B. Memenuhi		-3.413.467	119.322.955
3	Klinik Mifta Medical Centre	Polewali	Memenuhi	Memenuhi		-3.433.915	119.348.238
4	Puskesmas Pekkabata	Polewali	B. Memenuhi	B. Memenuhi		-3.412.368	119.317.615
5	Klinik Bhayangkara Polres Polman	Polewali	B. Memenuhi	B. Memenuhi		-3.411.768	11.931.996
6	Puskesmas Polewali	Polewali	B. Memenuhi	B. Memenuhi		-3.446.152	119.366.605
7	Puskesmas Massenga	Polewali	Memenuhi	B. Memenuhi		-3.435.705	119.349.007
8	Klinik Pratama Rawat Inap TNI-AD	Polewali	B. Memenuhi	B. Memenuhi		-3.435.147	119.349.187
9	Klinik Manding	Polewali	B. Memenuhi	B. Memenuhi		-3.407.862	119.305
10	RSUD Pratama Wonomulyo	Wonomulyo	Memenuhi	Memenuhi		-3,39572	119,215717
11	UPTD Perawatan Puskesmas Alu	Alu	Memenuhi	B. Memenuhi		-3.432.915	118.989.292
12	UPTD Perawatan Puskesmas Binuang	Binuang	Memenuhi	B. Memenuhi		-346.188	11.941.306
13	Klinik Engsar	Binuang	B. Memenuhi	B. Memenuhi		03°26'34,80"	119°24'15,26"
14	UPTD Perawatan Puskesmas Wonomulyo	Wonomulyo	Memenuhi	B. Memenuhi		-3.398.748	-11.921.208
15	UPTD Perawatan Puskesmas Matakali	Matakali	B. Memenuhi	B. Memenuhi		-3.378.425	119.296.992
16	UPTD Perawatan Puskesmas Katumbangan	Campalagian	Memenuhi	B. Memenuhi		-3.460.408	119.179.415
17	UPTD Perawatan Puskesmas Pambusuang	Balanipa	Memenuhi	Memenuhi		-3.500.457	119.051.855
18	UPTD Perawatan Puskesmas Tinambung	Tinambung	Memenuhi	B. Memenuhi		-350.377	-11.902.475
19	UPTD Perawatan Puskesmas Limboro	Limboro	B. Memenuhi	B. Memenuhi		-348.181	11.900.793
20	UPTD Perawatan Puskesmas Bulu	Bulu	B. Memenuhi	B. Memenuhi		-322.853	11.915.634
21	UPTD Perawatan Puskesmas Matangnga	Matangnga	B. Memenuhi	B. Memenuhi		-350.055	11.905.163
22	UPTD Perawatan Puskesmas Batupanga	Batupanga	Memenuhi	B. Memenuhi		3.362.208	119.137.853
23	UPTD Perawatan Puskesmas Tubbi Taramanu	Tubbi Taramanu	B. Memenuhi	B. Memenuhi		334.233	119.039
24	UPTD Perawatan Puskesmas Campalagian	Campalagian	Memenuhi	B. Memenuhi		-3.403.568	11.915.634
25	UPTD Perawatan Puskesmas Mapilli	Mapilli	B. Memenuhi	B. Memenuhi		-3.403.338	11.918.063
26	UPTD Puskesmas Mapilli	Mapilli	B. Memenuhi	B. Memenuhi			
27	UPTD Perawatan Puskesmas Pelitakan	Pelitakan	B. Memenuhi	B. Memenuhi		-3.350.623	119.238.868
28	UDD Palang Merah Indonesia Kab. Polman	Polewali	Memenuhi	B. Memenuhi		-3.405.759	119.322.304
B	Industri/UMKM						
1	PT. Yabes Sarana Mandiri	Binuang	B. Memenuhi		B. Memenuhi	-34.719	119.435.453
2	PT. Bangun Sarana Nusantara	Binuang	B. Memenuhi		B. Memenuhi	-3.471.642	119.440.955
3	PT. Kencana Hijau Bina Lestari	Binuang	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	-3.457.688	119.413.171
4	PT. Karya Duta Energy	Polewali	Memenuhi		B. Memenuhi	03°27'28,68"	119°24'46,58"
5	PT. Wings	Binuang		B. Memenuhi		-34.684	119.447.834
C	Bengkel dan Pencucian Kendaraan Bermotor						
1	PT. Megahputera Matakali	Matakali	Memenuhi			-3,389757	119,272333
2	PT. Suracajaya Abadi Motor	Wonomulyo	B. Memenuhi			-3.397.695	119.214.803
3	Fajar Tani Motor	Wonomulyo	B. Memenuhi			-3.396.279	119.218.418

No.	Nama Usaha/Kegiatan	Kecamatan	Buangan yang dihasilkan			Titik Koordinat	
			LB3	L.Cair	Emisi	Latitude	Longitude
4	Berlian	Wonomulyo	B. Memenuhi			-3.397.697	119.213.725
5	Jakarta Motor	Wonomulyo	B. Memenuhi			-3.398.282	119.211.948
6	Toko Sinar Makmur	Polewali	Memenuhi			-341.122.152	11.931.279.521
7	PT. Hadji Kalla	Binuang	Memenuhi			-344.137.157	11.935.619.089
8	CV. Central Megah Berlian Motor	Polewali	B. Memenuhi			-34.317.503	1.193.444.536
9	CV. Sumber II	Binuang	B. Memenuhi			-3.441.434	119.356.535
10	PT. Armada Tunas Jaya	Polewali	B. Memenuhi			-3.410.659	119.312.535
11	PT. Astra Internasional, Tbk - Honda So Polman,	Wonomulyo	Memenuhi			-3.397.944	119.213.390
12	Maranu Motor	Wonomulyo	B. Memenuhi			-3.9722°	119.215522°
D	Perumahan						
1	PT. Hadiwijaya Bangunindo Property	Polewali		B. Memenuhi		-3.422.796	119.344.469

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2024

Grafik 3.3 Jumlah Usaha/Kegiatan Yang Melakukan Pengelolaan Limbah B3, Limbah Cair dan Emisi



Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2024

Tabel 3.15 Usaha/kegiatan Penghasil Limbah B3 yang Melakukan Pengolahan Eksternal (Pengangkutan Limbah B3) Tahun 2024

No.	NAMA PERUSAHAAN PENGANGKUT	NOMOR KONTRAK KERJASAMA DENGAN PELAKU USAHA/KEGIATAN	NOMOR KONTRAK KERJASAMA	NAMA USAHA/KEGIATAN	ALAMAT	LAMA KONTRAK
1	PT. MITRA HIJAU ASIA	440/13/PKM-PB5/II/2021	105/MOU/MHA-PLW/II/2021	PKM PAMBUSUANG	JLN. POROS MAJENE DS. PAMBUSUANG KEC. BALANIPA	08/02/2024
2		060/PKM-MPL/MOU/II/2021	106/MOU/MHA-PLW/II/2021	PKM MAPILLI	JLN. OLAHRAGA NO 5 KEC. MAPILLI	08/02/2024

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024

No.	NAMA PERUSAHAAN PENGANGKUT	NOMOR KONTRAK KERJASAMA DENGAN PELAKU USAHA/KEGIATAN	NOMOR KONTRAK KERJASAMA	NAMA USAHA/KEGIATAN	ALAMAT	LAMA KONTRAK
3		03/PKM-LBR/007/2021	107/MOU/MHA-PLW/II/2021	PKM LIMBORO	JLN. POROS ALU, DESA PALECE KEC. LIMBORO	08/02/2024
4		108/MOU/MHA-PLW/11/2021	108/MOU/MHA-PLW/II/2021	PKM PELITAKAN	JLN. BHAKTI HUSADA NO 31 KEL. PELITAKAN	08/02/2024
5		001/PKM-PKBT/440/2/2021	109/MOU/MHA-PLW/II/2021	PKM PEKKABATA	JLN. BUDI UTOMO NO 11 KEL PEKKABATA	08/02/2024
6			110/MOU/MHA-PLW/II/2021	PKM BINUANG	JLN. POROS PINRANG KEL. AMASSANGAN	
7		20/PKM//MS/2/2021	111/MOU/MHA-PLW/II/2021	PKM MASSENGA	JLN. OLAHRAGA NO 1 KEL. POLEWALI	08/02/2024
8			112/MOU/MHA-PLW/II/2021	PKM CAMPALAGIAN	JLN POROS MAJENE NO 100 KEL. PAPPANG, KEC. CAMPALAGIAN	08/02/2024
9		056/PKM-KIB/2/2021	113/MOU/MHA-PLW/II/2021	PKM KATUMBANGAN	JLN. POROS KATUMBANGAN, DS. KATUMBANGAN	08/02/2024
10			114/MOU/MHA-PLW/II/2021	PKM MATANGNGA	JLN POROS MATANGNGA NO 01 KEC. MATANGNGA	
11		064/PKM-ANR/440/02/2021	115/MOU/MHA-PLW/II/2021	UPTD PKM PERAWATAN ANREAPI	JLN. POROS KUNYI, KEL ANREAPI, KEC. ANREAPI	08/02/2024
12			116/MOU/MHA-PLW/II/2021	CLINIK PRAKTEK DRG INDRAWATI RAHIM	JLN. BULU MANARANG NO 467 KEL. TAMMASSARANGNGA, KEC. PALETEANG, KAB. PINRANG	
13		337/PKM-TTR/2/2021	118/MOU/MHA-PLW/II/2021	PKM TUBBI TARAMANU	JLN. POROS PADANG MAWALLE KEL. TARAMANU	08/02/2024
14			119/MOU/MHA-PLW/II/2021	PKM MATAKALI	JLN. POROS POLEWALI MAJENE, KEL MATAKALI	
15		800/22/PKM-BL/02/2021	120/MOU/MHA-PLW/II/2021	PKM BULO	JLN. POROS MATANGNGA DESA BULO, KEC. BULO	08/02/2024
16		P-70/PKM-BTP/445/2/2021	123/MOU/MHA-PLW/II/2021	PKM BATUPANGA	JLN. BENDUNG SEKKA-SEKKA, KEL BATUPANGA KEC. LUYO	08/02/2024
17				UPTD. PUSKESMAS POLEWALI	JL. TEUKU UMAR NO. 92 KEC. POLEWALI	
18			124/MOU/MHA-PLW/III/2021	PUSKESMAS ALLU	JL. POROS TINAMBUNG-ALU DESA MOMBI	08/02/2024
19		1-14/094/PKM-WONO/III/IIII/2021	133/MOU/MHA-PLW/III/2021	UPTD. PUSKESMAS WONOMULYO	JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.123	02/03/2024
20		026/PUSK-TNB/PKS/03/2021	125/MOU/MHA-PLW/III/2021	UPTD PUSKESMAS TINAMBUNG	JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.6 KEC. TINAMBUNG	09/03/2024
21			134/MOU/MHA-PLW/II/2021	UPTD PUSKESMAS KEBUN SARI	JL. JEND. SUDIRMAN	12/03/2024
22		A-24/HK-PROC/III/2021-S1	187/PKS/MHA-MKS/IV/2021	PT. HADJI KALLA	WISMA KALLA LANTAI II	31/03/2022
23			153/MOU/MHA-PLW/VI/2021	KLINIK PRATAMA RAWAT INAP RUMKITBAN 14.08.02	JALAN AMANAH PATTOLA NO.2 KEL. POLEWALI, KAB. POLEWALI MANDAR	16/06/2024
24		07/PKS/DIR/RSB-KSM/VII/2021	244/PKS/MHA-MKS/V/2021	RUMAH SAKIT IBU DAN ANAKA MIFTA	JL. AHMAD YANI NO. 100, KEL. MAMMI, KEC. BINUNAG	02/06/2022
25		1-14/094/PKM-WONO/III/2021	133/MOU/MHA-PLW/III/2021	PUSKESMAS PERAWATAN WONOMULYO	JL. JEND. SUDIRMAN NO. 123 KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO	08/03/2024

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024

No.	NAMA PERUSAHAAN PENGANGKUT	NOMOR KONTRAK KERJASAMA DENGAN PELAKU USAHA/KEGIATAN	NOMOR KONTRAK KERJASAMA	NAMA USAHA/KEGIATAN	ALAMAT	LAMA KONTRAK
26		B-243/RSBK/III/2022	012/MOU/MHA-PLW/III/2022	RUMAH SAKIT BHAKTI KASIH	JL. KARTINI NO.27 POLMAN SUWESI BARAT	08/03/2025
27				PUSKESMAS MATANGNGA	KEC. MATANGNGA	
28				KLINIK BHAYANGKARA	JL. KARTINI NO.17	
29	PT.BENDI NASHA NIAGA INDUSTRI		474/PKPLB3/RSUP-BNNI-MKS/IIII/2021	RSUD POLEWALI MANDAR	JL. DR.RATULANGI NO.50, DARMA, POLEWALI, KABUPATEN POLEWALI MANDAR, SULAWESI BARAT 91315	28/03/2022
30	PT. CELEBES CIPTA PRATAMA	029/I.3-URT/UTD.PLW/V/2023	057/PKSLB3/UPP-CCP/V/2023	UNIT DONOR DARAH PMI KAB. POLEWALI MANDAR	JALAN DR. RATULANGI NO. 52 POLEWALI PROVINSI SULAWESI BARAT	24 Mei 2024
31	PT. MITRA HIJAU ASIA	PKS/13/HSO-MKS/GS/04-2023	072/PKS/MHA-MKS/II/2023	PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK-HONDA REGION SUSEL	JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 134, KELURAHAN SIDODADI, KABUPATEN POLEWALI MANDAR	31/12/2023
32			114/MOU/MHA-PLW/II/2021	PUSKESMAS MATANGNGA	MATANGNGA	08/02/2024
33	PT. MITRA HIJAU ASIA	175/MOU/MHA-PLW/XI/2021		KLINIK "ENG SAR MEDICAL"	JALAN MANGONDANG NO.56 KANANG, DESA BATETANGNGA, KECAMATAN BINUANG	16-Nov-24
34	PT. Hijau Pratama Nusantara	027/HK- GA/V/2022		PT. Hajdi Kalla Toyota	(Jl. Teuku Umar No.003), Kelurahan(Tonyaman), Kecamatan (Binuang),	25 Mei 2023
35	PT. CELEBES CIPTA PRATAMA		097/PKSLB3/PC-CCP/IX/2023	UPTD. PUSKEMAS CAMPALAGIAN	JLN POROS MAJENE NO 100 KEL. PAPPANG, KEC. CAMPALAGIAN	
36	PT. CELEBES CIPTA PRATAMA		069/PKSLB3/PB-CCP/VII/2023	UPTD. PUSKEMAS BINUANG	JLN. POROS PINRANG KEL. AMASSANGAN	28 Juli 2024
37	PT. CELEBES CIPTA PRATAMA	004/PKM-PKBT/800/9/2023		UPTD. PUSKEMAS PUSKESMAS PEKKABATA,	KECAMATAN POLEWALI	07/09/2024
38	PT. CELEBES CIPTA PRATAMA		100/PKSLB3/PT-CCP/IX/2023	UPTD. PUSKESMAS TINAMBUNG	KECAMATAN TINAMBUNG	07-Sep-24
39	PT. CELEBES CIPTA PRATAMA	114/164/PK-WONO/4/2024		UPTD. PUSKESMAS WONOMULYO	KECAMATAN WONOMULYO	01-Apr-25
40	PT. CELEBES CIPTA PRATAMA	017/PKS/RSIAM/XII/2022		RSIA MIFTA	KECAMATAN POLEWALI	09/12/2024
41	PT. CELEBES CIPTA PRATAMA	100.3.7.1/RSHAD/33/VII/2023		RSUD HAJJAH ANDI DEPU	KECAMATAN POLEWALI	01 Juni 2024
42		B-520/100.3.7.1/RSUDW/V/2024		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) WONOMULYO	KECAMATAN WONOMULYO	07/05/2025
43	PT. CELEBES CIPTA PRATAMA			UPTD. PUSKESMAS ANREAPI	KECAMATAN ANREAPI	
44			103/PKSLB3/UPL-CCP/IX/2023	UPTD. PUSKESMAS LIMBORO	KECAMATAN LIMBORO	07/09/2024
45				UPTD. PUSKESMAS KATUMBANGAN	KEC. CAMPALAGIAN	07/09/2024

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2024

Tabel 3.16 Usaha/Kegiatan yang Mendapatkan Persetujuan Teknis (PERTEK) Tahun 2024

No.	Nama Usaha/Kegiatan	Alamat	Jenis Pertek	Nomor Pertek
1	PT. Kencana Hijau Bina Lestari (KHBL)	Jl. Poros Polewali Lingkungan Binuang I Kel. Amassangan Kec. Binuang	Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan	B-34/BID.II/DLHK/PERTEK/660/I/2022
2.	PT. Kencana Hijau Bina Lestari (KHBL)	Jl. Poros Polewali Lingkungan Binuang I Kel. Amassangan Kec. Binuang	Pemenuhan Baku Mutu Emisi	B-47/BID.II/DLHK/PERTEK/660/II/2022
3.	PT. Bina Mulia Putra	Jl. Jend. Sudirman Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo	Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Ke Tanah	B-231/BID.II/DLHK/PERTEK/660/IX/2022
4.	PT. Dwiputri Malolo	Jl. Basseang Kecamatan Anreapi		B-287/BID.II/DLHK/PERTEK/660/X/2022
5.	RSUD Hajja Andi Depu	Jl. Dr Ratulangi No. 50 Kel. Darma Keca. Polewali	Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Ke Tanah	B-313/BID.II/DLHK/PERTEK/660/XI/2022
6.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Sulbar	Jl. H.Abd. Pattana Enden Rangas, Mamuju Komp. Kantor Gubernur Sulbar	Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Ke Tanah	B-323a/BID.II/DLHK/PERTEK/660/XI/2022
7.	PT. Kencana Hijau Bina Lestari (KHBL)	Jl. Poros Polewali Lingkungan Binuang I Kel. Amassangan Kec. Binuang	Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Ke Tanah	B-340/BID.II/DLHK/PERTEK/660/XII/2022
8.	RSUD. H. Andi Depu	Jl. Dr. Ratulangi No.50 Kel. Darma, Kec. Polewali	Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Ke Tanah	B-313/DLHK/PERTEK/Bid.II/660/XI/2022
9.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Sulbar	Jl. H. Abd, Pattanan Endeng Rangas, Mamuju Kamp. Kantor Gubernur Sulbar	Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Ke Tanah	B-323a/DLHK/PERTEK/Bid.II//660/XI/2022
10.	PT. Mifta Medical Family	Jl. Ahmad Yani No.100	Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Ke Tanah	B-211/DLHK/PERTEK/Bid.II//660/I/2023
11.	PT. Kencana Hijau Bina Lestari	Jl. Poros Polewali Kel. Amassangan, Kec. Binuang	Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Ke Tanah	B-340/DLHK/PERTEK/Bid.II//660/II/2023
12.	PT. Bhakti Putra Mamase RS. Bhakti Kasih	Jl. Kartini No.27 Polewali Mandar	Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Ke Tanah	B-63.a/DLHK/PERTEK/Bid.II//660/III/2023
13.	PT. Kelapa Hijau Bina Lestari	Jl. Poros Polewali Kel. Amassangan, Kec. Binuang	Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Ke Tanah	B-81.a/DLHK/PERTEK/Bid.II//660/IV/2023
14.	PT. Kelapa Hijau Bina Lestari	Jl. Poros Polewali Kel. Amassangan, Kec. Binuang	Pembuangan Emisi	B-81.b/DLHK/PERTEK/Bid.II//660/IV/2023
15.	PT. Gallung Berkah Bersama	Jln. A. Mattalitti, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.	Pemanfaatan Air Limbah Aplikasi Ke Tanah dengan Cara Penyiraman	B- 130/DLHK/PERTEK/BID.II/660/VI/2023
16.	PT.wijaya Bangun Indo Property	Jl. Daeng Mangipung, Kel. Manding Kec. Polewali Kab. Polman	Pemanfaatan Air Limbah Aplikasi Ke Tanah dengan Cara Penyiraman	B- 298/DLHK/PERTEK/BID.II/660/IX/2024

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2024

Tabel 3.17 Usaha/Kegiatan yang Mendapatkan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Tahun 2024

No.	Nama Usaha/Kegiatan	Alamat	Jenis SLO	Nomor Pertek
1.	RSUD Hajjah Andi Depu	Jalan Dr. Ratulangi Nomor 50 Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat	Pemanfaatan Air Limbah Aplikasi Ke Tanah dengan Cara Pencucian dan Penyiraman	B – 164 /DLHK/SLO/BID.II/660/V/2024
2	Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Mifta	Jalan Ahmad Yani No. 100 Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat	Pemanfaatan Air Limbah Aplikasi Ke Tanah dengan Cara Pencucian dan Penyiraman	B- 230 /DLHK/SLO/BID.II/660/VII/2024

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2024

Persentase Pengaduan Kasus Lingkungan yang terselesaikan

Dalam Kasus Pengaduan Lingkungan yang ditargetkan 100%. dimana pada indikator ini hanya berdasar pada pengaduaan masyarakat. kasus-kasus yang muncul menyangkut kelengkapan dokumen perizinan maupun penerapan usaha/kegiatan yang tidak sesuai dengan komitmen atau kesanggupan pemilik usaha/kegiatan dalam memenuhi syarat-syarat atau aturan yang tertuang dalam dokumen Izin Lingkungan. Pengaduaan yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar ditindaklanjuti dengan melakukan pemantauan ke lokasi usaha/kegiatan. Jumlah aduan kasus lingkungan pada tahun 2024 sebanyak 5 (lima) dan semuanya dapat terselesaikan sehingga capaian sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan presentase 100%.

Tabel 3.18 Rekapitulasi Pengaduan dan Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Tahun 2024

No.	Jenis Pengaduan	Tanggal Pengaduan	Nama Pengadu	Sumber Pengaduan	Lokasi Pengaduan	Tim Verifikasi Lap.	Kegiatan Lapangan	Status	Tindak Lanjut Pengaduan
1	Aktivitas Tambang	4 Januari 2024	Baharuddin	Aktivitas Tambang, Izin Tambang, dan Penggunaan BBM harus Solar Industri	Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali	DLHK	Peninjauan lokasi	Selesai	Telah dilakukan pembinaan terhadap pengelola tambang Galian C yang dilakukan oleh Tim Teknis DLHK.
2	Sampah Berserakan	10 Januari 2024	Usma	Adanya sampah berserakan di jembatan Rea Barat	Desa Patampanua, Kecamatan Matakali	DLHK	Peninjauan lokasi	Selesai	Telah dilakukan pembinaan dan edukasi terhadap Masyarakat disekitaran Lokasi pengaduan oleh Tim Edukasi Pemilahan Sampah dan Tim Teknis DLHK.
3	Aktivitas Tambang	3 Mei 2024	LSM	Adanya aktivitas kendaraan truk pengangkut tanah	Desa Tenggulang Kecamatan Luyo	DLHK	Peninjauan lokasi	Selesai	Telah dilakukan pemantauan lapangan dan koordinasi dengan pelaksana proyek di lapangan.
4	Rencana Penambangan Batuan Andesit	29 Mei 2024		Adanya Rencana Penambangan Batuan Andesit	Desa Mirring Kecamatan Binuang	DLHK	Peninjauan lokasi	Selesai	Perizinan masih lanjut di Tingkat provinsi, masalah perizinan tambang merupakan kewenangan provinsi.

5	Pertambangan Galian dan Batuan	21 September 2024	LP-HAM	Adanya pencemaran udara yang ditimbulkan aktivitas kendaraan truk	Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali	DLHK	Peninjauan lokasi	Selesai	Lanjut ke Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat, karena yang berhak menghentikan aktivitas pertambangan adalah pihak Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat.
---	--------------------------------	-------------------	--------	---	-------------------------------------	------	-------------------	---------	---

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2024

Pembinaan Lokasi Proklim

Lokasi binaan Program Kampung Iklim (Proklim) Tahun 2024 sebanyak 10 (sepuluh) lokasi, dan sebanyak 6 (Sebelas) lokasi pengusulan ProKlim Utama dan 4 (empat) Pengusulan ProKlim Madya melalui Aplikasi SRN PPI dan SPECTRUM. Pada tahun 2024 ada 1 (satu) lokasi ProKlim yang mendapat penghargaan Tropy utama dan 5 Sertifikat Proklim Utama dan 4 (empat) lokasi ProKlim yang mendapat penghargaan Sertifikat ProKlim Madya yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Untuk mempercepat pembinaan lokasi ProKlim di Kabupaten/Kota/Lembaga Pemerintah Pusat memberikan dukungan kepada personil yang terlibat dalam pembinaan lokasi ProKlim melalui mekanisme Enumerator dan 10 lokasi yang di daftar di SRN PPI didaftarkan melalui mekanisme Enumerator.

1. Verifikasi dan Apresiasi Proklim

Setelah selesai melakukan pendaftaran melalui web SRN PPI, Tim verifikator ProKlim KLHK melakukan verifikasi lapangan terkait data-data aksi adaptasi, mitigasi dan kelembagaan pada lokasi yang di usulkan. Dari 10 lokasi yang didaftarkan 6 lokasi diverifikasi dan hasil dari verifikasi tersebut didapatkan nilai penurunan emisi gas rumah kaca pada lokasi yang di usulkan:

Tabel 3.19 Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca

No.	Edit Nama Kegiatan	Energi	Kehutanan	Limbah	Pertanian	Total
1	Desa Mosso Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat RBP REDD+GCF OUTPUT 2	16,48	-	13,24	0,06	29,78
2.	Desa Pallis Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat RBP REDD+GCF OUTPUT 2	10,50	-	55,14	786,59	852,23
3.	Desa Renggeang Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi BARAT_RBP REDD+GCF OUTPUT 2	7,81	231,35	3,53	197,21	439,90
4.	Desa Tangan Baru Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi BARAT_RBP REDD+GCF OUTPUT 2	7,81	280,87	11,03	1,32	301,03
5.	Desa Kurma Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat RBP REDD+GCF OUTPUT 2	7,81	373,17	11,03	317,80	709,81
6.	Desa Tapango Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat RBP REDD+GCF OUTPUT 2	16,48	1,47	15,88	79,28	113,11
Total Pengurangan Emisi		66,89	886,86	109,85	1.382,26	2.445,86
Persentase Pengurangan Emisi (%)		2,73%	36,26%	4,49%	56,51%	100 %

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2024

Hasil dari verifikasi lapangan setiap lokasi mendapatkan apresiasi dari KLHK dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 3.20 Kategori Apresiasi ProKlim Kab. Polewali Mandar

No.	Lokasi ProKlim	Kategori
1.	Desa Mosso	Sertifikat Madya
2.	Desa Pallis	Tropy Utama
3.	Desa Renggeang	Sertifikat Utama
4.	Desa Tangan Baru	Sertifikat Utama
5.	Desa Kurma	Sertifikat Utama
6.	Desa Tapango	Sertifikat Utama
7.	Desa Duampanua	Sertifikat Madya
8.	Lingkungan Tirondo Kampung Baru Kelurahan Sulewatang	Sertifikat Madya
9.	Dusun Patto-Patto Desa Luyo	Sertifikat Madya
10.	Desa Katimbang	Sertifikat Madya

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2024



Gambar 3.4 Penerimaan Apresiasi Tropy Utama Desa Pallis

2. Pelaksanaan ProKlim Tahun 2018-2024

Jumlah lokasi ProKlim Binaan Kab. Polewali Mandar tahun 2018-2024 yang telah terdaftar dalam SRN PPI sebanyak 53 lokasi yang dapat dilihat pada uraian berikut:

Tabel 3.21 Lokasi ProKlim Kab. Polewali Mandar 2018-2024

No.	Lokasi ProKlim (Alamat Lengkap)	No. Registrasi ProKlim	T. Koordinat		Tahun	Kategori ProKlim			
			Lat.	Long.		Pratama	Madya	Utama	Lestari
1	Desa Kaleok Kecamatan Binuang		-3,387833	119,448805	2018	Pratama			
2	Desa Kuajang Kecamatan Binuang		-3,438226	119,373551	2019			utama	
3	Desa Kunyi Kecamatan Binuang		-3,359801	119,397561	2019			Utama	
4	ProKlim Dusun Tandipura, Desa Kaleok Kec. Binuang Kab.Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat	11-PK-II-2020-5231	-3,385350	119,439420	2020		Madya		
5	ProKlim Dusun Marende, Desa Kaleok Kec. Binuang Kab.Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat	11-PK-II-2020-5232	-3,399416	119,453236	2020		Madya		
6	ProKlim Dusun Amola, Desa Amola Kec. Binuang Kab.Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat	11-PK-II-2020-5233	-3,427536	119,469552	2020		Madya		

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024

No.	Lokasi Proklam (Alamat Lengkap)	No. Registrasi Proklam	T. Koordinat		Tahun	Kategori Proklam			
			Lat.	Long.		Pratama	Madya	Utama	Lestari
7	Proklam Dusun Tanete, Desa Amola Kec. Binuang Kab.Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat	11-PK-II-2020-5234	-3,415574	119,467640	2020		Madya		
8	Proklam Dusun Laba- Laba, Desa Paku Kec. Binuang Kab.Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat	11-PK-II-2020-5235	-3,472625	119,458107	2020		Madya		
9	Proklam Dusun Cendana, Desa Kaleok Kec. Binuang Kab.Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat	11-PK-II-2020-5236	-3,390475	119,440014	2020			Utama	
10	Proklam Dusun Eran Batu, Desa Batetangga Kec. Binuang Kab.Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat	11-PK-II-2020-5237	-3,395711	119,408736	2020		Madya		
11	Proklam Dusun Baruga, Desa Batetangga Kec. Binuang Kab.Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat	11-PK-II-2020-5239	-3,430199	119,416965	2020		Madya		
12	Proklam Dusun Bajoe, Desa Rea Kec. Binuang Kab.Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat	11-PK-II-2020-5240	-3,456588,	119,389706	2020		Madya		
13	Proklam Dusun Tonyaman, Desa Tonyaman Kec. Binuang Kab.Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat	11-PK-II-2020-5241	-3,455836	119,369996	2020			Utama	
14	Proklam Lestari Dusun Kaleok, Desa Kaleok Kec. Binuang Kab.Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat	11-PK-III-2020-5244	-3,326695	119,13604	2020				Lestari
15	Proklam Dusun Kappung Toa Desa Bonra Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat	11-PK-V-2021-6809	-3,401042	119,171637	2021			Utama	
16	Proklam Lingkungan Olahraga Kelurahan Wattang Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat	11-PK-V-2021-6810	-3,434295	119,346402	2021			Utama	
17	Proklam Dusun Lewukang Desa Tandassura Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat	11-PK-V-2021-6811	-3,472984	118,964987	2021			Utama	
18	Proklam Desa Sumberjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat	11-PK-V-2021-6812	-3,386408	119,229280	2021			Utama	
19	Proklam Dusun Tandipura Desa Kaleok Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat	11-PK-V-2021-6816	-3,385350	119,439420	2021			Utama	
20	Proklam Lingkungan Pulele Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat	11-PK-V-2021-7640	-3,399570	119,329050	2021			Utama	
21	Proklam Dusun IV Kemiri Desa Kebun Sari Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat	11-PK-V-2022-9507	-3,44148	119,2257	2022		Madya		
22	Proklam Dusun IV Lutang Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat	11-PK-V-2022-9537	-3,40426	118,98932	2022			Utama	
23	Proklam Dusun Tulung Agung Desa Bumi Ayu Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat	11-PK-V-2022-9667	-3,41747	119,20915	2022		Madya		
24	Proklam Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat	11-PK-V-2022-10030	-3,389612	119,203132	2022		Madya		
25	Proklam Lingkungan Taroe Kelurahan Batupanga Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat	11-PK-V-2022-10143	-3,339871	119,131211	2022		Madya		
26	Proklam Desa Lambanan Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat	11-PK-V-2022-10183	-3,489111	119,076675	2022			Utama	
27	Proklam Desa Sayoang Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat_Gcf	11-PK-III-2023-13255	-3,334657	119,149245	2023		Madya		
28	Proklam Desa Pao-Pao Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat_Gcf	11-PK-III-2023-13256	-3,383908	118,987833	2023		Madya		
29	Proklam Desa Beroangin Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat_Gcf	11-PK-III-2023-13271	-3,333626	119,144180	2023			Utama	

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024

No.	Lokasi Proklam (Alamat Lengkap)	No. Registrasi Proklam	T. Koordinat		Tahun	Kategori Proklam			
			Lat.	Long.		Pratama	Madya	Utama	Lestari
30	Proklam Desa Galung Tuluk Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat_Gcf	11-PK-III-2023-13280	-3,496681	119,066334	2023		Madya		
31	Proklam Desa Karombang Kecamatan Bulu Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat_Gcf	11-PK-III-2023-13281	-3,204452	119,129844	2023			Utama	
32	Proklam Desa Lilli Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat_Gcf	11-PK-III-2023-13284	-3,186981	119,197971	2023			Utama	
33	Proklam Desa Tapua Kecamatan Matangnga Kanupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat_Gcf	11-PK-III-2023-13285	-3,217202	119,226499	2023			Utama	
34	Roklim Desa Mambu Tapua Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat_Gcf	11-PK-III-2023-13287	-3,239043	119,266579	2023		Madya		
35	Proklam Dusun Lembang Desa Tandapura Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat	11-PK-V-2023-14768	-3,470302	118,963432	2023			Utama	
36	Proklam Lingkungan Tinambung Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat	11-PK-V-2023-14769	-3,502405	119,018089	2023			Utama	
37	Proklam Dusun Galung Daala Desa Suruang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat	11-PK-V-2023-15218	-3,480714	119,107497	2023			Utama	
38	Proklam Dusun Rappogading Desa Lagi-Agi Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat	11-PK-V-2023-15220	-3,459820	119,148124	2023			Utama	
39	Proklam Desa Mammi Kecamatan Binuang Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat		-3,404630	119,365442	2023	Pratama			
40	Proklam Desa Tamangalle Kec. Balanipa		-3,503299	119,055539	2023	Pratama			
41	Proklam Desa Tangan Baru Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat		-3,459189	118,973794	2023	Pratama			
42	Proklam Dusun Tappina Desa Miring Kecamatan Binuang Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat		-3,460793	119,442309	2023	Pratama			
43	Proklam Kelurahan Sulewatang Kecamatan Polewali Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat		-3,416943	119,346830	2023	Pratama			
44	Proklam Desa Duampanua Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat_RBP REDD+GCF OUTPUT 2	11-PK-IV-2024-19248	-3,372157	119,326341	2024		Madya		
45	Proklam Desa Kurma Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat_RBP REDD+GCF OUTPUT 2	11-PK-IV-2024-19245	-3,365195	119,163836	2024			Utama	
46	Proklam Desa Tapango Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar RBP REDD+GCF OUTPUT 2	11-PK-IV-2024-19242	-3,325698	119,256058	2024			Utama	
47	Proklam Lingkungan Tirondo Kampung Baru Kelurahan Sulewatang Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat_RBP REDD+GCF OUTPUT 2	11-PK-IV-2024-19226	-3,409146	119,342538	2024		Madya		
48	Proklam Dusun Patto-Patto Desa Luyo Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat_RBP REDD+GCF OUTPUT 2	11-PK-V-2024-19224	-3,388846	119,148529	2024		Madya		
49	Proklam Desa Katimbang Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat_RBP REDD+GCF OUTPUT 2	11-PK-IV-2024-19222	-3,142713	119,227063	2024		Madya		
50	Proklam Desa Mosso Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat_RBP REDD+GCF OUTPUT 2	11-PK-IV-2024-19220	-3,463982	119,049173	2024			Utama	

No.	Lokasi Proklamasi (Alamat Lengkap)	No. Registrasi Proklamasi	T. Koordinat		Tahun	Kategori Proklamasi			
			Lat.	Long.		Pratama	Madya	Utama	Lestari
51	Proklamasi Desa Renggeang Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat_RBP REDD+GCF OUTPUT 2	11-PK-IV-2024-19216	-3,484029	118,979038	2024			Utama	
52	Proklamasi Desa Tangan Baru Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat_RBP REDD+GCF OUTPUT 2	11-PK-IV-2024-19209	-3,451927	118,981457	2024			Utama	
53	Proklamasi Desa Pallis Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Madar	11-PK-IV-2024-19219	-3,477066	119,061369	2024			Utama	

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2024

Pembinaan Sekolah Adiwiyata

Jumlah Pembinaan Sekolah Adiwiyata pada Tahun 2024 yakni sebanyak 52 (Lima Puluh Dua) sekolah yakni Calon Sekolah Adiwiyata Kabupaten (CSAK) sebanyak 3 (Tiga) sekolah, Sekolah Adiwiyata Provinsi (CSAP) sebanyak 16 (Enam Belas) sekolah, Calon Sekolah Adiwiyata Nasional (CSAN) sebanyak 6 (Enam) sekolah, Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri (CSAM) sebanyak 9 (Sembilan) sekolah dan 18 Sekolah Binaan Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri. Pada Tahun 2024 terdapat 4 (Empat) sekolah yang mendapat penghargaan Adiwiyata Kabupaten yakni SDN 013 Matangnga di Kecamatan Matangnga, SDN 062 Tabone di Kecamatan Matakali, SDN 032 Kunyi di Kecamatan Anreapi, dan SMPN Batu di Kecamatan Tapango, serta terdapat 1 (Satu) sekolah yang meraih Penghargaan Adiwiyata Provinsi yakni SDN 012 Galeso di Kecamatan Wonomulyo.

Pembinaan Kantor Berbudaya Lingkungan (*Eco Office*)

Pada Tahun 2024 jumlah kantor yang dibina dalam pengelolaan kantor berbudaya lingkungan (*eco office*) sebanyak 72 kantor yang terdiri dari perangkat daerah sebanyak 28 OPD, kantor kecamatan sebanyak 16, instansi vertikal sebanyak 14, kantor BUMN/BUMD 5, kantor PKK dan Kantor Perbankan sebanyak 8.

Peningkatan Kapasitas

Pada tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar telah melaksanakan kegiatan yaitu :

- Sosialisasi dan Edukasi Pemilahan Sampah yang dihadiri oleh 150 Peserta yang terdiri dari Instansi Vertikal, Dinas/Lembaga Teknis Daerah, Perbankan, Kantor BUMN/BUMD/PKK/UPTD, Pengelola Hotel, Kantor Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
- Pembekalan Atasi Sampah Plastik dengan Cara Produktif dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2024 yang dihadiri oleh 62 perwakilan Instansi yang terdiri dari Kelurahan dan Kecamatan, Komunitas Lingkungan dan Para Sekolah di Kecamatan Polewali, Binuang, Campalagian dan Tinambung.
- Pendampingan Pengelolaan Sampah Terpadu terhadap KKN Tematik Pengelolaan Sampah Terpadu yang bekerja sama dengan Universitas Al Asyariah Mandar (UNASMAN).
- Sosialisasi dan Edukasi Pengelolaan Sampah pada Objek Wisata dengan jumlah peserta 50 Orang yang terdiri dari Pimpinan/Pengelola Objek Wisata di Kabupaten Polewali Mandar.

- Sosialisasi dan Edukasi Pemilahan Sampah di sekitar Pantai Bahari yang dihadiri 70 Peserta dengan melibatkan Komunitas Lingkungan, sekolah dan warga sekitar Pantai Bahari serta Pedagang Kaki Lima Pantai Bahari.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor Penunjang :

1. Keterlibatan masyarakat : Keterlibatan masyarakat dalam program Proklam sangat penting untuk kesuksesan program ini. Masyarakat harus memahami manfaat dan tujuan dari program ini, serta berpartisipasi aktif dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan.
2. Sumber daya manusia yang terlatih : Sumber daya manusia yang terlatih, seperti kader lingkungan, penggiat lingkungan, dan petugas desa, dapat membantu memfasilitasi program Proklam di daerah. Mereka dapat memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat, serta membantu dalam pelaksanaan program.
3. Dukungan dari pemerintah daerah : Dukungan dari pemerintah daerah, seperti bantuan dana dan fasilitas, sangat penting untuk kesuksesan program Proklam. Pemerintah daerah dapat membantu dalam memfasilitasi program, mengoordinasikan pelaksanaan program, dan memantau kemajuan program.
4. Kerjasama antar lembaga : Kerjasama antar lembaga, seperti antara pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, dapat membantu dalam mengoptimalkan program Proklam. Dalam kerjasama ini, setiap pihak dapat memberikan kontribusi dan keahlian masing-masing untuk mencapai tujuan bersama.
5. Kesadaran akan pentingnya lingkungan : Kesadaran akan pentingnya lingkungan dan keberlanjutan lingkungan merupakan faktor penting yang dapat membantu terlaksananya program Proklam. Semakin tinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan, semakin mudah pelaksanaan program Proklam dilakukan.

Faktor Penghambat :

1. Kurangnya pemahaman usaha/kegiatan penghasil LB3 dengan regulasi dalam pengelolaan limbah dan Limbah B3.
2. Ketidakmampuan usaha/kegiatan penghasil Limbah B3 untuk mengelola limbahnya sendiri.
3. Beberapa usaha/kegiatan tidak membuat laporan triwulan yang seharusnya merupakan kewajiban dari setiap penghasil limbah untuk melaporkan limbahnya berdasarkan PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
4. Kurangnya koordinasi dari usaha/kegiatan penghasil limbah B3 ke dinas DLHK Polewali Mandar dalam mengelola Limbah B3 yang dihasilkannya.
5. Terbatasnya SDM baik kualitas maupun kuantitas dalam menindak lanjuti sengketa lingkungan hidup.
6. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan pengaduan khususnya kendaraan operasional.
7. Kurangnya SDM dan fasilitas pendukung dalam pengoperasian aplikasi proklam di beberapa lokasi binaan.
8. Belum maksimalnya peran guru dan murid di beberapa sekolah terhadap pelaksanaan program adiwiyata di sekolah.

Alternatif Solusi yang telah diupayakan :

- > Penambahan personil/staf pengelola pengaduan yang kemudian diikuti mengikuti diklat/bimtek peningkatan kapasitas terkait penanganan sengketa lingkungan hidup.
- > Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan pengaduan khususnya kendaraan operasional
- > Perlu dukungan pendanaan dari Pemerintah Desa dalam peningkatan kualitas SDM dan fasilitas pendukung pengoperasian aplikasi Proklim
- > Perlunya dukungan kebijakan dari Dinas Pendidikan terhadap sekolah adiwiyata untuk menginterpersi kepala sekolah agar secara aktif melaksanakan program adiwiyata di sekolah.
- > Dilakukan sosialisasi tentang pentingnya pengelolaan limbah, regulasi yang berlaku dalam pengelolaan Limbah B3, kewajiban dari setiap usaha/kegiatan penghasil limbah B3 dan informasi-informasi yang terkait dalam pengelolaan Limbah B3.
- > Memberikan usulan kepada usaha/kegiatan penghasil LB3 untuk bekerjasama dengan pihak ketiga dalam mengelola limbah yang dihasilkannya.
- > Mengingatkan usaha/kegiatan penghasil limbah untuk melaporkan data limbahnya ke DLHK Polman.
- > Melakukan *follow up* kepada usaha/kegiatan penghasil limbah B3 untuk mengetahui pengolahan limbah yang dihasilkannya serta melakukan kerjasama dengan masyarakat atau pihak terkait sebagai *stakeholder* dalam melakukan pengawasan pengelolaan limbah B3.

Adapun sejumlah Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran, sebagai berikut :

Tabel 3.22 Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2024

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
I	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	330.023.463	218.717.443	66,27
1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	330.023.463	218.717.443	66,27
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	150.003.070	87.818.958	58,54
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	180.020.393	130.898.485	72,71
II	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	50.020.480	43.212.840	86,39
1	Penyimpanan sementara Limbah B3	50.020.480	43.212.840	86,39
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	50.020.480	43.212.840	86,39

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
III	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	11.498.380.78 4	11.498.380.78 4	90,84
1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.498.380.78 4	11.498.380.78 4	90,84
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	116.462.928	110.442.739	94,83
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	11.381.917.856	10.334.219.89	90,80

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2024

RTH Wilayah Perkotaan

Dalam beberapa dekade terakhir, wilayah perkotaan di seluruh dunia mengalami peningkatan pertumbuhan yang cepat, dan dengan pertumbuhan itu datanglah tantangan-tantangan baru dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH). Namun, upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas RTH di wilayah perkotaan juga semakin berkembang dengan baik.

Peningkatan kualitas RTH di wilayah perkotaan sangat penting karena RTH memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, seperti menyediakan lingkungan yang lebih sehat dan lebih aman, mengurangi polusi udara dan suara, meningkatkan kualitas air tanah, serta menyediakan tempat untuk rekreasi dan bersosialisasi.

Oleh karena itu, perencanaan dan pengelolaan RTH yang baik menjadi sangat penting dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk di wilayah perkotaan. Salah satu langkah pertama dalam meningkatkan kualitas RTH di wilayah perkotaan adalah dengan membuat rencana pengelolaan RTH yang terintegrasi. Rencana ini harus memperhitungkan banyak faktor, seperti kebutuhan penduduk setempat, kebutuhan lingkungan, ketersediaan lahan, dan anggaran yang tersedia. Rencana ini juga harus mempertimbangkan jenis RTH yang akan dibangun, seperti taman, taman bermain, atau hutan kota.

Setelah rencana pengelolaan RTH dibuat, langkah selanjutnya adalah dengan membangun dan memelihara RTH yang telah direncanakan. Hal ini dapat mencakup pembersihan dan penataan lahan, penanaman pohon dan tanaman, pembangunan fasilitas seperti jalan setapak, dan penambahan fasilitas seperti taman bermain atau tempat duduk. Penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan RTH di wilayah perkotaan. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap proyek pengembangan RTH, serta membantu memastikan bahwa rencana pengelolaan RTH yang dibuat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat.

Akhirnya, penting untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas RTH yang telah dibangun. Hal ini dapat membantu mengetahui apakah proyek pengembangan RTH telah mencapai tujuan yang ditetapkan dalam rencana pengelolaan RTH, serta memberikan informasi yang diperlukan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan di masa depan.

Dalam keseluruhan, meningkatkan kualitas RTH di wilayah perkotaan adalah upaya yang penting dan perlu dilakukan secara terus-menerus. Dengan perencanaan yang terintegrasi, pembangunan dan pemeliharaan yang baik, serta partisipasi masyarakat yang aktif, maka RTH dapat menjadi sebuah aset yang berharga bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, serta lingkungan perkotaan secara keseluruhan.

Sasaran Strategis 3:**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah**

Indikator : Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Target : Sangat Baik (A)

Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Di tingkat Perangkat Daerah, juga diimplementasikan Perencanaan Kinerja berupa penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi. Perencanaan Kinerja dilakukan secara berjenjang. Demikian pula halnya dengan pengukuran kinerja, dilakukan secara berjenjang berdasarkan sasaran, indikator sasaran, dan target yang diperjanjikan. Selanjutnya pada akhir tahun dilakukan penyusunan Laporan Kinerja berupa LAKIP dan diakhiri dengan review oleh Inspektorat.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor Penunjang :	Faktor Penghambat :
a. Optimalnya pendampingan dan penguatan SAKIP oleh Bagian Organisasi, Bappeda, dan Inspektorat	a. Belum optimalnya pengelolaan data kinerja
b. Tersedianya aplikasi e-SAKIP	b. Belum tertibnya pelaksanaan pengukuran kinerja
Solusi :	
a. Peningkatan rapat-rapat internal untuk monitoring dan evaluasi kinerja	
b. Penyusunan standar kelengkapan data-data kinerja organisasi	

Tabel 3.23 Realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.078.310	38.932.075	90,38
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.116.136	12.116.136	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.556.545	8.407.310	87,97
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.595.510	3.797.310	67,86
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.927.735	3.927.735	100
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	3.225.494	3.225.494	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.875.900	677.100	36,09
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.780.990	6.780.990	100

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2024

Indikator : Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah

Target : 100 %

Pada aspek ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar turut menjadi pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah. Memperhatikan capaian Opini BPK dimaksud dalam 2 tahun terakhir yang selalu mencapai WTP, maka diharapkan pencapaian WTP untuk tahun anggaran 2024 ini dapat kembali mencapai WTP. Hasil opini BPK terhadap Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar masih dalam proses pemeriksaan BPK, namun dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan optimis turut menjadi Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pencapaian pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor Penunjang :

- > Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang baik : Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang baik akan membantu menciptakan lingkungan yang baik bagi pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Kebijakan ini harus mencakup pengaturan anggaran, manajemen risiko, dan pencegahan korupsi.
- > Keterbukaan dan akuntabilitas: Keterbukaan dan akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dapat dicapai melalui pelaporan keuangan yang transparan, pengawasan dari lembaga independen, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.
- > Penggunaan teknologi informasi: Penggunaan teknologi informasi dapat membantu memudahkan pengelolaan keuangan daerah. Dengan menggunakan sistem informasi keuangan yang baik, data keuangan dapat dikumpulkan, diproses, dan dianalisis dengan lebih cepat dan akurat.

Faktor Penghambat :

- > Korupsi dan kolusi: Korupsi dan kolusi adalah faktor penghambat utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan dana publik dan pengeluaran yang tidak efektif dan tidak efisien.
- > Kurangnya keterbukaan dan akuntabilitas: Kurangnya keterbukaan dan akuntabilitas dapat menyebabkan pengelolaan keuangan daerah yang buruk dan menyebabkan risiko kerugian keuangan yang signifikan.
- > Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas: Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dapat menyebabkan pengelolaan keuangan daerah yang tidak efektif dan efisien. Hal ini dapat terjadi jika pegawai tidak memiliki keterampilan, pengetahuan, atau etika yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Solusi :

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas: Pemerintah daerah harus memastikan bahwa semua aktivitas keuangan dan pengeluaran publik dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat dicapai dengan cara memperkuat pengawasan internal dan eksternal, memperkenalkan sistem pelaporan yang lebih terbuka, dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah.

Indikator : Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah

Target : Sangat Baik

i".

Dalam upaya memastikan tercapainya sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka diperlukan pula pencapaian sasaran strategis pada aspek manajemen perkantoran, sehingga kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan fungsi-fungsi pelayanan publik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan semakin membaik.

Terdapat layanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah dilakukan survey kepuasan pelayanan, yaitu : Layanan Laporan pengaduan dan beberapa layanan terkait izin lingkungan. Adapun capaian sasaran meningkatnya kualitas manajemen perkantoran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 dapat dilihat pada Chart berikut ini:

Tabel 3.24 Hasil Survei Kepuasan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2023

No.	Komponen Survei	Nilai Survei	
		Layanan Pengaduan	Layanan Izin Lingkungan
1	Kejelasan persyaratan	82,02	80,20
2	Kesederhanaan Prosedur	78,33	81,30
3	Kecepatan respon layanan	78,48	81,30
4	Etika pelayanan	82,31	85,20
Indeks Kepuasan		80,29	82,00
Rata-Rata IK		81,14	
Predikat Kinerja Layanan			
Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik
25 - 43,75	43,76 - 62,50	62,51 - 81,25	81,26 - 100

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2023

Mencermati Tabel terkait survei kepuasan layanan tersebut, maka dapat diketahui bahwa tingkat kepuasan masyarakat/stakeholders atas beberapa jenis layanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 mencapai indeks 80,97 atau predikat kinerja layanan '**Baik**'. Capaian ini sesuai dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2024 yaitu Predikat Baik. Ditinjau dari aspek nilai kepuasan, kondisi tahun 2023 ini meningkat dibanding Tahun 2023 nilai kepuasan berada di indeks 81,13. Selanjutnya, capaian tahun 2023 ini menunjukkan sudah tercapai 90,2 % dari target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022-2024.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	
Faktor Penunjang : a. Tingginya motivasi kerja Pegawai b. Adanya perkembangan teknologi dan informasi c. Meningkatnya perhatian perangkat daerah terhadap layanan yang disediakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Faktor Penghambat : a. Kondisi Bangunan Gedung Kantor yang sebagian dalam kondisi kurang layak b. Terbatasnya kelengkapan sarana prasarana pelayanan c. Terbatasnya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan

Solusi :

- Penataan ruang front office dan ruang kerja pegawai
- Optimalisasi pemeliharaan dan penyediaan sarana prasarana kerja
- Pengembangan sistem pembelajaran mandiri dan mentoring antar pegawai

Adapun Program dan Kegiatan untuk pencapaian sasaran ini, sebagai berikut :

Tabel 3.25 Realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.043.213.971	3.035.408.850	99,74
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.021.240.966	3.015.533.745	99,81
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.894.980	13.395.480	96,41
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.577.310	1.577.310	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.921.520	1.323.120	45,29
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.099.455	1.099.455	100,
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.479.740	2.479.740	100
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	0	0
2.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1.275.000	0	100
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	1.275.000	0	100
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	206.298.226	190.331.476	92,26
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.445.440	3.445.440	100

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.870.792	2.622.042	67,74
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.110.000	10.992.000	43,78
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.783.601	4.783.601	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.680.000	4.080.000	87,18
	Penyediaan Bahan/Material	12.738.915	12.738.915	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.669.478	151.669.478	100
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.674.510	37.674.510	100
	Pengadaan Mebel	14.785.200	14.785.200	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.889.310	22.889.310	100
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	429.440.950	354.859.422	82,63
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.721.500	4.721.500	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	291.519.450	228.887.922	78,52
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	133.200.000	121.250.000	91,03
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.087.500	30.569.450	30.569.450
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.707.000	26.194.250	64,35
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.380.500	4.375.200	52,21
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0

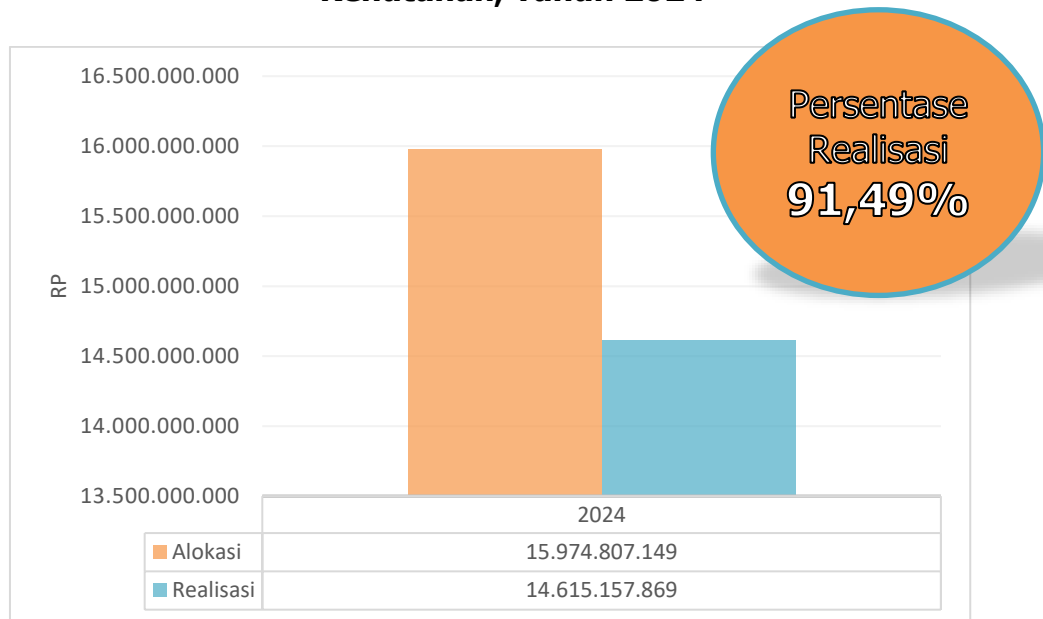
Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2024

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan dalam penggunaan sumber daya finansial. Laporan akuntabilitas kinerja yang baik harus disertai pula laporan akuntabilitas keuangan, sehingga efisiensi dan efektivitas penganggaran dapat diukur serta dapat diketahui nilai manfaat dari hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun Alokasi dan Realisasi Belanja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dapat disajikan sebagai berikut :

Grafik 3.4 Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2024



Untuk mengetahui akuntabilitas keuangan terhadap kinerja yang dihasilkan pada Tahun 2024, dapat diamati melalui tabel berikut :

Tabel 3.26 Nilai Efisiensi pada Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis dan Indikator	Target	Realisasi	%	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	% Efisiensi	Keterangan
1	Meningkatnya kualitas kebersihan lingkungan perkotaan								
	Persentase timbulan sampah yang dikelola	56,00	13,71	42,29	11.498.380.784	10.444.662.633	90,84	9,16	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Program Pengelolaan Persampahan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

No.	Sasaran Strategis dan Indikator	Target	Realisasi	%	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	% Efisiensi	Keterangan
2	Terkendalinya pencemaran lingkungan				330.023.463	218.717.443	66,27	33,73	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Tingkat Pencemaran	Ringan	Ringan	100,00	50.020.480	43.212.840	86,39	13,61	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
					286.313.955	220.789.170	77,11	22,89	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
3	Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah				3.810.068.467	3.687.775.783	96,79	3,21	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Predikat SAKIP perangkat daerah	A	BB	100,00					
	Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100%	100%	100,00					
	Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Sangat Baik	Baik	100,00					

Sumber Dana : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2024

Mencermati rata-rata pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar **91,09 %** serta capaian kinerja keuangan sebesar **91,49%**. Kondisi ini memperlihatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berhasil melakukan efisiensi penggunaan dana sebesar **8,51%**.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar menyajikan capaian sasaran strategis dinas Tahun 2023. Di dalam penyajian ini diuraikan realisasi kinerja yang dibandingkan dengan target yang telah diperjanjikan, dibandingkan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya serta perbandingan dengan target jangka menengah (tahun 2024) yang tertuang di dalam dokumen Renstra 2022-2024. Selanjutnya diuraikan pula faktor penunjang keberhasilan, kendala yang masih dihadapi serta alternative solusi yang telah diupayakan. Laporan ini tentu dilengkapi pula dengan uraian akuntabilitas keuangan dan nilai efisiensi yang mampu dicapai atas kinerja yang dicapai.

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023, secara keseluruhan dapat dinyatakan "berhasil". Hal ini ditunjukkan dengan Rata-rata pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar **91,09 %** serta capaian kinerja keuangan sebesar **91,49%**. Kondisi ini memperlihatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berhasil melakukan efisiensi penggunaan dana sebesar **8,51%**.

Namun, tidak dipungkiri masih dijumpai sejumlah kendala yang perlu menjadi perhatian utama pada kinerja tahun-tahun selanjutnya yaitu, pada :

- a. Pengelolaan persampahan;
- b. Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) melalui koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah dalam merespon dan menindaklanjuti aduan dan aspirasi masyarakat;
- c. Peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah melalui pengembangan dan pemanfaatan aplikasi persampahan untuk perbaikan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan pelayanan publik;
- d. Peningkatan koordinasi dan pemberdayaan masyarakat terkait pengelolaan persampahan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 ini disusun, untuk bahan evaluasi dan perbaikan kinerja selanjutnya.

Polewali, 14 Februari 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar,

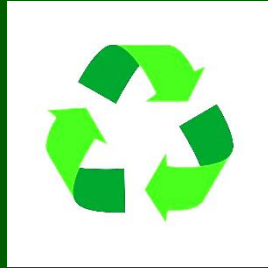


MOHAMMAD JUMADIL, S.T., M.AP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750606 200502 1 007





LAMPIRAN 1
PERJANJIAN
KINERJA DLHK
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jl. R.A Kartini No. 01 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

Telepon. 0428- 22192 Faks 0428-22192

<https://perangkatdaerah.polmankab.go.id/DIhk>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MOHAMMAD JUMADIL, ST., M.AP**
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Polewali Mandar

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA**
Jabatan : Pj. Bupati Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Januari 2024

Pihak Kedua,
Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

Drs. MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN,

MOHAMMAD JUMADIL, ST., M.AP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750606 200502 1 007

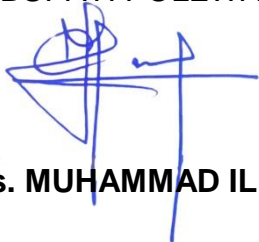
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target 2024
1	Meningkatnya kualitas keberhasilan lingkungan perkotaan	Persentase timbulan sampah yang terkelola	22,68	56,00
2	Terkendalinya pencemaran lingkungan	Tingkat pencemaran	Ringan	Ringan
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	A
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100%	100%
		Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Baik	Sangat Baik

No.	Program	Anggaran (Rp)	Ket.
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	405.931.850	APBD
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	330.025.248	APBD
3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	50.020.480	APBD
4	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	8.882.724.852	APBD
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.530.470.530	APBD
	Jumlah	15.199.172.960	

Polewali, 23 Januari 2024

Pihak Kedua,
Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,



Drs. MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN,



MOHAMMAD JUMADIL, ST., M.AP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750606 200502 1 007

PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2023

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas Kebersihan Lingkungan Perkotaan

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang diikuti dengan peraturan pelaksanaannya tertuang dalam PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Permen LHK Nomor : P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Polewali Mandar, mengisyaratkan pentingnya pengelolaan kebersihan lingkungan perkotaan karena memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan, lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Pengelolaan kebersihan lingkungan perkotaan juga penting untuk menjaga kelestarian lingkungan. Sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari air dan tanah, merusak ekosistem dan habitat satwa liar, serta menyebabkan banjir dan longsor. Kualitas udara juga dapat terpengaruh oleh limbah industri atau kendaraan bermotor, yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan dampak perubahan iklim.

Indikator Kinerja

Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola

Penentuan persentase sampah yang terkelola mengacu pada :

1. Persentase sampah yang terkelola, dengan formulasi = $\frac{\text{Jumlah timbulan sampah yang terkelola}}{\text{Jumlah timbulan sampah}} \times 100$
2. Persentase pengurangan sampah, dengan formulasi = $\frac{\text{Jumlah timbulan sampah yang mampu direduksi}}{\text{Jumlah timbulan sampah}} \times 100$
3. Persentase penanganan sampah, dengan formulasi = $\frac{\text{Jumlah timbulan sampah yang tertangani (1 thn)}}{\text{Jumlah produksi sampah}} \times 100$

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Kebersihan Lingkungan Perkotaan	Dengan meningkatnya kualitas kebersihan lingkungan perkotaan, maka risiko penyakit menular akibat limbah dan sampah dapat berkurang. Selain itu, udara yang lebih bersih juga dapat mengurangi risiko penyakit pernapasan dan alergi.	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah timbulan sampah yang terkelola x 100 dibagi jumlah timbulan sampah2. Jumlah timbulan sampah yang mampu direduksi x 100 dibagi jumlah timbulan sampah3. Jumlah produksi sampah yang tertangani (1 tahun) x 100 dibagi jumlah produksi sampah	Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 868 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2024.

Target Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Meningkatnya Kualitas Kebersihan Lingkungan Perkotaan	56,00	Meningkatnya kualitas kebersihan lingkungan perkotaan juga dapat berdampak positif pada perekonomian. Kebersihan yang baik dapat meningkatkan daya tarik kota sebagai tempat

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Terkendalinya Pencemaran Lingkungan

Terkait terkendalinya pencemaran dapat diukur dengan berbagai indikator, di antaranya :

1. Pengurangan emis gas rumah kaca : perusahaan atau organisasi dapat menetapkan target pengurangan emis gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas operasional mereka. Capaian kinerja dapat diukur dengan melihat penurunan jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan setiap tahun.
2. Pengelolaan limbah : perusahaan atau organisasi harus memiliki sistem pengelolaan limbah yang efektif untuk mengurangi dampak negatifnya pada lingkungan. Capaian kinerja dapat diukur dengan melihat jumlah limbah yang dihasilkan dan persentase yang berhasil didaur ulang.
3. Kepatuhan terhadap peraturan lingkungan : perusahaan atau organisasi harus mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku di wilayah mereka. Capaian kinerja dapat diukur dengan mengevaluasi jumlah pelanggaran peraturan lingkungan dan tindakan yang diambil untuk menghindari pelanggaran di masa depan.
4. Pengurangan konsumsi energi : perusahaan dan organisasi dapat menetapkan target untuk mengurangi konsumsi energi dari sumber-sumber yang berdampak negatif pada lingkungan. Capaian kinerja dapat diukur dengan melihat penurunan konsumsi energi dan penggunaan sumber energi terbarukan.
5. Pengelolaan risiko lingkungan : perusahaan atau organisasi harus memiliki sistem manajemen risiko lingkungan yang efektif untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Capaian kinerja dapat diukur dengan mengevaluasi efektivitas sistem manajemen risiko dan jumlah insiden yang terjadi.

Penting untuk dicatat bahwa capaian kinerja terkait terkendalinya pencemaran lingkungan harus dipantau secara terus-menerus dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa upaya untuk melindungi lingkungan berkelanjutan terus ditingkatkan.

Indikator Kinerja

Tingkat Pencemaran

Tingkat penentuan pencemaran :

Indeks	Penilaian
$0 \leq P_{ij} \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
$1 < P_{ij} \leq 5$	Cemar Ringan
$5 < P_{ij} \leq 10$	Cemar Sedang
$P_{ij} > 10$	Cemar Berat

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data										
1	Tingkat Pencemaran	Tingkat pencemaran terdiri atas 4 (empat) level, dimana masing-masing level menunjukkan tingkat pencemaran yang ada.	<table><tr><th>Indeks</th><th>Penilaian</th></tr><tr><td>$0 \leq P_{ij} \leq 1$</td><td>Memenuhi Baku Mutu</td></tr><tr><td>$1 < P_{ij} \leq 5$</td><td>Cemar Ringan</td></tr><tr><td>$5 < P_{ij} \leq 10$</td><td>Cemar Sedang</td></tr><tr><td>$P_{ij} > 10$</td><td>Cemar Berat</td></tr></table>	Indeks	Penilaian	$0 \leq P_{ij} \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$1 < P_{ij} \leq 5$	Cemar Ringan	$5 < P_{ij} \leq 10$	Cemar Sedang	$P_{ij} > 10$	Cemar Berat	Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 868 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2024.
Indeks	Penilaian													
$0 \leq P_{ij} \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu													
$1 < P_{ij} \leq 5$	Cemar Ringan													
$5 < P_{ij} \leq 10$	Cemar Sedang													
$P_{ij} > 10$	Cemar Berat													

Target Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Tingkat Pencemaran	Ringan	Tingkat pencemaran menunjukkan tren positif setiap tahun, dengan tingkat pencemaran ringan.

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

Merupakan suatu konsep pemerintahan yang membangun serta menerapkan prinsip profesionalisme, transparansi, efesiensi, akuntabilitas dan pelayanan publik.

Indikator Kinerja

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	SAKIP mendukung terciptanya good governance untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel	Predikat AA : 90-100 Predikat A : 80-90 Predikat BB : 70-80 Predikat B : 60-79 Predikat CC : 50-60 Predikat C : 30-50	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda
2	Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	Pengelolaan aset dan keuangan Perangkat Daerah yang diwujudkan dalam penyusunan laporan keuangan yang valid, sesuai standar dan dapat dipertanggungjawabkan sejalan dengan prinsip good governance untuk meningkatkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.	Diperoleh dengan mereview kinerja pengelolaan aset dan keuangan serta tersusunnya dokumen terkait aset dan laporan keuangan pada akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu	Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	Indeks kepuasan masyarakat/stake holder	Nilai-nilai efesiensi, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi merupakan syarat utama dalam pelayanan publik untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih	$\frac{\text{Jumlah seluruh IKP layanan} \times 100}{\text{Jumlah layanan publik dinas yang dilakukan survey kepuasan}}$	Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Target Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A	Target SAKIP predikat A (86,00) tahun 2024 optimis diraih Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan melihat Capaian SAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari tahun ketahun menunjukkan tren positif.
Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100%	Target WTP pengelolaan keuangan dan aset Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi target 2024. Penentuan target dipengaruhi capaian pengelolaan keuangan dan aset Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan tren positif setiap tahunnya. Capaian 2021 (WTP), 2022 (WTP) serta 2023 (WTP).

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Sangat Baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyediakan 9 (sembilan) unsur layanan, juga mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Dengan tren positif setiap tahunnya, IKM optimis ditargetkan predikat sangat baik tahun 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jl. R.A Kartini No. 01 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

Telepon. 0428- 22192 Faks 0428-22192

<https://perangkatdaerah.polmankab.go.id/DIhk>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BAHTIAR, S.STP., MM**
Jabatan : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Polewali Mandar

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MOHAMMAD JUMADIL, ST., M.AP**
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN,

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN,

MOHAMMAD JUMADIL, ST., M.AP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750606 200502 1 007

BAHTIAR, S.STP., MM

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19770715 199511 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target 2024
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	A
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100%	100%
		Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Baik	Sangat Baik

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket.
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.885.366	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.565.465.736	APBD
3	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	71.334.880	APBD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.320.000	APBD
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	201.041.088	APBD
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.674.510	APBD
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	446.956.500	APBD
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.792.450	APBD
	Jumlah	5.530.470.530	

Polewali, 23 Januari 2024

Pihak Kedua,
 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 DAN KEHUTANAN,

Pihak Pertama,
 SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN
 HIDUP DAN KEHUTANAN,



MOHAMMAD JUMADIL, ST., M.AP
 Pangkat : Pembina Tk. I
 NIP. : 19750606 200502 1 007



BAHTIAR, S.STP., MM
 Pangkat : Pembina Tk. I
 NIP. : 19770715 199511 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jl. R.A Kartini No. 01 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315
Telepon. 0428- 22192 Faks 0428-22192
<https://perangkatdaerah.polmankab.go.id/DIhk>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MULIANI, S.Sos**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **BAHTIAR, S.STP., MM**
Jabatan : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Januari 2024

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN,

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN,


BAHTIAR, S.STP., MM

Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. : 19770715 199511 1 001


MULIANI, S.Sos

Pangkat : Penata Tk. I
NIP. : 19751216 200212 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target 2024
1	Terlaksananya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian dengan Optimal	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian yang disediakan sesuai kebutuhan	100%	100%

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket.
1	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	71.334.880	APBD
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.320.000	APBD
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	201.041.088	APBD
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.674.510	APBD
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	446.956.500	APBD
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.792.450	APBD
	Jumlah	911.119.428	

Polewali, 23 Januari 2024

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN,

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN,


BAHTIAR, S.STP., MM

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19770715 199511 1 001


MULIANI, S.Sos

Pangkat : Penata Tk. I

NIP. : 19751216 200212 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jl. R.A Kartini No. 01 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

Telepon. 0428- 22192 Faks 0428-22192

<https://perangkatdaerah.polmankab.go.id/DIhk>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RAHMAT, SP., MM**
Jabatan : Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **BAHTIAR, S.STP., MM**
Jabatan : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Januari 2024

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN,

Pihak Pertama,
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN
AHLI MUDA,


BAHTIAR, S.STP., MM

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19770715 199511 1 001


RAHMAT, SP., MM

Pangkat : Penata

NIP. : 19801001 201001 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target 2024
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai Standar dan Tepat Waktu	100%	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan sesuai Standar dan Tepat Waktu	100%	100%

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket.
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.885.366	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.565.465.736	APBD
	Jumlah	4.619.351.102	

Polewali, 23 Januari 2024

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN,

Pihak Pertama,
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN
AHLI MUDA,



BAHTIAR, S.STP., MM

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19770715 199511 1 001



RAHMAT, SP., MM

Pangkat : Penata

NIP. : 19801001 201001 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jl. R.A Kartini No. 01 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

Telepon. 0428- 22192 Faks 0428-22192

<https://perangkatdaerah.polmankab.go.id/DIhk>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUH. ILYAS GANI, S.AP**

Jabatan : Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MOHAMMAD JUMADIL, ST., M.AP**

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN,

Pihak Pertama,
KABID. PENATAAN DAN PENINGKATAN
KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP,

MOHAMMAD JUMADIL, ST., M.AP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750606 200502 1 007

MUH. ILYAS GANI, S.AP

Pangkat : Penata Tk. I

NIP. : 19770527 200604 1 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target 2024
1	Tersedianya dokumen perencanaan lingkungan hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang ditetapkan sesuai standar	100 %	100 %
2	Meningkatnya ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan yang terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan izin PPLH	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	100 %	100 %
3	Meningkatnya peran serta lembaga dan individu dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup	100 %	100 %

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket.
1	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.	405.931.850	APBD
2	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	116.462.928	APBD
	Jumlah	522.394.778	

Polewali, 23 Januari 2024

Pihak Kedua,
 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 DAN KEHUTANAN,



MOHAMMAD JUMADIL, ST., M.AP
 Pangkat : Pembina Tk. I
 NIP. : 19750606 200502 1 007

Pihak Pertama,
 KABID. PENATAAN DAN PENINGKATAN
 KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP,



MUH. ILYAS GANI, S.AP
 Pangkat : Penata Tk. I
 NIP. : 19770527 200604 1 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jl. R.A Kartini No. 01 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

Telepon. 0428- 22192 Faks 0428-22192

<https://perangkatdaerah.polmankab.go.id/DIhk>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RAHMATIA I., ST., MSP**

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Limbah dan Pengendalian Pencemaran

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MOHAMMAD JUMADIL, ST., M.AP**

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN,

Pihak Pertama,
KABID. PENGELOLAAN LIMBAH DAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN,

MOHAMMAD JUMADIL, ST., M.AP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750606 200502 1 007

RAHMATIA I., ST., MSP

Pangkat : Pembina

NIP. : 19720227 200604 1 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target 2024
1	Terkendalinya Pencemaran Lingkungan	Tingkat Pencemaran	Ringan	Ringan
2	Limbah B3 yang tertangani	Persentase Limbah B3 yang tertangani	100%	100%

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket.
1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	330.025.248	APBD
2	Penyimpanan sementara Limbah B3	50.020.480	APBD
	Jumlah	380.045.728	

Pihak Kedua,
 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 DAN KEHUTANAN,



MOHAMMAD JUMADIL, ST., M.AP
 Pangkat : Pembina Tk. I
 NIP. : 19750606 200502 1 007

Polewali, 23 Januari 2024

Pihak Pertama,
 KABID. PENGELOLAAN LIMBAH DAN
 PENGENDALIAN PENCEMARAN,



RAHMATIA I., ST., MSP
 Pangkat : Pembina
 NIP. : 19720227 200604 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jl. R.A Kartini No. 01 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

Telepon. 0428- 22192 Faks 0428-22192

<https://perangkatdaerah.polmankab.go.id/DIhk>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. HAJIR, SH., MM**
Jabatan : Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MOHAMMAD JUMADIL, ST., M.AP**
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN,

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG KEBERSIHAN DAN
PERTAMANAN,

MOHAMMAD JUMADIL, ST., M.AP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750606 200502 1 007

M. HAJIR, SH., MM

Pangkat : Penata

NIP. : 19860710 201101 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target 2024
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	7.369,35 Ton	21.900 Ton
		Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	2 Kelompok	6 Kelompok.
		Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan	14 Unit	4 Unit
2	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Luas RTH yang dikelola Lingkungan Kewenangan Kabupaten/Kota	10,052 Ha	10,052 Ha

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket.
I	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	7.645.130.402	APBD
	Jumlah	7.645.130.402	

Polewali, 23 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN,



MOHAMMAD JUMADIL, ST., M.AP
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. : 19750606 200502 1 007

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG KEBERSIHAN DAN
PERTAMANAN,



M. HAJIR, SH., MM
Pangkat : Penata
NIP. : 19860710 201101 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jl. R.A Kartini No. 01 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

Telepon. 0428- 22192 Faks 0428-22192

<https://perangkatdaerah.polmankab.go.id/DIhk>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MIRIANI ABDULLAH K., SP**

Jabatan : Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **RAHMATIA I., ST., MSP**

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Limbah dan Pengendalian Pencemaran

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Januari 2024

Pihak Kedua,
KABID. PENGELOLAAN LIMBAH DAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN,

RAHMATIA I., ST., MSP

Pangkat : Pembina

NIP. : 19720227 200604 1 016

Pihak Pertama,
KASI. PEMELIHARAAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN,

MIRIANI ABDULLAH K., SP

Pangkat : Penata Tk. I

NIP. : 19830714 201101 2 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKSI PEMELIHARAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target 2024
I	Meningkatnya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-
1	Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca serta pembinaan lokasi program kampung iklim	Jumlah Laporan Inventarisasi dan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	1 Laporan	2 Dokumen
		Jumlah Lokasi Proklamasi yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup	30 Lokasi	

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket.
I	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	180.022.178	APBD
	Jumlah	180.022.178	

Polewali, 23 Januari 2024

Pihak Kedua,
KABID. PENGELOLAAN LIMBAH DAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN,



RAHMATIA I., ST., MSP

Pangkat : Pembina

NIP. : 19720227 200604 1 016

Pihak Pertama,
KASI. PEMELIHARAAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN,



MIRIANI ABDULLAH K., SP

Pangkat : Penata Tk. I

NIP. : 19830714 201101 2 016



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jl. R.A Kartini No. 01 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

Telepon. 0428- 22192 Faks 0428-22192

<https://perangkatdaerah.polmankab.go.id/DIhk>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MANSYUR, S.Sos**
Jabatan : Kepala UPTD Sampah Binuang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MOHAMMAD JUMADIL, ST., MAP**
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Polewali Mandar


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN,

Pihak Pertama,
KEPALA UPTD SAMPAH BINUANG,


MOHAMMAD JUMADIL, ST., M.AP
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. : 19750606 200502 1 007


MANSYUR, S.Sos
Pangkat : Penata Tk. I
NIP. : 19750311 199807 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA UPTD SAMPAH BINUANG

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target 2024
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase penanganan persampahan	10,32%	73%
		Persentase pengurangan sampah	12,36%	26%
		Persentase timbulan sampah yang dikelola	22,68%	99%

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket.
I	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		27%
1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	1.078.599.137	72%
	Jumlah	1.078.599.137	

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN,

Polewali, 23 Januari 2024

Pihak Pertama,

KEPALA UPTD SAMPAH BINUANG,



MOHAMMAD JUMADIL, ST., M.AP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750606 200502 1 007



MANSYUR, S.Sos

Pangkat : Penata Tk. I

NIP. : 19750311 199807 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jl. R.A Kartini No. 01 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

Telepon. 0428- 22192 Faks 0428-22192

<https://perangkatdaerah.polmankab.go.id/DIhk>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ANDI RIA ANGGRIANI, S.IP**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Sampah Binuang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MOHAMMAD JUMADIL, ST., MAP**

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Januari 2024

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
TPA SAMPAH BINUANG,

Pihak Kedua,
KEPALA UPTD SAMPAH BINUANG,

MANSYUR, S.Sos

Pangkat : Penata Tk. I

NIP. : 19750311 199807 1 007

ANDI RIA ANGGRIANI, S.IP

Pangkat : Penata

NIP. : 19820320 200901 2 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BAGIAN TATA USAHA UPTD SAMPAH BINUANG

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target 2024
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase penanganan persampahan	10,32%	73%
		Persentase pengurangan sampah	12,36%	26%
		Persentase timbulan sampah yang dikelola	22,68%	99%

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket.
I	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		27%
1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	1.078.599.137	72%
	Jumlah	1.078.599.137	

Polewali, 23 Januari 2024

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
TPA SAMPAH BINUANG,

Pihak Kedua,
KEPALA UPTD SAMPAH BINUANG,


MANSYUR, S.Sos

Pangkat : Penata Tk. I

NIP. : 19750311 199807 1 007


ANDI RIA ANGGRIANI, S.IP

Pangkat : Penata

NIP. : 19820320 200901 2 010



LAMPIRAN 2
PENGUKURAN
KINERJA DLHK
TAHUN 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan										
1.	Meningkatnya Kualitas Kebersihan Lingkungan Perkotaan	Persentase Timbunan Sampah yang Terkelola	Persen	Jumlah timbunan sampah yang terkelola x 100 dibagi jumlah timbunan sampah										
		Persentase pengurangan sampah	Persen	Jumlah timbunan sampah yang mampu direduksi x 100 dibagi jumlah timbunan sampah										
		Jumlah produksi sampah yang tertangani	Persen	Jumlah produksi sampah yang tertangani (1 tahun) x 100 dibagi jumlah produksi sampah Dengan meningkatnya kualitas kebersihan lingkungan perkotaan, maka risiko penyakit menular akibat limbah dan sampah dapat berkurang. Selain itu, udara yang lebih bersih juga dapat mengurangi risiko penyakit pernapasan dan alergi.										
2.	Terkendalinya Pencemaran Lingkungan	Tingkat Pencemaran	Indeks	<div>Tingkat penentuan pencemaran :</div> <table><thead><tr><th>Indeks</th><th>Penilaian</th></tr></thead><tbody><tr><td>$0 \leq P_{ij} \leq 1$</td><td>Memenuhi Baku Mutu</td></tr><tr><td>$1 < P_{ij} \leq 5$</td><td>Cemar Ringan</td></tr><tr><td>$5 < P_{ij} \leq 10$</td><td>Cemar Sedang</td></tr><tr><td>$P_{ij} > 10$</td><td>Cemar Berat</td></tr></tbody></table> <div>Tingkat pencemaran terdiri atas 4 (empat) level, dimana masing-masing level menunjukkan tingkat pencemaran yang ada.</div>	Indeks	Penilaian	$0 \leq P_{ij} \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$1 < P_{ij} \leq 5$	Cemar Ringan	$5 < P_{ij} \leq 10$	Cemar Sedang	$P_{ij} > 10$	Cemar Berat
Indeks	Penilaian													
$0 \leq P_{ij} \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu													
$1 < P_{ij} \leq 5$	Cemar Ringan													
$5 < P_{ij} \leq 10$	Cemar Sedang													
$P_{ij} > 10$	Cemar Berat													

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	<p>Hasil Review Inspektorat atas implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah, meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review Kinerja Predikat SAKIP meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - AA > 90 - 100 : Sangat Memuaskan - A > 80 - 90 : Memuaskan - BB > 70 - 80 : Sangat baik - B > 60 - 70 : Baik - CC > 50 - 60 : Cukup - C > 30 - 50 : Kurang - D > 0 - 30 : Sangat Kurang <p>Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.</p> <p>SAKIP mendukung terciptanya good governance untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel</p>
3.		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah		<p>Persentase Opini Pengelolaan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran Informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.</p>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan
				Pengelolaan aset dan keuangan Perangkat Daerah yang diwujudkan dalam penyusunan laporan keuangan yang valid, sesuai standar dan dapat dipertanggungjawabkan sejalan dengan prinsip good governance untuk meningkatkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
4.		Indeks kepuasan masyarakat/stoke holder		$\frac{\text{Jumlah seluruh IKP layanan} \times 100}{\text{Jumlah layanan publik dinas yang dilakukan survey kepuasan}}$ <p>Nilai-nilai efesiensi, tranparansi, akuntabilitas dan partisipasi merupakan syarat utama dalam pelayanan publik untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.</p>

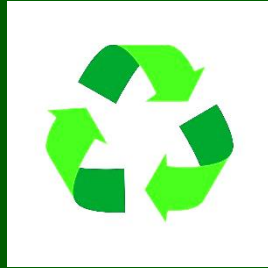
KEPALA DINAS,



MOHAMMAD JUMADIL, ST., M.AP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19750606 200502 1 007



LAMPIRAN 3
REALISASI
ANGGARAN
DLHK TAHUN
2024

**REALISASI ANGGARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN POLEWALI
MANDAR TAHUN 2024**

URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET		REALISASI		% Rp.
		K	Rp.	K	Rp.	
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	100 Persen 100 Persen 85 Persen	3.810.068.467	100 Persen 100 Persen 85 Persen	3.687.775.783	96,79
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100%	43.078.310	1	38.932.075	90,38
1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	12.116.136	2	12.116.136	100,00
1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	9.556.545	1	8.407.310	87,97
1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	5.595.510	1	3.797.310	67,86
1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.927.735	1	3.927.735	100,00
1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.225.494	1	3.225.494	100,00
1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1.875.900	1	677.100	36,09
1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	6.780.990	4	6.780.990	100,00
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	1	3.043.213.971	99,85%	3.035.408.850	99,74
2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan	630	3.021.240.966	630	3.015.533.745	99,81
2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	12	13.894.980	12	13.395.480	96,41
2.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan	1	1.577.310	1	1.577.310	100,00
2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	2.921.520	1	1.323.120	45,29
2.5 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Laporan	1	1.099.455	1	1.099.455	100,00
2.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	2	2.479.740	2	2.479.740	100,00
2.7 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	1	0	0	0	0,00
3. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persen	100%	1.275.000	100%	0	1,00
3.1 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	12	1.275.000	12	0	1,00
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	100%	0	0	0	0,00
4.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	5	0	0	0	0,00
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100%	206.298.226	100%	190.331.476	92,26
5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	4	3.445.440	4	3.445.440	100,00
5.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	2	3.870.792	2	2.622.042	67,74
5.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	12	25.110.000	12	10.992.000	43,78
5.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	2	4.783.601	2	4.783.601	100,00
5.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	2	4.680.000	2	4.080.000	87,18
5.6 Penyediaan Bahan/Material	Paket	2	12.738.915	2	12.738.915	100,00
5.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Paket	39	151.669.478	39	151.669.478	100,00
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100%	37.674.510	100%	37.674.510	100,00
6.1 Pengadaan Mebel	Unit	15	14.785.200	15	14.785.200	100,00
6.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	4	22.889.310	4	22.889.310	100,00
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%	429.440.950	96%	354.859.422	82,63
7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	4.721.500	1	4.721.500	100,00
7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	291.519.450	12	228.887.922	78,52
7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	133.200.000	11	121.250.000	91,03
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%	49.087.500	31,15%	30.569.450	62,28
8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	47	40.707.000	6	26.194.250	64,35
8.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	13	8.380.500	13	4.375.200	52,21
8.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1	0	0	0	
II. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSEN (%)	100	286.313.955	100	220.789.170	77,11

1. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	DOKUMEN	2	286.313.955	2	220.789.170	77,11
1.1 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	DOKUMEN	2	286.313.955	2	220.789.170	77,11
III. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Tingkat Cemar	Ringan	330.023.463	Ringan	218.717.443	66,27
1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dokumen	4	330.023.463	4	218.717.443	66,27
1.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	1	150.003.070	1	87.818.958	58,54
1.2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dokumen	3	180.020.393	3	130.898.485	72,71
IV. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persen	1	50.020.480	1	43.212.840	86,39
1. Penyimpanan sementara Limbah B3	Persen	1	50.020.480	1	43.212.840	86,39
1.1 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Laporan	1	50.020.480	1	43.212.840	86,39
V PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persen	1	11.498.380.784	1	10.444.662.633	90,84
1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	1	11.498.380.784	1	10.444.662.633	90,84
1. 1 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Dokumen	2	11.381.917.856	2	10.334.219.894	90,80
1.2 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga	50	116.462.928	50	110.442.739	94,83
Total			15.974.807.149		14.615.157.869	91,49

Bolewali, 24 Januari 2025

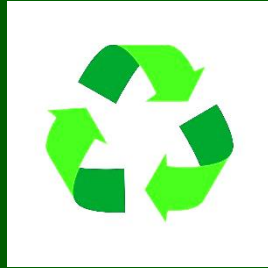
KERALA DINAS



MOHAMMAD JUMADIL, ST., MAP

Pangkat : Pembina Tk.I

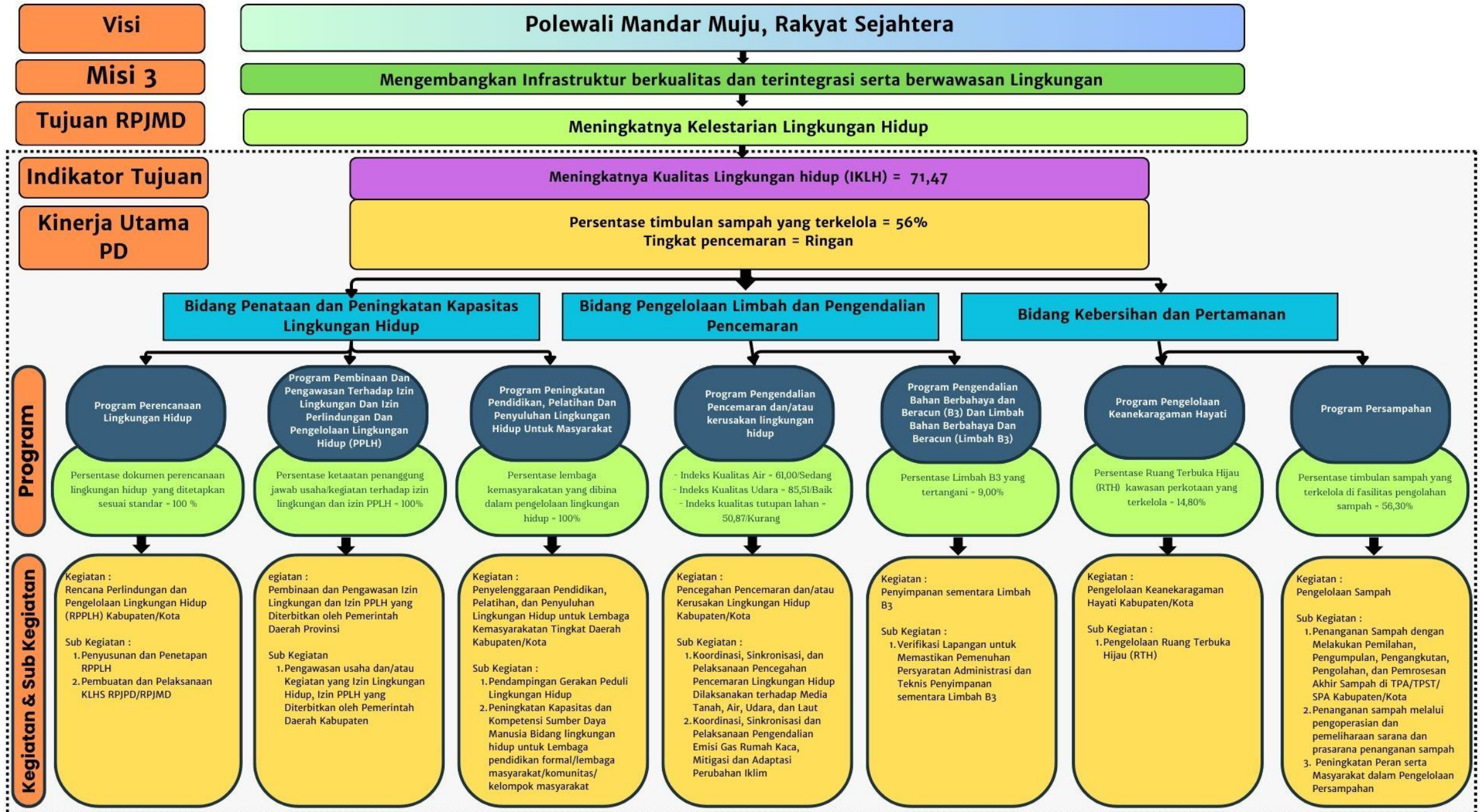
Nip. 19750606 200502 1 007

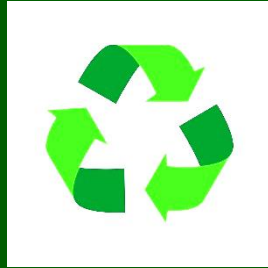


LAMPIRAN 4
POHON
KINERJA TAHUN
2024

POHON KINERJA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR





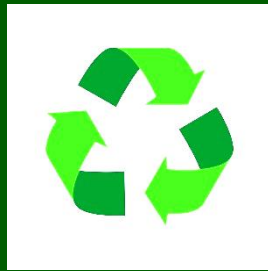
LAMPIRAN 5

LAPORAN MONEV RENCANA AKSI TAHUN 2024

LAPORAN MONEY RENCANA AKSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KAB. POLEWALI MANDAR TAHUN 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Strategi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Kebersihan Lingkungan Perkotaan	Persentase timbulan sampah yang terkelola	Persen	56	1. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	<p>1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat : Menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan melalui sosialisasi, edukasi, dan kampanye untuk membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi sampah plastik.</p> <p>2. Pengelolaan Sampah Berbasis 3R Menerapkan prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle dalam pengelolaan sampah sehingga dapat mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA.</p> <p>3. Pengolahan Sampah Terpadu : Mengintegrasikan seluruh tahapan pengelolaan sampah dari pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, hingga pengolahan dengan teknologi yang ramah lingkungan untuk menghasilkan produk yang bernilai ekonomi.</p> <p>4. Peningkatan Infrastruktur : Meningkatkan infrastruktur seperti pembangunan TPA dan TPS, fasilitas pengolahan limbah, dan kendaraan pengangkut sampah yang memadai.</p> <p>5. Peningkatan Kelembagaan : Memperkuat kelembagaan dan peran pemerintah dalam pengelolaan sampah melalui pengembangan kebijakan, penegakan hukum, dan koordinasi antara instansi terkait.</p> <p>6. Inovasi Teknologi: Menerapkan teknologi yang terbaru dan ramah lingkungan dalam pengolahan sampah seperti teknologi daur ulang, pengomposan, pengolahan air limbah, dan pemanfaatan energi dari sampah.</p> <p>7. Pengembangan Ekonomi Berbasis Sampah : Membangun sistem ekonomi yang berbasis sampah dengan memanfaatkan produk sampingan dari pengolahan sampah seperti kompos dan energi dari sampah.</p> <p>8. Kemitraan antara Pemerintah dan Swasta : Mengembangkan kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam pengelolaan sampah untuk mempercepat peningkatan infrastruktur, teknologi, dan pelayanan pengelolaan sampah.</p>	13,7
2	Terkendalinya Pencemaran Lingkungan	Tingkat Pencemaran	Tingkat Cemar	Ringan	<p>1. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</p> <p>2. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</p>	<p>1. Penambahan personil/staf pengelola pengaduan yang kemudian diikutikan mengikuti diklat/bimtek peningkatan kapasitas terkait penanganan sengketa lingkungan hidup.</p> <p>2. Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan pengaduan khususnya kendaraan operasional</p> <p>3. Perlu dukungan pendanaan dari Pemerintah Desa dalam peningkatan kualitas SDM dan fasilitas pendukung pengoperasian aplikasi Proklim</p> <p>4. Perlunya dukungan kebijakan dari Dinas Pendidikan terhadap sekolah adiwiyata untuk menginterpersi kepala sekolah agar secara aktif melaksanakan program adiwiyata di sekolah.</p> <p>5. Dilakukan sosialisasi tentang pentingnya pengelolaan limbah, regulasi yang berlaku dalam pengelolaan Limbah B3, kewajiban dari setiap usaha/kegiatan penghasil limbah B3 dan informasi-informasi yang terkait dalam pengelolaan Limbah B3.</p> <p>6. Memberikan usulan kepada usaha/kegiatan penghasil LB3 untuk bekerjasama dengan pihak ketiga dalam mengelola limbah yang dihasilkannya.</p> <p>7. Mengingatkan usaha/kegiatan penghasil limbah untuk melaporkan data limbahnya ke DLHK Polman.</p> <p>8. Melakukan follow up kepada usaha/kegiatan penghasil limbah B3 untuk mengetahui pengolahan limbah yang dihasilkannya serta melakukan kerjasama dengan masyarakat atau pihak terkait sebagai stakeholder dalam melakukan pengawasan pengelolaan limbah B3.</p>	Ringan

3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	a.Peningkatan rapat-rapat internal untuk monitoring dan evaluasi kinerja b.Penyusunan standar kelengkapan data-data kinerja organisasi	BB
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	Persen	100%		Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas: Pemerintah daerah harus memastikan bahwa semua aktivitas keuangan dan pengeluaran publik dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat dicapai dengan cara memperkuat pengawasan internal dan eksternal, memperkenalkan sistem pelaporan yang lebih terbuka, dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah.	100%
		Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah		Sangat Baik		1. Penataan ruang front office dan ruang kerja pegawai 2. Optimalisasi pemeliharaan dan penyediaan sarana prasarana kerja 3. Pengembangan sistem pembelajaran mandiri dan mentoring antar pegawai	B



LAMPIRAN 6

EVALUASI INTERNAL LAPORAN MONEV RENCANA AKSI TAHUN 2024

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN
RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN IV TAHUN 2024**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan III Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2024 (%)		Ket	
				I		II		III		IV							
1	2	3	4		5		6		7		8		9=(5+6+7+8)		10 = 9/4 x 100		15
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% Kinerja	% Rp	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu -Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu -Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor	100 Persen 100 Persen 85 Persen	3.810.068.467	0%	646.300.632	0%	902.113.383	0%	1.081.675.996	0%	1.026.268.277	0	3.656.358.288	-	95,97	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu	100%	43.078.310	18,18%	0	18,18%	19.597.383	0,00%	0	63,64%	23.369.150	100,00%	42.966.533	100,00	99,74	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.116.136	1	0	0	3.898.986	0	0	1	8.217.150	2	12.116.136	100,00	100,00	Dokumen Renstra Tahun 2025-2026 dan Renja Tahun 2025
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.556.545	0	0	0	4.989.672	0	0	1	4.566.873	1	8.407.310	100,00	87,97	
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.595.510	0	0	0	0	0	0	1	5.483.733	1	3.797.310	100,00	67,86	
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.927.735	0	0	1	3.927.735	0	0	0	0	1	3.927.735	100,00	100,00	
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.225.494	0	0	0	0	0	0	1	3.225.494	1	3.225.494	100,00	100,00	
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.875.900	0	0	0	0	0	0	1	1.875.900	1	677.100	100,00	36,09	
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	6.780.990	1	0	1	6.780.990	0	0	2	0	4	6.780.990	100,00	100,00	Laporan LPPD, LAKIP, SPIP, MRI
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100%	3.043.213.971	21%	635.200.632	28%	670.791.808	28%	863.506.640	22%	866.409.270	99,85%	3.035.908.350	99,85	99,76	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	630 Org/Bln	3.021.240.966	135 Org/Bln	635.200.632	180 Org/Bln	670.791.808	180 Org/Bln	850.479.125	135 Org/Bln	859.062.180	630	3.015.533.745	100,00	99,81	
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	13.894.980	3 Dokumen	0	3 Dokumen	0	3 Dokumen	7.871.010	3 Dokumen	6.023.970	12	13.894.980	100,00	100,00	
2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi	1 Dokumen	1.577.310	0	0	0	0	0	1.577.310	1	0	1	1.577.310	100,00	100,00	
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.921.520	0	0	0	0	0	0	1	1.323.120	1	1.323.120	100,00	45,29	
2.5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1.099.455	0	0	0	0	0	1.099.455	1	0	1	1.099.455	100,00	100,00	
2.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2.479.740	0	0	0	0	1	2.479.740	1	0	2	2.479.740	100,00	100,00	
2.7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
3	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Retribusi Daerah	100%	1.275.000	25%	0	25%	0	25%	0	25%	0	100,00%	0	100,00	-	
3.1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	1.275.000	3	0	3	0	3	0	3	0	12	0	100,00	-	in /Refocusing, tapi pe

4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0,00%	0	-	-	
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib ketatausahaan kantor	100%	206.298.226	31,75%	0	25,40%	62.364.781	22,22%	82.749.069	20,63%	45.217.626	100,00%	190.331.476	100,00	92,26	
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.445.440	1	0	1	1.062.270	1	0	1	2.383.170	4	3.445.440	100,00	100,00	
5.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	3.870.792	0	0	1	1.557.330	0	0	1	1.064.712	2	2.622.042	100,00	67,74	
5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	25.110.000	3	0	3	7.992.000	3	0	3	3.000.000	12	10.992.000	100,00	43,78	
5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.783.601	1	0	0	2.645.130	0	0	1	2.138.471	2	4.783.601	100,00	100,00	
5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	4.680.000	0	0	0	0	0	0	2	4.080.000	2	4.080.000	100,00	87,18	
5.6	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	12.738.915	0	0	1	5.046.282	0	0	1	7.692.633	2	12.738.915	100,00	100,00	
5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39 Paket	151.669.478	15	0	10	44.061.769	10	82.749.069	4	24.858.640	39	151.669.478	100,00	100,00	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tertib ketatausahaan kantor	100,00%	37.674.510	100,00%	0	0,00%	37.674.510	0,00%	0	0,00%	0	100,00%	37.674.510	100,00	100,00	
6.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	15 Unit	14.785.200	15	0	0	14.785.200	0	0	0	15	14.785.200	100,00	100,00		
6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin Lainnya yang disediakan	4 Unit	22.889.310	4	0	0	22.889.310	0	0	0	4	22.889.310	100,00	100,00		
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tertib ketatausahaan kantor	100%	429.440.950	24%	11.100.000	24%	106.168.201	24%	114.898.037	24%	84.521.731	96,00%	316.687.969	96,00	73,74	
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.721.500	0	0	0	0	0	1	4.721.500	1	4.721.500	100,00	100,00		
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	291.519.450	3	0	3	72.868.201	3	71.348.037	3	57.600.231	12	201.816.469	100,00	69,23	
7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan	12 Laporan	133.200.000	3	11.100.000	3	33.300.000	3	43.550.000	2	22.200.000	11	110.150.000	91,67	82,70	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tertib ketatausahaan kantor	100%	49.087.500	3%	0	3%	5.516.700	3%	20.522.250	21%	6.750.500	31,15%	32.789.450	31,15	66,80	
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	47 Unit	40.707.000	0	0	2	4.162.500	2	20.522.250	2	3.729.500	6	28.414.250	12,77	69,80	
8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	8.380.500	2	0	0	1.354.200	0	0	11	3.021.000	13	4.375.200	100,00	52,21	
7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
II	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Ditetapkan sesuai Standar	100%	286.313.955	0	0	50%	38.423.810	0	134.000.000	50%	29.683.215	100%	202.107.025	100,00	70,59	
1	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	2 Dokumen	286.313.955	0	0	1	38.423.810	0	134.000.000	1	29.683.215	2	202.107.025	100,00	70,59	
1.1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	2 Dokumen	286.313.955	0	0	1	38.423.810	0	134.000.000	1	29.683.215	2	202.107.025	100,00	70,59	KLHS RPJPD sdh selesai dan KLHS RPJMD sementara proses
III	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Tingkat Pencemaran	Ringan	330.023.463	0	5.550.000	0	81.300.206	0	26.395.600	Sedang	89.406.619	Sedang	202.652.425	68,36	61,41	Sedang
1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	4 Dokumen	330.023.463	0	5.550.000	0	81.300.206	0	26.395.600	3	89.406.619	3	202.652.425	75,00	61,41	
1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	150.003.070	0	3.000.000	0	36.362.440	0	4.000.000	1	35.191.500	1	78.553.940	100,00	52,37	Laporan IKLH 2024
1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen	180.020.393	0	2.550.000	0	44.937.766	0	22.395.600	2	54.215.119	2	124.098.485	66,67	68,94	Dokumen IGRK, Dokumen Aksi Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim Berbasis Tapak (ProKlim)

IV	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang tertangani	100%	50.020.480	0%	850.000	0%	3.683.130	0%	36.129.710	100%	-	100%	40.662.840	100,00	81,29	
1	Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Limbah B3 yang tertangani	100%	50.020.480	0%	850.000	0%	3.683.130	0%	36.129.710	100%	-	100%	40.662.840	100,00	81,29	
1.1	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	50.020.480	0	850.000	0	3.683.130	0	36.129.710	1	0	1	40.662.840	100,00	81,29	Laporan Verlap LB3
V	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	100%	11.498.380.784	48%	706.290.043	6%	2.168.824.689	8%	3.240.074.096	38%	2.344.422.811	100%	8.459.611.639	100%	73,57	
1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	100%	11.498.380.784	48%	706.290.043	6%	2.168.824.689	8%	3.240.074.096	38%	2.344.422.811	100%	8.459.611.639	100,00	73,57	
1.1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Yang Dilaksanakan	2 Dokumen	11.381.917.856	0	704.440.043	0	2.144.794.869	0	3.214.748.808	2	2.299.295.180	2	8.363.278.900	73,48	73,48	Progress : Penyediaan BBM dan Jasa Tenaga Kebersihan dan Pertamanan
1.2	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/Klompok Masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	50 Lembaga	116.462.928	25	1.850.000	3	24.029.820	4	25.325.288	18	45.127.631	50	96.332.739	100,00	82,72	Progress : Monitoring Keberfungsian TPS 3R Kabupaten Polewali Mandar Penyelesaian DIKPLHD Tahun 2024
JUMLAH				15.974.807.149	0	1.358.990.675	0	3.194.345.218	0	4.518.275.402	0	3.489.780.922	0	12.561.392.217			
Rata-rata Persen Capaian (%) sub kegiatan															91,09	78,63	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi	

Polewali, 6 Januari 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Polewali Mandar,

MOHAMMAD JUMADIL, ST., M.AP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750606 200502 1 007